

### Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

OPD : Bagian Kesra Sekretariat Daerah

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p><b>Program :</b> Program Koordinasi Kesejahteraan Rakyat</p> <p><b>Kegiatan :</b> Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Prov. Sumatera Barat</p> <p><b>Tujuan :</b> membumikan Alquran sehingga lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yang sesuai dengan filosofi Minangkabau yaitu Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah</p>	<p>-Kegiatan MTQ yang di ikuti Laki-laki dan perempuan berjumlah 60 orang, Laki-Laki (35 orang)peserta perempuan (25 orang) dengan 11 cabang lomba,</p> <p>-disini kita lihat perbandingan antara peserta perempuan dan laki-laki tidak seimbang,maka dari itu bagian kesra ingin mengadakan seleksi secara intensif agar mendapatkan peserta yang berkompenten dan seimbang,</p>	<p><b>Akses:</b> Di utamakan Kepada Peserta yang terpilih Di kecamatan</p> <p><b>Partisipasi:</b> semua peserta baik laki-dan perempuan berminat mengikuti seleksi tersebut</p> <p><b>Kontrol:</b> -.Setiap peserta kurangnya rasa kesedaran untuk mengikuti seleksi tersebut yg selalu dingatkan.</p> <p><b>Manfaat:</b> dalam seleksi tersebut tidak semua yg di utus karena ada terpilih dan ada tereliminasi</p>	<p>-.Pelatih Provinsi dan Kabupaten tidak tepat waktu</p> <p>-.Waktu untuk melatih peserta tidak maksimal.</p> <p>-.Panitia harus saling bekerja sama dalam Menentukan Jadwal seleksi</p>	<p>-.Tempat dan Lokasi seleksi yang kurang memadai,</p> <p>-.Al-Qur'an dan Perlengkapan Seleksi kurang lengkap</p> <p>-.Sound Sistem tidak memadai setiap cabang lomba</p>	<p>-.Meningkatnya Minat Baca Al-qur'an setiap Peserta Dalam Mengikuti Lomba MTQ</p>	<p>-.meningkatnya peserta laki-laki yang ikut seleksi di bandingkan peserta perempuan</p> <p>-.meningkatnya peringkat juara peserta laki-laki di setiap Lomba</p>	<p>-.dalam Seleksi peserta di fasilitasi dengan sebaik2nya baik agar dapat serius dan konsentrasi dalam ikut pelatihan.</p> <p>-.menjadikan peserta MTQ yang bisa bersaing di tingkat nasional</p>	<p><b>Output:</b> -.Menjadikan Qori-Qoriah yang Bersaing dalam Setiap Cabang Lomba</p> <p><b>Input</b> Rp.1.500.000.000</p> <p>-.Menyetarakan Minat Peserta Laki-laki dan Perempuan Seleksi untuk ikut Lomba MTQ</p> <p><b>Outcome</b> -.Tersedianya Qori-Qoriah yang Terbaik dalam Daerah.</p>

Pulau Punjung, 24 Maret 2020

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan Dan Kesra  
U.b  
Kepala Bagian Kesra



H. Saibaini, SE  
 Pembina Tingkat I (IV/b)  
 NIP.196508181986041007

TIM VERIFIKASI

INSPEKTUR	KEPALA BKD	KEPALA BAPPEDA	KEPALA DINSOSP3APPKB
 <p><b>KANDAM, S.Sos</b> NIP.19670607 199103 1 004</p>	 <p><b>PARYANTO, S.Sos., MT</b> NIP19690609 198902 1 001</p>	 <p><b>Drs. ANDY SUMANTO, C.FrA</b> NIP.19681220 199009 1 001</p>	 <p><b>BOBBY P RIZA, S.STP., M.Si</b> NIP19820521 200012 1 002</p>

## GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Bagian Kesra Sekretariat Daerah  
TAHUN ANGGARAN : 2021

PROGRAM	Program Koordinasi Kesejahteraan Rakyat	
KODE PROGRAM	4.01.4.01.02.81	
ANALISA SITUASI	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</b></p> <p>a. Kegiatan MTQ yang diikuti Laki-laki dan perempuan berjumlah = peserta Laki-Laki (35 orang) peserta perempuan (25 orang) dengan 11 cabang lomba.</p> <p>b. disini kita lihat perbandingan antara peserta perempuan dan laki-laki tidak seimbang, maka dari itu bagian kesra ingin mengadakan seleksi secara intensif agar mendapatkan peserta yang berkompenten dan seimbang.</p> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p><b>a. Faktor Kesenjangan</b></p> <p><b>Akses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diutamakan Kepada Peserta yang terpilih Di kecamatan</li> <li>- Qori-Qoriah terbaik yang berada di pondok tahfiz</li> </ul> <p><b>Partisipasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- semua peserta baik laki-dan perempuan berminat mengikuti seleksi tersebut</li> </ul> <p><b>Kontrol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Setiap peserta kurangnya rasa kesedaran untuk mengikuti seleksi tersebut yg selalu dingatkan.</li> </ul> <p><b>Manfaat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dalam seleksi tersebut tidak semua yg di utus karena ada terpilih dan ada tereliminasi</li> </ul> <p><b>b. Penyebab Internal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatih Provinsi dan Kabupaten tidak tepat waktu</li> <li>2. Waktu untuk melatih peserta tidak maksimal.</li> <li>3. Panitia harus saling bekerja sama dalam Menentukan Jadwal seleksi</li> </ol> <p><b>c. Penyebab Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat dan Lokasi seleksi yang kurang memadai</li> <li>2. Al-Qur'an dan Perlengkapan Seleksi kurang lengkap</li> <li>3. Sound Sistem tidak memadai di setiap Cabang Lomba</li> </ol>	
CAPAIAN PROGRAM	<p><b>1. Tolak Ukur</b></p> <p>Jumlah Dana Rp.1.500.000.000,-</p> <p><b>2. Indikator dan Target Kinerja</b></p> <p><b>Input</b></p> <p>Dana yang diusulkan sebesar Rp.1.500.000.000,-</p> <p><b>Output</b></p> <p>Menjadikan Qori-Qoriah yang Bersaing dalam Setiap Cabang Lomba</p> <p><b>Outcome</b></p> <p>Tersedianya Qori-Qoriah yang Terbaik dalam Daerah.</p>	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 1.500.000.000,-	
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	
	Masukan	Rp. 1.500.000.000,-
	Keluaran	Menjadikan Qori-Qoriah yang Bersaing dalam Setiap Cabang Lomba
	Hasil	Tersedianya Qori-Qoriah yang Terbaik dalam Daerah.

Pulau Punjung, 25 Maret 2020

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan Dan Kesra  
U.b

Kepala Bagian Kesra



TIM VERIFIKASI

<p><b>INSPEKTUR</b></p>  <p><b>KANDAM, S.Sos</b> NIP.19670607 199103 1 004</p>	<p><b>KEPALA BKD</b></p>  <p><b>PARYANTO, S.Sos., MT</b> NIP.19690609 198902 1 001</p>	<p><b>KEPALA BAPPEDA</b></p>  <p><b>Drs. ANDY SUMANTO, CFA</b> NIP.19681220 199009 1 001</p>	<p><b>KEPALA DINSOSP3APPKB</b></p>  <p><b>BOBBY F. RIZA, S. STP., M. Si</b> NIP.19820521 200012 1 002</p>
---	---	--	--

## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) Bagian Humas Setda

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>Pilih Kebijakan/Program/Kegiatan yang akan dianalisis.</b> <b>“Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa”.</b> <b>“Kegiatan Peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)”</b> <b>Identifikasi tujuannya</b> <b>1. Dalam Rangka Menyebarluaskan Informasi</b>	<b>Data Wawasan</b> -Data tahun 2019 kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID) hanya dominan di akses oleh laki-laki serta sedikit oleh perempuan -Petugas operator penyebarluasan informasi mengenai kegiatan di masing-masing OPD lebih cenderung	<b>Faktor Kesenjangan</b> (akses, manfaat, partisipasi, penguasaan) -Petugas informasi OPD/PPID pembantu mengalami banyak tantangan apabila mengambil/mencari informasi dilapangan sehingga kepala OPD lebih cenderung mengaskan laki-laki dari pada perempuan karena lokasi kegiatan lebih mudah di kuasi laki-laki dari pada perempuan.	<b>Isu Gender</b>			<b>Reformulasi Tujuan</b> Mereformulasi tujuan (kebijakan/prog ram/kegiatan) sehingga menjadi responsif gender	<b>Data Dasar (Baseline)</b> Memilih data yang akan dipakai untuk mengukur kemajuan.	<b>Indikator Gender</b> Ukuran untuk memperhatikan: - kesenjangan gender hilang/berkurang (output) - perubahan perilaku dan perubahan relasi gender - (outcome) 1. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam melakukan peliputan serta pembuatan Release berita di masing-masing OPD/PPID pembantu (Output).
			<b>Sebab Kesenjangan Internal</b> 1. Dalam surat perjanjian kerja/SPK personil Bagian Humas, kegiatan peliputan dan pembuatan release berita lebih dominan memilih laki-laki di bandingkan perempuan. 2. Dari data tahun 2020 laki-laki yang bertugas di bidang peliputan sebanyak 9 orang laki-laki, sedangkan	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b> 1. Medan lapangan yang begitu berat serta jauh dari pusat pemerintahan	<b>1. Peningkatan pelayanan informasi mengenai kebijakan kepala daerah yang responsif gender.</b> 2. Peningkatan petugas peliputan serta pemberitaan/rel ease yang mempunyai kompetensi			

Kebijakan Daerah	di lakukan oleh laki-laki di bandingkan perempuan	-Dalam menemani dan memanfaatkan kamera digital hanya laki-laki yang lebih paham dibandingkan perempuan termasuk dalam mencari momen yang tepat sebelum mengambil foto.	perempuan sebanyak 2 orang		dalam menyebarkan informasi pembangunan daerah yang responsif gender.		penyebarkan informasi mengenai kegiatan di masing-masing OPD lebih cenderung di lakukan oleh laki-laki di bandingkan perempuan	2. Menetapkan petugas kamramen yang terlibat dalam pengambilan gambar ataupun baik petugas Bagian Humas (PPID, utama) maupun petugas kamramen OPD/PPID pembantu (Outcome).
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Inspektur  
**KANDAM, S.Sos**  
 NIP. 1967060719910311004

Kepala BKD  
**PARYANTO, S.Sos, M.T**  
 NIP. 196906091989021001

Kepala Bappeda  
**Drs. ANDI SUMANTO, DEA**  
 NIP. 196812201990091001

Kepala Dinas Sosial  
**BOBY PERMANA, S.Si, M.Si**  
 NIP. 198305212001021002

Plubau Pujung, Maret 2020  
 Sekretaris Daerah Kab. Dharmasraya  
**SEIDA**  
**SEIDANG PURWANINGSIH, SE, M.Si**  
 NIP. 196303141958032003

# FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)		
SKPD	: BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DAERAH	
TAHUN ANGGARAN	: 2021	
PROGRAM	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
KODE PROGRAM	2.10. 4.01.02.15	
KEGIATAN	Peningkatan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID).	
HASIL/OUTPUT	<i>Peningkatan pelayanan informasi mengenai kebijakan kepala daerah serta informasi pembangunan di daerah yang berimbang.</i>	
ANALISIS SITUASI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). <i>Petugas operator penyebarluasan Informasi mengenai kegiatan di masing-masing OPD lebih cenderung di lakukan oleh laki-laki di bandingkan perempuan.</i></li> <li>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Petugas informasi OPD/PPID pembantu mengalami banyak tantangan apabila mengambil/mencari informasi dilapangan sehingga kepala OPD lebih cenderung menugaskan laki-laki dari pada perempuan karena lokasi kegiatan lebih mudah di kuasi laki-laki dari pada perempuan.</i></li> <li>b. <i>Dalam surat perjanjian kerja/SPK personil Bagian Humas, kegiatan peliputan dan pembuatan release berita lebih dominan memilih laki-laki dibandingkan perempuan.</i></li> <li>c. <i>Medan lapangan yang begitu berat serta jauh dari pusat pemerintahan.</i></li> </ol> </li> </ol>	
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	<i>Membuat/menyelenggarakan kegiatan pelatihan jurnalistik bagi petugas peliputan baik di Bagian Humas/PPID utama maupun di OPD/PPID pembantu.</i>
	Tujuan	<i>Terwujudnya sumber daya manusia(SDM) yang terampil dalam melakukan peliputan serta pembuatan Release berita di masing-masing OPD/PPID pembantu.</i>
	Alokasi Anggaran	Rp.67.500.000
	Komponen/ aktifitas 2	<i>Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kameramen berita sehingga dihasilkan kameramen yang responsif gender.</i>
	Tujuan	<i>Menciptakan petugas kameramen yang terlatih dalam pengambilan gambar dilapangan baik petugas Bagian Humas (PPID utama)</i>

			<i>maupun petugas kameramen OPD/PPID pembantu.</i>
		<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp.51.300.000
		<b>Total anggaran</b>	Rp.118.800.000
<b>CAPAIAN PROGRAM</b> (di level kegiatan)	Menciptakan SDM yang handal di bidang peliputan, Release berita, kameramen sehingga informasi yang berkualitas dan proporsional dapat terwujud baik bagi PPID utama (Humas Sekda) maupun bagi PPID pembantu (OPD).		

<p><b>Inspektur</b></p> <p><u>KANDAM, S.Sos</u> NIP. 19670607 199103 1 004</p>	<p><b>Kepala BKD</b></p> <p><u>PARYANTO, S.Sos, M.T</u> NIP. 19690609 198902 1 001</p>	<p><b>Kepala Bappeda</b></p> <p><u>Drs. ANDY SUMANTO, Cfra</u> NIP. 19681220 199009 1 001</p>	<p><b>Kepala Dinas Sosial PPKB</b></p> <p><u>BOBY PERDANA RIZA, S.STP, M.SI</u> NIP. 19820521 200102 1 002</p>
--	--	---	--

Pulau Pinjung, Maret 2020  
An. Sekretaris Daerah Kab. Dharmasraya  
Kepala Bagian Humas,  
**SETDA**  
ENDANG PURWANINGSIH, SE, M.SI  
NIP. 19630314 195803 2 003

OPD : Bag. Organisasi SEPPA.  
 Program : Capaian kelembagaan, ketatalaksanaan & pengembangan kerja  
 Kegiatan : Fasilitas penyusunan Standar pelayanan OPD.

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program : peran lembaga tata laksana dan pengembangan kerja Kegiatan : fasilitasi penyusunan standar pelayanan OPD tujuannya : meningkatkan pelayanan publik tingkat daerah	Data Pembukaan Wawasan Mengacu pada Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan melakukan koordinasi untuk mendorong peningkatan pelayanan publik pada unit kerja. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan Akses - Diutamakan perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik - Semua ASN Partisipasi - Pelayanan Khusus bagi yang berkebutuhan khusus (Disabilitas) Manfaat - Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik	Sebab Kesenjangan Internal - Kurangnya sosialisasi tentang Standar Pelayanan Publik ke Masyarakat sebagai pengguna layanan - Kurangnya SDM yang kompeten dalam memberikan pelayanan	Sebab Kesenjangan Eksternal - Kurangnya inovasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat - Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik atau masukan dalam rangka	Reformulasi Tujuan - Agar meningkatnya pemahaman tentang pelayanan publik bagi perangkat daerah - Agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi tentang standar Pelayanan	Rencana Aksi - Melakukan kerjasama dengan perangkat daerah, puskesmas, dan Nagari - Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepatuhan terhadap standar pelayanan bersama perangkat daerah, puskesmas dan Nagari	Data Dasar (Baseline) Jumlah Jenis layanan perangkat Daerah, Puskesmas dan Nagari	Indikator Gender Output : - Jumlah Unit pelayanan publik yang memiliki pelayanan terhadap berkebutuhan khusus (Disabilitas) Outcome : - Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat

	<i>permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya</i>	<i>Kontrol - kesenjangan (akses, pelayanan, penilaian, hasil)</i>		<i>pelayanan publik</i>				
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	

# FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)		
SKPD	: Bagian Organisasi	
TAHUN ANGGARAN	: 2020	
PROGRAM	Laporan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pengembangan Kerja	
KODE PROGRAM	4.01.4.01.02.78	
KEGIATAN	Fasilitas Penyusunan Standar Pelayanan OPD	
HASIL/OUTPUT	Jumlah Unit Pelayanan Publik yang memiliki pelayanan terhadap berkebutuhan khusus (Dissabilitas)	
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka wawasan</p> <p>a. Mengacu pada Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan melakukan koordinasi untuk mendorong peningkatan pelayanan publik pada unit kerja.</p> <p>b. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Akses</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diutamakan perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik</li> <li>- Semua ASN</li> </ul> <p>a. Partisipasi</p> <p>Pelayanan Khusus bagi yang berkebutuhan khusus (Dissabilitas)</p> <p>b. Manfaat</p> <p>Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik</p> <p>c. Kontrol</p> <p>kesenjangan (akses, pelayanan, , penilaian, hasil)</p> <p>d. Faktor Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya sosialisasi tentang Standar Pelayanan Publik ke Masyarakat sebagai pengguna layanan</li> <li>- Kurangnya SDM yang kompeten dalam memberikan pelayanan</li> </ul> <p>b. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya Inovasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat</li> <li>- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kritik atau masukan dalam rangka peningkatan</li> </ul>	
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepatuhan terhadap standar pelayanan bersama perangkat daerah, puskesmas dan Nagari
	Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar meningkatnya pemahaman tentang satandar pelayanan publik bagi perangkat daerah</li> <li>- Agar masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi tentang standar Pelayanan</li> </ul>
	Alokasi Anggaran	Rp. 116.511.000,-
Total anggaran		Rp. 116.511.000,-

<b>CAPAIAN PROGRAM</b> (di level kegiatan)	<b>Output :</b> Jumlah Unit pelayanan publik yang memiliki pelayanan terhadap berkebutuhan khusus (Dissabilitas) <b>Outcome :</b> Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat
---	--


  
 a.n Kepala Bagian Organisasi  
 Kasubag Ketatalaksanaan,  
 Indra Kadican, S.Kep  
 Penata (III/c)  
 NIP. 19810102 200501 1 008

NIK VERIFIKASI

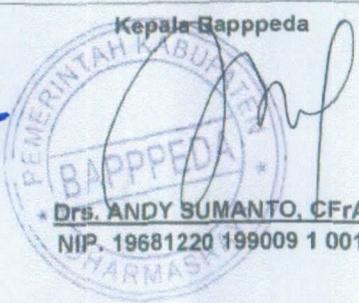
 INSPEKTUR KANDAM, S.Sos NIP. 19670607 199103 1 004	 KEPALA BKKD PARTANTO, S.Sos, MT NIP. 19690609 199902 1 001	 KEPALA BAPPEDA Drs. ANDY SUMANTO, CFT NIP. 19681720 199008 1 001	 KEPALA DIRSOS/BAT PKB BOBILINZA, S.STP, M.Si NIP. 19810102 200501 1 002
--	--	---	---

## MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

**D** : Badan Pertencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
**PROGRAM** : Perencanaan Pembangunan Daerah  
**STRATEGIS** : Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<b>Program :</b> Perencanaan Pembangunan Daerah  <b>Kegiatan :</b>  Penyelenggaraan Musrenbang RKP Kabupaten  <b>Tujuan :</b>  -Terselenggaranya Musrenbang RKP	1. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang perencanaan partisipatif, bottom-up, top- down, teknokratik, politik  2. Usulan masyarakat lebih banyak pada bidang fisik dan prasarana minim usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas perempuan	Keterlibatan mayoritas laki-laki pada musrenbang Musrenbang RKP Kabupaten  <b>Akses:</b> - Org yang menghadiri sudah ditentukan (undangan menghadiri untuk orang tertentu)  <b>Partisipasi: (dalam menyampaikan aspirasi)</b>  - Partisipasi perempuan lebih sedikit dibanding peserta laki-laki,	- ASN yang berperan sebagai Fasilitator dan narasumber tidak memahami konsep responsive Gender  - Kesenjangan Gender dimana laki-laki lebih banyak menduduki jabatan penting daripada perempuan Petunjuk Musrenbang belum Responsif Gender	- Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep Gender yang menganggap gender sebagai mendahulukan perempuan  - Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep gender  - Budaya Patriarki yang mengutamakan Pria sebagai pemimpin dalam hal kepala keluarga, tokoh	Terakomodir nya usulan masyarakat berbasis gender dalam dokumen perencanaan	-sosialisasi dan undangan secara adil dan merata -partisipasi kelompok perempuan yang mewakili gender minimal 30%  - sosialisasi tentang yang akan dibahas dalam perencanaan pembangunan guna meningkatkan kualitas peserta musrenbang	-kurangnya usulan masyarakat yang berbasis gender -Terakomodirnya usulan musrenbang pada RENja OPD	<b>Output:</b>  Dokumen perencanaan (RKP) yang responsif gender dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan  <b>Outcomes :</b>  Terakomodirnya perencanaan pembangunan yang responsif gender

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		<p>dan kualitas perwakilan perempuan relatif pasif dibandingkan peserta laki-laki sehingga tidak bisa mengatasi permasalahan dan kebutuhan perempuan</p> <p>Utusan Perwakilan dari kecamatan pada kegiatan musrenbang didominasi laki-laki dibanding perempuan, karena terkait petugas/pejabat wewenang nagari didominasi kaum laki-laki</p> <p><b>Control:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemampuan masyarakat menentukan usulannya tergantung pada prioritas, keselarasan</li> </ul>		<p>masyarakat, ketua kelompok, dll</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya akses dan partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan, dimana perempuan dianggap lebih mendahulukan perasaan dibanding fakta</li> </ul>		<p>(khususnya) perempuan -juknis yang responsif gender dalam proses musrenbang (advokasi, sosialisasi Pengarusutamaan gender)</p>		

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		pembangunan daerah, provinsi  <b>Manfaat :</b> - Tersampaikan aspirasinya masyarakat						
Tim Verifikasi :								
 Inspektur  <b>KANDAM, S.Sos</b> NIP. 19670607 199103 1004	 Kepala BKD  <b>PARYANTO, S.Sos, M.T</b> NIP. 19690609 198902 1 001	 Kepala Bappeda  <b>Drs. ANDY SUMANTO, C.FrA</b> NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala Dinas Sosial PPKB  <b>BOB FERDANA RIZA, S.STP, M.SI</b> NIP. 19820521 20012 1 002					

**GENDER BUDGET STATEMENT**  
**(Pernyataan Anggaran Gender)**

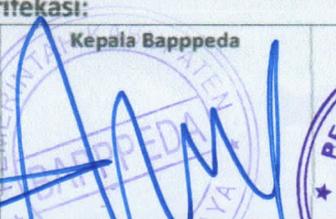
SKPD : BAPPPEDA DHARMASRAYA

TAHUN ANGGARAN : 2021

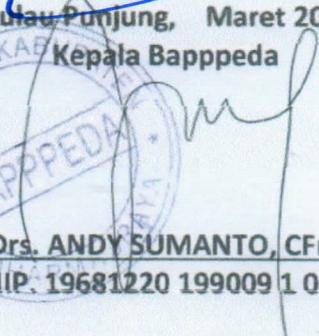
<b>PROGRAM</b>	Perencanaan Pembangunan Daerah					
<b>KODE PROGRAM</b>	4.03.4.03.01.21					
<b>ANALISA SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</b></p> <p>1. Usulan masyarakat lebih banyak pada bidang fisik dan prasarana minim usulan yang menjadi kebutuhan mayoritas perempuan</p> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p><b>a. Faktor Kesenjangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi/undangan menghadiri sudah ditentukan</li> <li>- Mayoritas peserta laki-laki dibandingkan perempuan</li> <li>- Kualitas peserta laki-laki lebih aktif dibandingkan perempuan</li> <li>- Manfaat minim untuk permasalahan pembangunan nonfisik seperti pembangunan mental dan pembangunan manusia</li> </ul> <p><b>b. Penyebab Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitator dan narasumber yang tidak responsif gender</li> <li>- Kesenjangan gender, dimana laki-laki lebih banyak menduduki jabatan penting dibanding perempuan</li> <li>- Juknis musrenbang yang belum responsive gender</li> </ul> <p><b>c. Penyebab Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya pemahaman masyarakat tentang konsep responsive gender</li> <li>- Budaya patriaki yang mengutamakan pria sebagai pemimpin dalam hal kepala keluarga, tokoh masyarakat dan jabatan penting</li> <li>- Terbatasnya akses dan partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan, dimana perempuan dianggap lebih mendahulukan perasaan dibanding fakta</li> </ul>					
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<p><b>1. Tolak Ukur</b></p> <p>-Input : Dana untuk pelaksanaan kegiatan musrenbang</p> <p>-Output : Terlaksananya forum SKPD dan Musrenbang RKPD Tahun 2019</p> <p>-Outcomes : Terakomodirnya dan sinkronnya usulan kegiatan nagari/kecamatan kedalam Dokumen RKPD Tahun 2020</p> <p><b>2. Indikator dan Target Kinerja</b></p> <p>Indikator : Persentase penjabaran program perencanaan pembangunan daerah</p> <p>Target Kinerja : 70%</p>					
<b>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</b>	Rp. 1.780.637.350,-					
<b>RENCANA AKSI</b>	<p>Kegiatan 1 Penyelenggaraan musrenbang RKPD</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Masukan</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">Rp. 253.529.850,-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Keluaran</td> <td style="text-align: right;">Dokumen perencanaan pembangunan yang responsive gender</td> </tr> </table>		Masukan	Rp. 253.529.850,-	Keluaran	Dokumen perencanaan pembangunan yang responsive gender
Masukan	Rp. 253.529.850,-					
Keluaran	Dokumen perencanaan pembangunan yang responsive gender					

	Masukan	Rp. 75,000,000,-
	Keluaran	Aplikasi e-Planing SIMDA Perencanaan
	Hasil	Terimplementasikannya SIMDA Perencanaan

**Tim Verifekasi:**

 <p><b>Inspektur</b> KANDAM, S.Sos NIP. 19570807 199103 1004</p>	 <p><b>Kepala BKD</b> PARYANTO, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001</p>	 <p><b>Kepala Bappeda</b> Drs. ANDY SUMANTO, C.FrA NIP. 19681220 199009 1 001</p>	 <p><b>Kepala Dinas Sosial PPKB</b> BOBY PERDANA RIZA, S.STP, M.Si NIP. 19820921 200121 1 002</p>
---	--	---	--

Pulau Punjung, Maret 2020  
Kepala Bappeda



**Drs. ANDY SUMANTO, C.FrA**  
NIP. 19681220 199009 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : BKPSDM Kab. Dharmasraya  
 Program : Pendidikan Kedinasan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
<p><b>Program :</b> Pendidikan Kedinasan</p> <p><b>Kegiatan :</b> Pendidikan Perjenjangan Struktural dalam pelaksanaan Diklat PIM III</p> <p><b>Tujuan:</b> Peningkatan kapasitas dan kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai amanat pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan Jabatan bagi PNS, dimana Diklat PIM merupakan salah satu syarat untuk menduduki Jabatan Eselon.</li> <li>- Jumlah PNS yang menduduki jabatan Eselon (II, III, IV) Kab. Dharmasraya saat ini sebanyak 528 orang terdiri dari 313 orang laki-laki dan 215 orang perempuan. Pejabat yang belum mengikuti diklat PIM sebanyak 418 orang terdiri dari 241 orang laki-laki dan 177 orang perempuan</li> </ul>	<p><b>Akses :</b> Jumlah PNS Kab. Dharmasraya per 31 Desember 2019, perempuan (2395 orang) lebih banyak dari laki-laki (1237 orang )</p> <p><b>Partisipasi :</b> Jumlah pegawai perempuan yang telah memenuhi ke pangkatan lebih besar daripada laki-laki</p> <p>Jabatan Struktural di dominasi oleh laki-laki</p> <p>Belum semua pejabat eselon III bersedia mengikutinya</p> <p><b>Kontrol:</b></p>	<p><b>Keterbatasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan Anggaran mengakibatkan peserta PIM III sedikit, sedangkan peminat Tinggi untuk mengikuti PIM III.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya kuota peserta untuk mengikuti PIM III dari penyelenggara</li> <li>- Jumlah Pejabat Eselon berjenis kelamin perempuan lebih sedikit daripada laki-laki</li> <li>- Belum memenuhi syarat kepegawaian untuk Diklat PIM yang lebih tinggi</li> </ul>	<p>Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Pejabat eselon III Kab. Dharmasraya dengan dibuktikan sertifikat Diklat PIM III sehingga syarat pengisian jabatan bisa terpenuhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BKPSDM melakukan penambahan kuota peserta PIM III dan mengirim peserta tersebut melalui pola kontribusi ke BPSDM Prov. Sumbar</li> <li>- BKPSDM meningkatkan dan memberi motivasi kepada pejabat eselon III untuk ikut berpartisipasi dalam diklat PIM III</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pejabat Eselon III yang belum mengikuti Diklat PIM III sebanyak 109 orang terdiri dari 33 orang perempuan dan 76 orang laki-laki</li> <li>- Pejabat eselon III yang akan ikut Diklat PIM III sebanyak 44 orang terdiri dari 17 orang perempuan dan 27 orang laki-laki</li> </ul>	<p><b>Output :</b> sebanyak 44 orang peserta Diklat PIM III selesai dilaksanakan</p> <p><b>Outcome :</b> Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Pejabat Eselon III menjadi lebih baik</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eselon III, laki-laki 97 orang, perempuan 34 orang</li> <li>- Jumlah Pejabat eselon III yang sudah Diklat PIM III, laki-laki 21 orang (<math>21/97 * 100\% = 21,64\%</math>) dan perempuan 1 orang (<math>1/34 * 100\% = 2,94\%</math>), sehingga pejabat Eselon yang sudah mengikuti Diklat PIM III yaitu 22 orang (<math>22/131 * 100\% = 16,79\%</math>)</li> </ul>	keikutsertaan peserta ditentukan oleh pimpinan/atasan					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentase Pejabat Eselon III yang ikut naik menjadi 33,20%</li> </ul>	
---	---	--	--	--	--	---	--

Pulau Punjung, Maret 2020  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

**KHAIRUDDIN, SE,MM**  
 Pembina Utama Muda  
 Nip. 19650525 198601 1 005

**VERIFIKASI KEGIATAN**

<p><b>Inspektur</b></p> <p><b>(KAMDAM, S.Sos)</b>        NIP 19670607 199103 1 004</p>	<p><b>Kepala BKD</b></p> <p><b>(PARYANTO, S.Sos, MT)</b>        NIP 19690609 198902 1 001</p>	<p><b>Kepala BAPPEDA</b></p> <p><b>(Drs. ANDY SUMANTO, CfrA)</b>        NIP 19681220 199009 1 001</p>	<p><b>Kepala Dinas Sosial P3A PPKB</b></p> <p><b>(BOBBY P. RIZA, S. STP, M.Si)</b>        NIP 19820521 200012 1 002</p>
--	---	---	---

<b>PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)</b>							
<b>SKPD</b>	<b>: BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>						
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>: 2021</b>						
<b>PROGRAM</b>	Pendidikan Kedinasan						
<b>KODE PROGRAM</b>	4.05.4.25.01.30						
<b>KEGIATAN</b>	Pendidikan Perjenjangan Struktural						
<b>HASIL/OUTPUT</b>	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi Pejabat eselon III Kab. Dharmasraya dengan dibuktikan sertifikat Diklat PIM III sehingga syarat pengisian jabatan bisa terpenuhi						
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sesuai amanat pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan Jabatan bagi PNS, dimana Diklat PIM merupakan salah satu syarat untuk menduduki Jabatan Eselon.</li> <li>- Jumlah PNS yang menduduki jabatan Eselon (II, III, IV) Kab. Dharmasraya saat ini sebanyak 528 orang terdiri dari 313 orang laki-laki dan 215 orang perempuan. Pejabat yang belum mengikuti diklat PIM sebanyak 418 orang terdiri dari 241 orang laki-laki dan 177 orang perempuan</li> <li>- Eselon III, laki-laki 97 orang, perempuan 34 orang</li> <li>- Jumlah Pejabat eselon III yang sudah Diklat PIM III, laki-laki 21 orang (<math>21/97*100\%= 21,64\%</math>) dan perempuan 1 orang (<math>1/34*100\%= 2,94\%</math>), sehingga pejabat Eselon yang sudah mengikuti Diklat PIM III yaitu 22 orang (<math>22/131*100\%= 16,79\%</math>)</li> </ul> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p>a. Faktor Kesenjangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses : Jumlah PNS Kab. Dharmasraya per 31 Desember 2019, perempuan (2395 orang) lebih banyak dari laki-laki (1237 orang )</li> <li>- Partisipasi : Jumlah pegawai perempuan yang telah memenuhi kepangkatan lebih besar daripada laki-laki</li> <li>- Jabatan Struktural di dominasi oleh laki-laki</li> <li>- Belum semua pejabat eselon III bersedia mengikutinya</li> <li>- Kontrol: keikutsertaan peserta ditentukan oleh pimpinan/atasan</li> </ul> <p>b. Penyebab Internal :</p> <p>Keterbatasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan Anggaran mengakibatkan peserta PIM III sedikit, sedangkan peminat Tinggi untuk mengikuti PIM III.</li> </ul> <p>c. Penyebab Eksternal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya kuota peserta untuk mengikuti PIM III dari penyelenggara</li> <li>- Jumlah Pejabat Eselon berjenis kelamin perempuan lebih sedikit daripada laki-laki</li> <li>- Belum memenuhi syarat kepegawaian untuk Diklat PIM yang lebih tinggi</li> </ul>						
<b>RENCANA AKSI</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Komponen/ Aktifitas</b></td> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BKPSDM melakukan penambahan kuota peserta PIM III dan mengirim peserta tersebut melalui pola kontribusi ke BPSDM Prov. Sumbar</li> <li>- BKPSDM meningkatkan dan memberi motivasi kepada pejabat eselon III untuk ikut berpartisipasi dalam Diklat PIM III</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><b>Tujuan</b></td> <td style="width: 15%;"></td> <td>Agar Pejabat Eselon 3 yang mengikuti Diklat PIM III meningkat dan termotivasi</td> </tr> </table>	<b>Komponen/ Aktifitas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BKPSDM melakukan penambahan kuota peserta PIM III dan mengirim peserta tersebut melalui pola kontribusi ke BPSDM Prov. Sumbar</li> <li>- BKPSDM meningkatkan dan memberi motivasi kepada pejabat eselon III untuk ikut berpartisipasi dalam Diklat PIM III</li> </ul>		<b>Tujuan</b>		Agar Pejabat Eselon 3 yang mengikuti Diklat PIM III meningkat dan termotivasi
<b>Komponen/ Aktifitas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BKPSDM melakukan penambahan kuota peserta PIM III dan mengirim peserta tersebut melalui pola kontribusi ke BPSDM Prov. Sumbar</li> <li>- BKPSDM meningkatkan dan memberi motivasi kepada pejabat eselon III untuk ikut berpartisipasi dalam Diklat PIM III</li> </ul>						
<b>Tujuan</b>		Agar Pejabat Eselon 3 yang mengikuti Diklat PIM III meningkat dan termotivasi					

		<b>Alokasi Anggaran</b>	APBD Dharmasraya Tahun 2021 Rp. 767.132.000
<b>CAPAIAN PROGRAM</b> (di level kegiatan)	<b>Output</b> : sebanyak 44 orang peserta Diklat PIM III selesai dilaksanakan <b>Outcome</b> : Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Pejabat Eselon III menjadi lebih baik		

Pulau Punjung, Maret 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



**KHAIRUDDIN, SE,MM**  
Pembina Utama Muda

Nip. 19650525 198601 1 005

VERIFIKASI KEGIATAN			
Inspektur	Kepala BKD	Kepala BAPPEDA	Kepala Dinas Sosial P3A PPKB
			
<b>(KAMDAM, S.Sos)</b> NIP 19670607 199103 1 004	<b>(PARYANTO, S.Sos, M.T)</b> NIP 19690609 198902 1 001	<b>(Drs. ANDY SUMANTO, CfrA)</b> NIP 19681220 199009 1 001	<b>(BOBBY P RIZA, S.STP, M.Si)</b> NIP 19820521 200012 1 002

**MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
 Nama Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
Program : Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Kelompok rentan yang terdampak oleh bencana di antaranya kaum perempuan, anak- anak dan lansia	1. Partisipasi  (Minimnya minat kaum perempuan mengikuti sosialisasi dan pelatihan tentang kesiapsiagaan bercane di daerah rawan bencana)	Belum maksimal dalam meminta peserta sosialisasi dan pelatihan gladi kesiapsiagaan bencana kepada Pemerintah Nagari yang daerahnya termasuk daerah rawan bencana	Kecendrungan dimasyarakat yang mengikuti kegiatan terkait dgn kesiapsiagaan bencana hanya diikuti oleh laki- laki	Memprioritaskan kepersertaan perempuan dalam kegiatan pelatihan dan gladi kesiapsiagaan bencana	Meminta Pemerintah Nagari yang daerahnya termasuk daerah rawan bencana untuk memprioritaskan atau setidaknya sama banyaknya peserta laki-laki dan perempuan dalam mengikuti sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana.	Kelompok rentan yang terdampak oleh bencana di antaranya kaum perempuan, anak- anak dan lansia	'Output : Meningkatnya jumlah peserta pelatihan dan gladi kesiapsiagaan bencana dari kaum perempuan
Kegiatan : Pelatihan dan gladi kesiapsiagaan bencana								Outcome : pelatihan dan gladi kesiapsiagaan bencana yang responsive gender

Tujuan : Mengurangi  
resiko bencana bagi  
kelompok rentan  
bencana

Sungai Dareh, Maret 2020

Kepala Pelaksana,

ELISON, ST

NIP. 31230712 200501 2 012

TIM VERIFIKASI

Inspektur

KANDAM, S.Sos

NIP. 196706071991031004

KEPALA BKD

Dr. ANDY SUMANTO, CHA

NIP. 196812201990091001

Kepala Bappeda

Dr. ANDY SUMANTO, CHA

NIP. 196812201990091001

Kepala Dinas Sosial, PPA, DKKB

BHARATI, RIZA, S.STP, M.Si

NIP. 198209212000121003

## FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)					
SKPD	: <i>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</i>				
TAHUN	: 2021				
ANGGARAN					
PROGRAM	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam				
KODE PROGRAM	1.06 . 1.06.02 . 22				
KEGIATAN	Pelatihan dan Gladi Kesiapsiagaan Bencana				
HASIL/OUTPUT	- Meningkatnya jumlah peserta pelatihan dan gladi kesiapsiagaan bencana dari kaum perempuan				
ANALISIS SITUASI	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</b> kegiatan pelatihan dan Gladi Kesiapsiagaan Bencana pesertanya didominasi oleh laki-laki. Sementara ketika terjadinya bencana yang banyak menjadi korban bencana adalah perempuan dan anak-anak.</p> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p>a. Faktor Kesenjangan (<i>Minimnya kaum perempuan mendapatkan sosialisasi dan pelatihan tentang kesiapsiagaan bencana di daerah rawan bencana</i>)</p> <p>b. Penyebab Internal(<i>Belum maksimal dalam meminta peserta sosialisasi dan pelatihan gladi kesiapsiagaan bencana kepada Pemerintah Nagari yang daerahnya termasuk daerah rawan bencana</i>)</p> <p>c. Penyebab Eksternal (<i>Kecendrungan dimasyarakat yang mengikuti kegiatan terkait dgn kesiapsiagaan bencana hanya diikuti oleh laki-laki</i>)</p>				
RENCANA AKSI	<b>Komponen/ Aktifitas 1</b> (Mengikutsertakan perempuan dalam sosialisasi dan pelatihan gladi kesiapsiagaan bencana)				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Tujuan</b></td> <td>Meminta Pemerintah Nagari yang daerahnya termasuk daerah rawan bencana untuk memprioritaskan atau setidaknya sama banyaknya peserta laki-laki dan perempuan dalam mengikuti sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana.</td> </tr> <tr> <td><b>Alokasi Anggaran</b></td> <td>100.000.000,- (Seratus juta rupiah)</td> </tr> </table>	<b>Tujuan</b>	Meminta Pemerintah Nagari yang daerahnya termasuk daerah rawan bencana untuk memprioritaskan atau setidaknya sama banyaknya peserta laki-laki dan perempuan dalam mengikuti sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana.	<b>Alokasi Anggaran</b>	100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
	<b>Tujuan</b>	Meminta Pemerintah Nagari yang daerahnya termasuk daerah rawan bencana untuk memprioritaskan atau setidaknya sama banyaknya peserta laki-laki dan perempuan dalam mengikuti sosialisasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana.			
	<b>Alokasi Anggaran</b>	100.000.000,- (Seratus juta rupiah)			
	(Diambil dari GAP langkah 7)				
<b>Komponen/ aktifitas 2</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Tujuan</b></td> <td>Di isi dengan informasi yang mendukung pencapaian hasil kegiatan yang responsif Gender</td> </tr> <tr> <td><b>Alokasi Anggaran</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Tujuan</b>	Di isi dengan informasi yang mendukung pencapaian hasil kegiatan yang responsif Gender	<b>Alokasi Anggaran</b>	
<b>Tujuan</b>	Di isi dengan informasi yang mendukung pencapaian hasil kegiatan yang responsif Gender				
<b>Alokasi Anggaran</b>					
<b>Total anggaran</b>	100.000.000,- (Seratus juta rupiah)				

**CAPAIAN PROGRAM**  
(Mengurangi resiko bencana bagi kelompok rentan bencana)

- output dan dampak kegiatan yang memperlihatkan perbaikan kearah XKG (Meningkatnya jumlah peserta pelatihan dan gladi kesiapsiagaan bencana dari kaum perempuan)

Sungai Daroh, Maret 2020  
Kepala Pelaksana, *m*



*[Signature]*  
**ELDISON, ST**  
NIP. 19780712 200501 1 012

TIM VERIFIKASI			
Inspektur	KEPALA BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<b>KANDAM, S. SpS</b> NIP. 196706071991031004	<b>PARYANTO, S. SpS, M.T</b> NIP. 196906001989021001	<b>Drs. ANDY SUMANTO, CfrA</b> NIP. 196812201990091001	<b>BOBBY PRIZA, S. STP, M.SI</b> NIP. 196105122006121002

18

OPD : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga  
 PROGRAM : Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAH		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina = 33 Cabang	Kurangnya Pembinaan Cabang Olahraga	Kelembatan anggaran	Rendahnya Tingkat Kesadaran masyarakat khususnya perempuan dalam Berolahraga	Menumbuhkan Budaya Olahraga dan Prestasi dengan menambah jumlah cabang olahraga yang dibina (yang responsive gender) sehingga meningkatkan jumlah Atlet perempuan yang berprestasi di event - event daerah dan nasional	Peningkatan sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Bantuan Yang Dialokasikan	Output Cabang Olahraga yang Dipertandingkan
Kegiatan : Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi = 15 Cabang  Peningkat Dalam Porprov = 15 (event 2 tahunan)	Kurangnya Minat Masyarakat Khususnya Perempuan dalam Olahraga	Pelaksanaan kegiatan Olahraga belum responsive gender  Kurangnya Cabang Olahraga yang bisa di ikuti perempuan	Dukungan peralatan dan perlengkapan Olahraga yang kurang  Kurangnya Dukungan Masyarakat dan Dunia Usaha Terhadap Pengembangan Olahraga dan Hanya Bergantung Pada Pemerintah		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Olahraga Daerah  Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Olahraga Daerah	Jumlah Klub/kelompok/ Organisasi Olahraga yang dibina  Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Outcome : Jumlah Klub/ Atlet yang Mengikuti Kompetisi
Tujuan : Menumbuhkan Budaya Olahraga dan Prestasi						Penyediaan Bantuan Sarana dan Prasarana Olahraga  Pembinaan Berkelanjutan Klub/Pekumpulan Organisasi Di Bidang Olahraga	Peningkatan Jumlah Atlet Yang Dibina	



**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD : **DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
TAHUN ANGGARAN : **2021**

PROGRAM : Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga

KODE PROGRAM : 2.13 . 2.16.01 . 21

KEGIATAN : Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

HASIL/OUTPUT : - Menumbuhkan Budaya Olahraga dan Prestasi dengan menambah jumlah cabang olahraga yang dibina (yang responsive gender) sehingga meningkatkan jumlah Atlet perempuan yang berprestasi di event – event daerah dan nasional

ANALISIS SITUASI

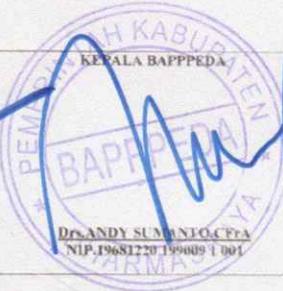
1. **Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).**
  - Jumlah Cabang Olahraga yang Dibina = 33 Cabor
  - Jumlah Cabang Olahraga yang Berprestasi = 15 Cabor
  - Peringkat Dalam Porprov = 15 (event 2 tahunan)
2. **Isu dan Faktor Kesenjangan Gender**
  - a. Kurangnya Minat Masyarakat Khususnya kaum Perempuan dalam Bidang Olahraga
  - b. Keterbatasan Anggaran dan Kurangnya Pembinaan cabang olahraga yang Bisa dilakukan Oleh perempuan
  - c. Kurangnya Dukungan Masyarakat dan Dunia Usaha Terhadap Perkembangan Olahraga dan Hanya bergantung Pada Pemerintah

RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Tujuan	- Peningkatan dan Kapasitas Kompetensi Olahraga Daerah - Pembinaan Berkelanjutan Klub/ Perkumpulan/ Organisasi di Bidang Olahraga
		Alokasi Anggaran	Rp. 474.773.200,-
	Komponen/ aktifitas 2	Tujuan	- Menumbuhkan Budaya Olahraga dan Prestasi dengan menambah jumlah cabang olahraga yang dibina (yang responsive gender) sehingga meningkatkan jumlah Atlet perempuan yang berprestasi di event – event daerah dan nasional
		Alokasi Anggaran	Rp. 474.773.200,-
	Total anggaran		Rp. 474.773.200,-

CAPAIAN PROGRAM : Jumlah Cabang Olahraga yang dipertandingkan dapat meningkatkan Prestasi dibidang olahraga ditingkat Provinsi maupun Nasional



TIM VERIFIKASI

 <p>INSPEKTUR</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>KANDAM.S.Sos NIP.19670607 199103 1 064</p>	 <p>KEPALA BKD</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PARYANTO.Sos.MT NIP.19690609 198902 1 001</p>	 <p>KEPALA BAPPEDA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Drs.ANDY SUMNIO.C.Pra NIP.19681220 199009 1 001</p>	 <p>KEPALA DISBUDPA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>DINAS SOSIAL PEMBUDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUKUNG DAN KELUARGA BERENCANA</p> <p>DHARMASRAYA NIP. X 19681220 199009 1 002</p>
---	---	--	---

## GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TAHUN ANGGARAN : 2021

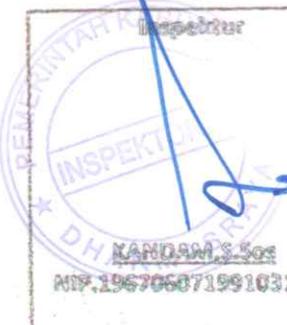
PROGRAM	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
KODE PROGRAM	2.08.2.08.
KEGIATAN	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
HASIL/OUTPUT	Tersedianya bangunan gedung kantor yang representatif
ANALISA SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender); Kondisi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini memiliki luas tanah 2.170 M2 dan luas bangunan ± 200 M2, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 ruang pelayanan</li> <li>- 3 ruang bidang</li> <li>- 1 ruang sekretariat</li> <li>- 1 ruang sekretaris</li> <li>- 1 ruang kepala</li> <li>- 1 ruang arsip</li> <li>- 1 ruang informasi</li> <li>- WC</li> </ul> <p>Bangunan ini diampati oleh 25 orang ASN, 2 orang Non ASN dan 23 orang THL. Saat ini bangunan kantor terasa terlalu sempit, hal ini membuat aparatur dan masyarakat kurang aman dan nyamannya dalam bekerja dan berurusan.</p> <p>Jumlah Penduduk tahun 2018 = 215.341 Org yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lk-k = 108.309 = 50,76 %</li> <li>- Pr = 108.032 = 49,24 %</li> </ul> <p>Usia 5-8 th:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lk-k = 4.261 = 3,90 %</li> <li>- Pr = 4.144 = 3,91 %</li> </ul> <p>Usia 7-12 th:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lk-k = 13.841 = 12,66 %</li> <li>- Pr = 12.850 = 12,12 %</li> </ul> <p>Usia 13-15 th:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lk-k = 8.468 = 5,92 %</li> <li>- Pr = 8.099 = 5,76 %</li> </ul> <p>Usia 15-59 th:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lk-k = 88.471 = 63,55 %</li> <li>- Pr = 68.484 = 64,59 %</li> </ul> <p>Usia 60 th:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lk-k = 738 = 0,67 %</li> <li>- Pr = 638 = 0,60 %</li> </ul> <p>Penyandang cacat ( disabilitas ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lk-k = 49 = 0,04 %</li> <li>- Pr = 38 = 0,04 %</li> </ul>
	<p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p>Akses:</p> <p>Partisipasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketidakyamanan di kantor membuat pegawai kurang maksimal dalam bekerja sebagai aparat pelayanan publik.</li> <li>- Masyarakat yang kurang nyaman dalam berurusan</li> </ul> <p>Control:</p> <p>Manfaat:</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desain interior kantor yang kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebutuhan kantor</li> <li>- Kurangnya pemahaman dari ASN tentang Pengarusutamaan gender</li> </ul> <p>c. Penyebab Eksternal</p>

SAPUAN PROGRAM	1. Tolak Ukur Jumlah Dana Rp. 300.000.000.-					
	2. Indikator dan Target Kinerja <u>Input:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengusutan dana untuk rehab gedung kantor, penataan interior dan usulan penghapusan aset sebesar Rp. 300.000.000.-</li> </ul> <u>Output:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tertualisasinya bangunan gedung kantor Dinas Cakil yang Responsif Gender</li> </ul> <u>Outcome:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aparatur dan Masyarakat merasa aman dan nyaman dalam bekerja dan berurusan</li> </ul>					
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp 350.000.000,- ( Tiga ratus lima puluh juta rupiah )					
RENCANA AMBI	Kegiatan 1	Mengajukan pengusutan anggaran sebesar Rp. 300.000.000.- untuk Rehab gedung kantor, dan penataan interior gedung kantor diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ruang Pelayanan Disabilitas</li> <li>ruang ibu menyusui</li> <li>Mushalla</li> <li>Taman Bermain</li> <li>Gudang</li> </ul>				
		<table border="1"> <tr> <td>Masukan</td> <td>Rp 300.000.000.-</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td>Rehabilitasi Gedung Kantor</td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td>Tersedianya bangunan gedung kantor yang representatif</td> </tr> </table>	Masukan	Rp 300.000.000.-	Keluaran	Rehabilitasi Gedung Kantor
Masukan	Rp 300.000.000.-					
Keluaran	Rehabilitasi Gedung Kantor					
Hasil	Tersedianya bangunan gedung kantor yang representatif					

Pulau Punjung, Maret 2020  
 Kepala  
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
 Kabupaten Dharmasraya

  
**ADDI AMRI, SE**  
 Pembina TK.I  
 NIP.19611231 198612 1 002

VERIFIKASI KEGIATAN

 Inspektur <b>KANDAM, S. Sof</b> NIP.196706071991031004	 KEPALA BKD <b>BARYANTO, S. Sof, M.T</b> NIP.196904081982021001	 Kepala Bappeda <b>Drs. ANDY SUMANTO, Cka</b> NIP.196812011990091001	 Kepala Dinas Sosial, P3A, <b>BOENI, S. Sof, M.Si</b> NIP.198212011982121002
---	---	---	--

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

DPO : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya

PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program/Proyek/Unit	Data Pemula transmen	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Relevansi/ Tolak	Neraca Awal	Basis Data (Baru-Jika)	Indikator Gender
<p><b>Program :</b> Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <p><b>Kegiatan:</b> Peningkatan Ruang Beraktivitas Gedung Kantor</p> <p><b>Tujuan :</b> Terwujudnya Gedung Kantor yang Representatif</p>	<p>Kondisi kantor Jinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil saat ini memiliki luas tanah 2.170 M2 dan luas bangunan 200 M2 yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 ruang pelayanan</li> <li>- 3 ruang bidang</li> <li>- 1 ruang sekretariat</li> <li>- 1 ruang sekretaris</li> <li>- 1 ruang kepala</li> <li>- 1 ruang antri</li> <li>- 1 ruang informasi</li> <li>- WC</li> </ul> <p>Bangunan ini ditempati oleh 25 orang ASN, 2 orang Non ASN dan 23 orang TH.</p> <p>Saat ini bangunan kantor terasa terlalu sempit, hal ini membuat aparatur dan masyarakat kurang aman dan nyamannya dalam bekerja dan berurusan.</p> <p>Jumlah Penduduk tahun 2019 = 215.341 Org yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lk - Ik = 109.309 = 50,76 %</li> <li>- Pr = 106.032 = 49,24 %</li> </ul> <p>Usia 5-6 th:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lk - Ik = 4.261 = 3,90 %</li> <li>- Pr = 4.144 = 3,91 %</li> </ul>	<p><b>Akansa:</b></p> <p><b>Permasalahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketersediaan di kantor membuat pegawai kurang maksimal dalam bekerja sebagai aparat pelayanan publik.</li> <li>- Masyarakat yang kurang nyaman dalam berurusan.</li> </ul> <p><b>Control:</b></p> <p><b>Manfaat:</b></p>	<p>Desain interior kantor yang kurang tepat dan kurang sesuai dengan kebutuhan kantor</p> <p>Kurangnya pemahaman dari ASN tentang Pengarusutamaan gender</p>		<p>Terwujudnya bangunan gedung kantor yang representatif</p>	<p>Mengajukan pengumuman anggaran sebesar: Rp. 300.000.000,- untuk Rehab gedung kantor, penataan interior gedung kantor diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang Pelayanan</li> <li>- Disabilitas</li> <li>- ruang ibu menyusui</li> <li>- Mushalla</li> <li>- Taman bermain</li> <li>- Gudang</li> </ul>	<p>Luas Tanah 2.170 M2</p> <p>Luas bangunan 200M2</p> <p>Jumlah ruangan: 10 ruangan</p> <p>Jumlah Penduduk tahun 2019 = 215.341 org yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lk - Ik = 109.309 = 50,76 %</li> <li>- Pr = 106.032 = 49,24 %</li> </ul> <p>Usia 5-6 th:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lk - Ik = 4.261 = 3,90 %</li> <li>- Pr = 4.144 = 3,91 %</li> </ul> <p>Usia 7-12 th:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lk - Ik = 13.841 = 12,66 %</li> <li>- Pr = 12.650 = 12,12 %</li> </ul> <p>Usia 13-15 th:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lk - Ik = 6.468 = 5,92 %</li> <li>- Pr = 6.099 = 5,75 %</li> </ul> <p>Usia 15-59 th:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lk - Ik = 69.471 = 63,55 %</li> <li>- Pr = 68.404 = 64,59 %</li> </ul> <p>Usia 60 th:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lk - Ik = 736 = 0,67 %</li> <li>- Pr = 638 = 0,60 %</li> </ul> <p>Penyandang cacat (disabilitas):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lk - Ik = 49 = 0,04 %</li> <li>- Pr = 38 = 0,04 %</li> </ul>	<p><b>Input :</b> Penggunaan dana untuk rehab gedung kantor, penataan interior dan sebesar Rp.300.000.000,-</p> <p><b>Output:</b> Terwujudnya bangunan gedung kantor Dinas Capi yang responsif gender</p> <p><b>Outcome :</b> Aparatur dan Masyarakat aman dan nyaman dalam bekerja dan berurusan</p>

Lampiran 1	Lampiran 2	Lampiran 3	Lampiran 4	Lampiran 5	Lampiran 6	Lampiran 7	Lampiran 8	Lampiran 9
Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Kategori 5	Kategori 6	Kategori 7	Kategori 8	Kategori 9
Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3	Kategori 4	Kategori 5	Kategori 6	Kategori 7	Kategori 8	Kategori 9
	Usia 7-12 th : - Lk-Rk = 13,641 = 12,65 % - P = 12,850 = 12,12 % Usia 13-15 th : - Lk-Rk = 6,488 = 5,92 % - P = 6,089 = 5,75 % Usia 15-59 th : - Lk-Rk = 69,471 = 63,55 % - P = 68,484 = 64,33 % Usia 60 th : - Lk-Rk = 736 = 0,67 % - P = 636 = 0,60 % Peryandeng cacat ( disabilitas ) : - Lk-Rk = 49 = 0,04 % - P = 38 = 0,04 %							

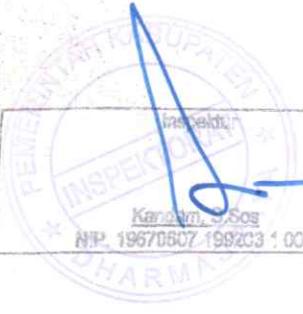
Pulaun Perunggu, Maret 2020

Rechts

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Dharmasraya

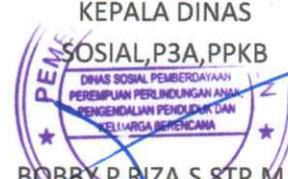


<p>Inspektur Kandem Sos NIP. 19670607 198203 1 004</p>	<p>Tm Verifikasi Pangkat NIP. 196508 19821 0</p>	<p>Ketua Bappeda Drs. H. Sunanto, CFA NIP. 1961220 199009 1 301</p>	<p>Ketua Dinas SOS PEREMBAH PERLINDUNGAN ANAK PEREMBAH PERLINDUNGAN ANAK KELOMPOK BERGAMUNG NIP. 1960072 19821 0</p>
--	--	---	--



<b>PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)</b>										
<b>SKPD</b> <b>TAHUN ANGGARAN</b>	: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik : 2021									
<b>PROGRAM</b>	Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat									
<b>KODE PROGRAM</b>	1.05.4.01.16.21									
<b>KEGIATAN</b>	Pembinaan Administrasi Partai Politik									
<b>HASIL/OUTPUT</b>	Meningkatnya pemahaman tentang administrasi Partai Politik									
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</b> Data pada tahun 2019 yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 33 Orang yang terdiri dari Pengurus Partai Politik adapun Jumlah keterlibatan antara laki-laki lebih banyak dibanding dengan perempuan yaitu 24 Laki-laki dan 9 orang Perempuan</p> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p><b>a. Faktor Kesenjangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Akses untuk mendapatkan pengetahuan tentang pembinaan administrasi dalam pengajuan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik bagi pengurus partai politik.</li> <li>➤ Partisipasi Keikutsertaan perempuan dalam mengikuti kegiatan ini lebih sedikit dikarenakan kurangnya keinginan bahwa keikutsertaan laki-laki sudah mewakili yang perempuan.</li> <li>➤ Manfaat Anggapan bahwa kegiatan ini hanya bermanfaat bagi pengurus partai yang dominan laki-laki.</li> </ul> <p><b>b. Penyebab Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Keterbatasan Perempuan dalam ikut serta sebagai pengurus partai politik</li> </ul> <p><b>c. Penyebab Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Anggapan di masyarakat bahwa keorganisasian wanita didalam partai politik tidaklah memiliki peran yang banyak</li> </ul>									
<b>RENCANA AKSI</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="4" style="width: 15%;"><b>Komponen/ Aktifitas 1</b></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 75%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengundang Pengurus Partai Politik yang Responsive Gender</li> <li>➤ Memfasilitasi pengurus parpol dalam rangka pembinaan administrasi keuangan sehingga pengurus parpol mampu mengelola dana bantuan parpol dengan benar sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td><b>Tujuan</b></td> <td>Meningkatnya pemahaman tentang Administrasi Partai Politik</td> </tr> <tr> <td><b>Alokasi Anggaran</b></td> <td>Rp. 73.168.500,-</td> </tr> <tr> <td><b>Total anggaran</b></td> <td>Rp. 73.168.500,-</td> </tr> </table>	<b>Komponen/ Aktifitas 1</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengundang Pengurus Partai Politik yang Responsive Gender</li> <li>➤ Memfasilitasi pengurus parpol dalam rangka pembinaan administrasi keuangan sehingga pengurus parpol mampu mengelola dana bantuan parpol dengan benar sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku</li> </ul>	<b>Tujuan</b>	Meningkatnya pemahaman tentang Administrasi Partai Politik	<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 73.168.500,-	<b>Total anggaran</b>	Rp. 73.168.500,-
<b>Komponen/ Aktifitas 1</b>			<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengundang Pengurus Partai Politik yang Responsive Gender</li> <li>➤ Memfasilitasi pengurus parpol dalam rangka pembinaan administrasi keuangan sehingga pengurus parpol mampu mengelola dana bantuan parpol dengan benar sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku</li> </ul>							
	<b>Tujuan</b>		Meningkatnya pemahaman tentang Administrasi Partai Politik							
	<b>Alokasi Anggaran</b>		Rp. 73.168.500,-							
	<b>Total anggaran</b>	Rp. 73.168.500,-								
<b>CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)</b>	Input. Rp. 73.168.500,-									

Pulau Pinang, 24 Maret 2020  
Kepala,  
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Dharmasraya  
ASRIS, Pd, MM  
NIP. 19691225 199109 1 001

<b>VERIFIKASI KEGIATAN</b>			
 <b>INSPEKTUR</b>  <b>KANDAM, S.Sos</b> NIP.196706071991031004	 <b>KEPALA BKD</b>  <b>PARIYANTO, S.Sos, M.T</b> NIP.196906091989021001	 <b>KEPALA BAPPEDA</b>  <b>DRS. ANDY SUMANTO, CvrA</b> NIP.196812201990091001	 <b>KEPALA DINAS SOSIAL, P3A, PPKB</b> <small>DINAS SOSIAL PEMBENDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KELUARGA BERENCANA</small>  <b>BOBBY P RIZA, S.STP, M.Si</b> NIP.198205212000121002

## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

### SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN DHARMASRAYA

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program : Peningkatan Pendekatan Politik Masyarakat	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
<p><b>kegiatan :</b> Pembinaan Administrasi Partai Politik</p> <p><b>tujuan :</b> Meningkatnya pemahaman tentang Administrasi Partai Politik</p>	<p>➤ Data pada tahun 2019 yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 33 Orang yang terdiri dari Pengurus Partai Politik adapun Jumlah keterlibatan antara laki-laki lebih banyak dibanding dengan perempuan, yaitu 24 laki-laki dan 9 orang perempuan.</p>	<p>➤ Akses untuk mendapatkan pengetahuan tentang pembinaan administrasi dalam pengajuan dan laporan pergangguawan ban bantuan keuangan partai politik pengurus partai</p> <p>➤ Partisipasi Keikutsertaan perempuan dalam mengikuti kegiatan ini lebih sedikit dikarenakan kurangnya keinginan bahwa keikutsertaan laki-laki sudah mewakili</p>	<p>Keterbatasan perempuan dalam ikut serta sebagai pengurus parpol</p>	<p>Anggapan di masyarakat bahwa keorganisasian wanita didalam partai politik tidaklah memiliki peran banyak.</p>	<p>1. Menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan terpenuhi dalam berkegiatan. 2. Meningkatkan pemahamannya tentang administrasi partai politik</p>	<p>➤ Mengundang Pengurus Partai Politik yang responsive gender ➤ Memfasilitasi pengurus Parpol dalam rangka pembinaan administrasi keuangan sehingga pengurus parpol mampu mengelola dana bantuan parpol dengan benar sesuai aturan dan peraturan yang berlaku</p>	<p>➤ Jumlah Pengurus Partai Politik</p>	<p>Input : Output : Meningkatnya pemahaman tentang administrasi Partai Politik</p> <p>Outcome: ➤ Meningkatnya pendidikan Politik masyarakat</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		<p>➤ Yang perempuan. Manfaat Anggapan bahwa hanya bermanfaat bagi pengurus partai yang dominan laki-laki</p>							


  
 Pulau Pinang, 24  
 Kepala  
 ASRI, S.Pd  
 Nip. 19691225 19

## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya

PROGRAM : Perbaikan Gizi Masyarakat

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	ISU GENDER Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	PENGUKURAN HASIL	Indikator
<b>Program :</b> Perbaikan gizi masyarakat  <b>Kegiatan</b> Posyandu Balita  <b>Tujuan :</b> Meningkatnya Gizi masyarakat khususnya bayi dan balita	Jumlah puskesmas di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 14 Puskesmas, dengan 43 Puskesmas Pembantu, Poskesri 99 dan 243 Posyandu yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.	<b>Akses:</b> Jika dilihat dari akses, akses pelayanan kesehatan telah memadai, hal ini dapat dilihat dari jumlah sarana pelayanan kesehatan yang telah tersebar di seluruh Kecamatan Kabupaten Dharmasraya baik berbentuk Puskesmas, Pustu, Poskesri Klinik, dan Posyandu. Serta sudah ada Pos Gizi di beberapa Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas kesehatan belum melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap gizi bayi dan balita berdasarkan PPRG sehingga sebagian besar pendampingan hanya dilakukan pada ibu.</li> <li>- Dinas Kesehatan belum membuat Anggaran berdasarkan PPRG berupa kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dikhususkan pada partisipasi ayah dalam tumbuh kembang anak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Status ekonomi masyarakat mempengaruhi makanan yang diberikan kepada balita</li> <li>- Tingkat pengetahuan masyarakat masih kurang tentang peringatannya</li> <li>- Makanan gizi pada bayi dan balita serta resiko atau bahaya kurangnya gizi pada bayi dan balita.</li> <li>- Masih ada daerah terpencil dan sulit untuk dijangkau oleh tenaga kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- melakukan kegiatan-kegiatan yang akan meningkatkan peran serta ayah dalam pemantauan dan pengawasan tumbuh kembang anaknya dan kegiatan yang meningkatkan kepedulian orang tua terhadap pemantauan gizi anak-anaknya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi dengan melakukan penganggaran untuk sosialisasi dan penyuluhan khusus untuk ayah.</li> <li>- Revitalisasi Nagari Sadar Gizi dengan Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya meningkatkan status gizi pada bayi dan balita serta bahaya kurang gizi pada anak dan balita dengan cara pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat.</li> <li>- Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP) Anemia gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY) kurang vitamin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penduduk Tahun 2019 → 247.579</li> <li>- Laki-laki → 128.401</li> <li>- Perempuan → 119.178</li> <li>- Jumlah Puskesmas → 14 Puskesmas</li> <li>- Rumah sakit → 2</li> <li>- Pustu → 43</li> <li>- Posyandu → 243</li> </ul> Jika dilihat dari data yang ada Balita gizi buruk : tahun 2018 berjumlah laki-laki 6 orang, perempuan 5 orang tahun 2019 berjumlah laki-laki 7 orang, perempuan 15 orang Balita BGM tahun 2018 laki-laki 84 orang perempuan 92 orang sebanyak 176(1,1%) tahun 2019 laki-laki 41 orang perempuan 95 orang sebanyak 136 (0,8%) Sedangkan untuk balita	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Output Perbaikan gizi masyarakat mempunyai 100%</li> <li>- Outcome Kepedulian terhadap perstatus gizi di kembang an</li> </ul>	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah	
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	ISU GENDER Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator K	
	<p>Balita gizi buruk : tahun 2018 berjumlah laki-laki 6 orang, perempuan 5 orang tahun 2019 berjumlah laki-laki 7 orang, perempuan 15 orang Balita BGM tahun 2018 laki-laki 84 orang perempuan 92 orang sebanyak 176(1,1%) tahun 2019 laki-laki 41 orang Perempuan 95 orang sebanyak 136 (0,8%) Sedangkan untuk balita stunting yang dipengaruhi oleh status gizi bayi dan balita pada tahun 2018 sebanyak 4.198 (20,4%) Menurun di tahun 2019 sebanyak 2.067 (16,6%)</p>	<p>ayah yang melakukan kontrol terhadap tumbuh kembang anaknya. Hanya sebagian kecil ayah yang mengantarkan anaknya ke Posyandu</p> <p><b>Control:</b> - Rendahnya pengawasan dan pendampingan pemberian PMT terhadap keluarga yang memiliki bayi dan balita BGM atau hasil penimbangan tidak meningkat 3 kali berturut-turut. - Kontrol petugas kesehatan terhadap bayi yang ada di wilayah kerja masing-masing puskesmas masih kurang, sehingga bayi dan balita yang tidak datang ke posyandu masih ada yang tidak dilakukan sweeping oleh petugas kesehatan</p> <p><b>Manfaat :</b> - Orang tua yang memiliki anak dengan pengukuran BGM atau tidak meningkat selama 3 kali berturut dapat</p>				<p>KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN</p>	<p>A dan kurang zat mikro lainnya pada bayi dan balita.</p>	<p>stunting yang dipengaruhi oleh status gizi bayi dan balita pada tahun 2018 sebanyak 4.198 (20,4%) Menurun di tahun 2019 sebanyak 2.067 (16,6%)</p>	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan secara mandiri memberikan PMT kepada bayi dan balita Meningkatnya partisipasi ayah terhadap tumbuh kembang anaknya	ISU GENDER Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator K



Dharmasraya,   
 Kecamatan Dharmasraya,   
 Kabupaten Dharmasraya,   
 Jawa Barat 40132  
 Telp. (0264) 206 199903  
 Fax. (0264) 206 199903  
 Email: dharmasraya@kab.go.id  
 Website: www.kab.go.id  
 Maret 2019

## GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

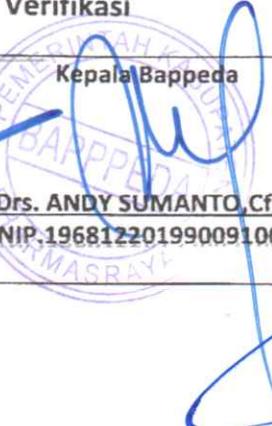
**SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya**  
**TAHUN ANGGARAN: 2021**

<b>PROGRAM</b>	Perbaiki Gizi Masyarakat
<b>KODE PROGRAM</b>	<b>1.02. 1.02.1. 20</b>
<b>ANALISA SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</b></p> <p>Jumlah puskesmas di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 14 Puskesmas, dengan 43 Puskesmas Pembantu, Poskesri 99 dan 243 Posyandu yang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.</p> <p>Status gizi kurang pada bayi dan balita dapat dilihat dari kontrol menggunakan buku KMS apabila KMS menunjukkan garis pertumbuhan pada bawah garis merah (BGM) yang dibandingkan dengan BB/TB maka bayi/balita tersebut dapat diindikasikan mengalami kekurangan Gizi, hal ini dapat deteksi dengan pelaksanaan kegiatan posyandu balita di setiap wilayah kerja Puskesmas</p> <p>Jika dilihat dari data yang ada</p> <p>Balita gizi buruk :</p> <p>tahun 2018 berjumlah laki-laki 6 orang, perempuan 5 orang          tahun 2019 berjumlah laki-laki 7 orang, perempuan 15 orang</p> <p>Balita BGM tahun 2018 laki-laki 84 orang perempuan 92 orang sebanyak 176(1,1%) tahun 2019 laki-laki 41 orang          Perempuan 95 orang sebanyak 136 (0.8%)</p> <p>Sedangkan untuk balita stunting yang dipengaruhi oleh status gizi bayi dan balita pada tahun 2018 sebanyak 4.198 (20,4%)          Menurun di tahun 2019 sebanyak 2.067 (16,6%)</p> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p><b>a. Faktor Kesenjangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika dilihat dari akses tidak ada kesenjangan, akses pelayanan kesehatan telah memadai, hal ini dapat dilihat dari jumlah sarana pelayanan kesehatan yang telah tersebar diseluruh kecamatan kabupaten dharmasraya baik berbentuk puskesmas, pustu, poskesri, klinik dan posyandu serta sudah ada pos gizi di beberapa kecamatan.</li> <li>- Masih ada masyarakat yang tidak peduli terhadap gizi anak dan balita serta masih ada masyarakat yang menganggap makanan bergizi itu mahal khususnya masyarakat kurang mampu dan daerah sulit</li> <li>- Sebagian besar yang melakukan kontrol tumbuh kembang anaknya adalah ibu, hanya sebagian kecil ayah yang melakukan kontrol terhadap tumbuh kembang anaknya.</li> <li>- Hanya sebagian kecil ayah yang mengantarkan anaknya ke Posyandu</li> <li>- Rendahnya pengawasan dan pendampingan pemberian PMT terhadap keluarga yang memiliki bayi dan balita BGM atau hasil penimbangan tidak meningkat 3 kali berturut-turut.</li> <li>- Kontrol petugas kesehatan terhadap bayi yang ada di wilayah kerja masing-masing puskesmas masih kurang, sehingga bayi dan balita yang tidak datang keposyandu masih ada yang tidak dilakukan sweeping oleh petugas kesehatan.</li> </ul>

	<p><b>b. Penyebab Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas kesehatan belum melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap gizi bayi dan balita berdasarkan PPRG sehingga sebagian besar pendampingan hanya dilakukan pada ibu.</li> <li>- Dinas Kesehatan belum membuat Anggaran berdasarkan PPRG berupa kegiatan penyuluhan dan sosialisasi yang dikhususkan pada partisipasi ayah dalam tumbuh kembang anak</li> </ul> <p><b>c. Penyebab Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status ekonomi masyarakat mempengaruhi makanan yang diberikan kepada balita</li> <li>- Tingkat pengetahuan masyarakat masih kurang tentang pentingnya makanan gizi pada bayi dan balita serta resiko atau bahaya kurangnya gizi pada bayi dan balita.</li> <li>- Masih ada daerah terpencil dan sulit untuk dijangkau oleh tenaga kesehatan</li> </ul>																											
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<p><b>1. Tolak Ukur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cakupan Nagari Sadar Gizi Aktif</li> </ul> <p><b>2. Indikator dan Target Kinerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Nagari sadar Gizi Aktif :39 Nagari</li> <li>- Jumlah Puskesmas yang melakukan pemberdayaan masyarakat diwilayah puskesmas masing-masing : 14 Puskesmas</li> </ul>																											
<b>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</b>	<b>Rp. 1.190.200.000</b>																											
<b>RENCANA AKSI</b>	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4"><b>Kegiatan 1</b></td> <td colspan="2"><b>Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi</b></td> </tr> <tr> <td>Masukan</td> <td>Rp.255.000.000</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td>Jumlah keluarga sadar gizi yang diberdayakan</td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td>terbentuknya Nagari sadar gizi</td> </tr> <tr> <td rowspan="4"><b>Kegiatan 2</b></td> <td colspan="2"><b>Revitalisasi Nagari Sadar Gizi</b></td> </tr> <tr> <td>Masukan</td> <td>Rp. 85.200.000</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td>Revitalisasi Nagari Sadar Gizi</td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td>Jumlah Nagari sadar gizi yang direvitalisasi</td> </tr> <tr> <td rowspan="4"><b>Kegiatan 3</b></td> <td colspan="2"><b>Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kurang zat mikro lainnya</b></td> </tr> <tr> <td>Masukan</td> <td>Rp.850.000.000</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td>pemberdayaan kelompok masyarakat peningkatan kualitas kesehatan pada balita dan anak sekolah, dalam rangka penanggulangan KEP, AGB , GAKY DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA</td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td>Meningkatnya prevalensi status gizi baik pada balita, anak sekolah dan bumil</td> </tr> </table>	<b>Kegiatan 1</b>	<b>Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi</b>		Masukan	Rp.255.000.000	Keluaran	Jumlah keluarga sadar gizi yang diberdayakan	Hasil	terbentuknya Nagari sadar gizi	<b>Kegiatan 2</b>	<b>Revitalisasi Nagari Sadar Gizi</b>		Masukan	Rp. 85.200.000	Keluaran	Revitalisasi Nagari Sadar Gizi	Hasil	Jumlah Nagari sadar gizi yang direvitalisasi	<b>Kegiatan 3</b>	<b>Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kurang zat mikro lainnya</b>		Masukan	Rp.850.000.000	Keluaran	pemberdayaan kelompok masyarakat peningkatan kualitas kesehatan pada balita dan anak sekolah, dalam rangka penanggulangan KEP, AGB , GAKY DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA	Hasil	Meningkatnya prevalensi status gizi baik pada balita, anak sekolah dan bumil
<b>Kegiatan 1</b>	<b>Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi</b>																											
	Masukan		Rp.255.000.000																									
	Keluaran		Jumlah keluarga sadar gizi yang diberdayakan																									
	Hasil	terbentuknya Nagari sadar gizi																										
<b>Kegiatan 2</b>	<b>Revitalisasi Nagari Sadar Gizi</b>																											
	Masukan	Rp. 85.200.000																										
	Keluaran	Revitalisasi Nagari Sadar Gizi																										
	Hasil	Jumlah Nagari sadar gizi yang direvitalisasi																										
<b>Kegiatan 3</b>	<b>Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kurang zat mikro lainnya</b>																											
	Masukan	Rp.850.000.000																										
	Keluaran	pemberdayaan kelompok masyarakat peningkatan kualitas kesehatan pada balita dan anak sekolah, dalam rangka penanggulangan KEP, AGB , GAKY DAN KEKURANGAN ZAT GIZI MIKRO LAINNYA																										
	Hasil	Meningkatnya prevalensi status gizi baik pada balita, anak sekolah dan bumil																										



Tim Verifikasi

<p><b>Inspektur</b></p>  <p><b>KANDAM, S.Sos</b> NIP.196706071991031004</p>	<p><b>KEPALA BKD</b></p>  <p><b>PARYANTO, S.Sos, M.T</b> NIP.196906091989021001</p>	<p><b>Kepala Bappeda</b></p>  <p><b>Drs. ANDY SUMANTO, CfrA</b> NIP.196812201990091001</p>	<p><b>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB</b></p>  <p><b>BOBBY P RIZA, S.STP, M.Si</b> NIP.198205212000121002</p>
--	--	--	---

**MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

OPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya

PROGRAM : Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>Nama Kebijakan/Program/Kegiatan</b>	<b>Data Pembuka Wawasan</b>	<b>Faktor Kesenjangan</b>	<b>Isu gender</b>	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>	<b>Reformulasi Tujuan</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Basis Data (Base-Line)</b>	<b>Monitoring Indikator Gender</b>
<b>Program :</b> Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Keterbukaan untuk memperoleh informasi semakin hari mengalami desakan yang signifikan, seiring dengan tuntutan perkembangan era globalisasi saat ini. Sehingga disatukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pada dasarnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi publik yang dikucilkan. Hal ini sejalan dengan satu pilar informasi, yaitu Transparansi menuju <i>Clean Governemnt</i> dan <i>Good Governance</i> . <b>Tujuan :</b> Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara antara masyarakat dengan masyarakat dengan masyarakat dan pemerintah.	<b>Akses:</b> - Tidak ada kesulitan akses <b>Partisipasi:</b> - Kurangnya Keterwakilan Perempuan dalam Kelompok Informasi Masyarakat. <b>Kontrol:</b> - Tidak ada kesulitan kontrol <b>Mantfaat :</b> - Perempuan tidak mengetahui/ tidak responsive terhadap informasi terutama dalam perkembangan Pembangunan.	- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama perempuan dalam pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).	- Kurangnya keinginan Masyarakat Terutama Perempuan dalam ikut berpartisipasi dalam Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	- Tersedianya ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pembentukan kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	- Mengajukan Pengusulan anggaran Sebesar Rp. 80.000.000 - Mengkhususkan Perempuatan dalam Keanggotaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Keterbukaan untuk memperoleh informasi semakin hari mengalami desakan yang signifikan, seiring dengan tuntutan perkembangan era globalisasi saat ini. Sehingga disatukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pada dasarnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi publik yang dikucilkan. Hal ini sejalan dengan satu pilar informasi, yaitu Transparansi menuju <i>Clean Governemnt</i> dan <i>Good Governance</i> . Kemudian dibentuklah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM dengan	<b>Input :</b> - Surat Keputusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Nagari <b>Output:</b> - Terwakilinya suara Perempuan dalam Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Nagari <b>Outcome :</b> - Semua masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mengetahui perkembangan informasi termasuk dalam pembangunan.

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu gender		Kebijakan dan Rencana Aksi Kedepan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Monitoring
			Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal				
	anggota TIM tersebut. Sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya bagi perempuan dalam mengetahui informasi.						Pemerintah atau sebaiknya. Akan tetapi setelah dibentuk SK KIM tidak ada satupun Perempuan yang terdaftar dalam anggota TIM tersebut. Sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya bagi perempuan dalam mengetahui informasi perkembangan zaman, lingkup kecihya Daerah tempat tinggalnya.	

Pulaupung, Maret 2020  
 Pih, Kepala Dinas  
 Reno Lazardi, S.Pd, M.Si  
 Pembina/Iva  
 NIP.197512232000121003

TIM VERIFIKASI

KEPALA BKD INSPEKTUR KANDAM, S.Sos NIP.19670607 199103 1 004	KEPALA BKD PARYANTO, S.Sos.M.I. NIP.19690609 198902 1 003	KEPALA BAPPEDA Drs. ANDY SUMANTO, DfA NIP. 19681220 199009 1 001	KEPALA DINAS SOSIAL, PSA, PPKB BOBBY PRIZDA, S.STPM, ST NIP. 19820521 200012 1 002
---	---	--	--

## GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya

TAHUN ANGGARAN : 2021

<b>PROGRAM</b>	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
<b>KEGIATAN</b>	Pembinaan dan Peningkatan Peranan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
<b>KODE PROGRAM</b>	1.25.07.17.02
<b>ANALISA SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</b></p> <p>Keterbukaan untuk memperoleh informasi semakin hari mengalami desakan yang signifikan, seiring dengan tuntutan perkembangan di era globalisasi saat ini. Sehingga disahkannya undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pada dasarnya setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan. Hal ini sejalan dengan satu pilar informasi, yaitu Transparansi menuju <i>Clean Government dan good Governance</i>.</p> <p>Kemudian dibentuklah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berfungsi sebagai wahana informasi dan komunikasi antara anggota KIM dengan Pemerintah atau sebaliknya. Akan tetapi setelah dibentuk 11 SK KIM dari Nagari mewakili satu setiap Kecamatan tidak ada seorangpun Perempuan yang terdaftar dalam anggota TIM tersebut. Sehingga kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya bagi perempuan dalam mengetahui informasi perkembangan.</p> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p><b>a. Faktor Kesenjangan</b></p> <p><b>Akses:</b></p> <p><b>Partisipasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya Keterwakilan Perempuan dalam Kelompok Informasi Masyarakat.</li> </ul> <p><b>Kontrol:</b></p> <p><b>Manfaat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan tidak mengetahui/ tidak responsive terhadap Informasi terutama dalam perkembangan Pembangunan.</li> </ul> <p><b>b. Penyebab Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terutama Perempuan dalam pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).</li> </ul> <p><b>c. Penyebab Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya Keinginan Masyarakat Terutama Perempuan dalam ikut berpartisipasi dalam Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)</li> </ul>
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<p><b>1. Tolak Ukur</b></p> <p>Jumlah Dana Rp. 35.000.000,-</p> <p><b>2. Indikator dan Target Kinerja</b></p> <p><b>Input :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Surat Keputusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Nagari</u></li> </ul> <p><b>Output:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terwakilinya suara Perempuan dalam Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tingkat Nagari.</li> </ul> <p><b>Outcome :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Semua masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan mengetahui perkembangan Informasi termasuk dalam pembangunan.</u></li> </ul>

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	80.000.000,- ( Delapan Puluh Juta Rupiah )		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 80.000.000,- untuk Pembinaan dan Peningkatan Peranan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	
	Masukan	Rp. 80.000.000,-	
	Keluaran	Terbentuknya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di setiap Nagari yang melibatkan Laki-Laki dan Perempuan	
	Hasil	Tersebar nya Informasi Kegiatan Pembangunan di Masyarakat	


 Pulau Pinang, Maret 2020  
 Pjt. Kepala Dinas,  
**Reno Lazuardi, S.Pd, M.Si**  
 Pembina/ Iva  
 NIP. 19751223 200012 1 003

**VERIFIKASI KEGIATAN**

 <b>INSPEKTUR</b>  <b>KANDAM, S.Sos</b> NIP.196706071991031004	 <b>KEPALA BKD</b>  <b>RARYANTO, S.Sos, M.T</b> NIP.196906091989021001	 <b>KEPALA BAPPEDA</b>  <b>Drs. ANDY SUMANTO, CfrA</b> NIP.196811201990091001	 <b>KEPALA DINAS SOSIAL, P3A, PPKP</b> DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  <b>BOBBY PRIZA, S.STP, M.Si</b> NIP.198206212000121002
--	--	--	--

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

PD : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

PROGRAM : Peningkatan Daya Saing Koperasi dan UMKM

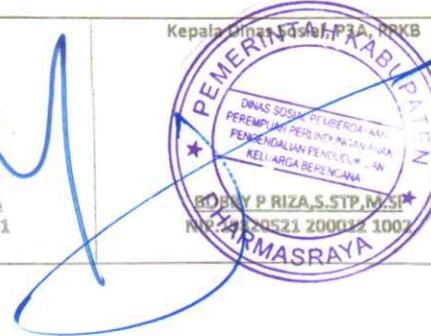
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>Program : Peningkatan Daya Saing operasi dan UMKM</p> <p>Kegiatan: Pelatihan Perkoperasian, pelatihan Manajemen, pelatihan Pengelolaan Koperasi, pelatihan Akuntansi, pelatihan Pengelolaan Keuangan Pinjam Koperasi, pelatihan Kewirausahaan, dan Penyusunan Laporan Neraca dan Lain-lain)</p> <p>Tujuan : Peningkatannya perekonomian masyarakat dan terciptanya wirausaha muda</p>	<p>Jika dilihat dari sudut pandang sebelumnya bahwa pengelola koperasi lebih didominasi oleh para kaum laki-laki. Maka dengan adanya kegiatan pelatihan perkoperasian dan pelatihan kewirausahaan tidak tertutup kemungkinan kaum perempuan juga memiliki peran yang baik dan bahkan juga bisa berwirausaha agar tidak terjadi ketimpangan atau kesenjangan gender. Dalam kegiatan ini terbentuk 120 orang dari jumlah keseluruhan dengan satu kali tahapan berjumlah 30 orang per kegiatan.</p>	<p><b>Akses:</b> - Pada umumnya di dominasi oleh kaum laki-laki</p> <p><b>Partisipasi:</b> - Perempuan kurang diberi kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan pelatihan perkoperasian</p> <p><b>Control:</b> - kurangnya pemahaman dalam mengaplikasikan jaringan internet</p> <p><b>Manfaat:</b> - Anggapan bahwa pelatihan ini hanya bermanfaat bagi kaum laki-laki</p>	<p>Kurangnya pengetahuan terhadap pengaplikasian jaringan internet, sehingga bisa menghambat pada proses pemasaran barang yang akan di perjual belikan.</p>	<p>Anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan tidak usah terlalu aktif dalam pelatihan perkoperasian, sebaliknya ini hanya didominasi oleh kaum laki-laki.</p>	<p>- Terangkatnya Perekonomian masyarakat dan terciptanya pewartusaha (laki-laki dan perempuan) muda</p>	<p>- Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 275.000.000,- untuk kegiatan tersebut</p> <p>- Membenakan penjelasan terhadap cara-cara dalam jual beli online, sehingga masyarakat bisa langsung mempraktekkan dan mempromosikan barang dengan mereka kepada dunia luar.</p>	<p>- Dalam kegiatan ini direncanakan akan diikuti oleh 120 orang dan jumlah keseluruhan dengan satu kali tahapan berjumlah 30 orang per kegiatan.</p> <p>- Sementara itu diperkirakan yang akan menghadiri pelatihan ini hanya sekitar 100 Orang jumlah keseluruhan kegiatan.</p>	<p><b>Input :</b> Output Hasilnya terciptanya para pewartusaha muda sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat</p> <p><b>Outcome :</b> Perekonomian masyarakat jauh lebih maju dan meningkat, sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahtera lagi.</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Deia Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja

Pulau Punjung, Maret 2020  
 Kepala  
 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan  
  
 Drs. H. ZUBRIZAL  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP.196308071987031007

Inspektur  
  
 KANDAM S. Sos  
 NIP.196208071951031004

TIM VERIFIKASI,  
 Kepala Bappeda  
  
 Drs. ANDY SUMANTO, S.P.A  
 NIP.196812201990081001

Kepala Dinas Sosial P3A, PRKB  
  
 BOBRY P RIZA S. STP, M.Si  
 NIP.19805212000121007

## GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas KOPINASI Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan  
TAHUN ANGGARAN : 2021

<b>PROGRAM</b>	Peningkatan Daya Saling Koperasi dan UMKM							
<b>KEGIATAN</b>	Pelatihan perkoperasian (pelatihan manajemen pengelolaan koperasi, pelatihan akuntansi, pelatihan pengelolaan struktur piutang koperasi, pelatihan kewirausahaan dan penyusunan laporan keuangan)							
<b>KODE KEGIATAN</b>	10.30							
<b>ANALISA SITUASI</b>	<p>1. <b>Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</b>  <i>Jika dilihat dari sudut pandang sebelum sebelumnya bahwa pengelola koperasi lebih didominasi oleh para kaum laki-laki. Maka dengan adanya kegiatan pelatihan perkoperasian dan pelatihan kewirausahaan bahwasanya kaum perempuan juga memiliki peran yang baik dan bahkan juga bisa berwirausaha agar tidak terjadi ketimpangan atau kesenjangan gender. Dalam kegiatan ini terbentuk 120 orang dan jumlah keseluruhan dengan satu kali tahapan berjumlah 30 orang per kegiatan</i></p> <p>2. <b>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p>a. <b>Faktor Kesenjangan</b></p> <p><b>Akses:</b>  Pada umumnya di dominasi oleh kaum laki-laki</p> <p><b>Partisipasi:</b>  Perempuan kurang diberi kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan pelatihan perkoperasian</p> <p><b>Control:</b>  kurangnya pemahaman dalam mengaplikasikan jaringan internet</p> <p><b>Manfaat :</b>  Anggapan bahwa pelatihan ini hanya bermanfaat bagi kaum laki-laki</p> <p>b. <b>Penyebab Internal</b>  Kurangnya pengetahuan terhadap mengaplikasikan jaringan internet, sehingga bisa menghambat pada proses pemasaran barang yang akan di perjual belikan.</p> <p>c. <b>Penyebab Eksternal</b>  Anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan tidak usah terlalu aktif dalam pelatihan perkoperasian, sebaliknya ini hanya didominasi oleh kaum laki-laki</p>							
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<p>1. <b>Toiak Ukur</b>  Jumlah Dana sebesar Rp. 275.000.000</p> <p>2. <b>Indikator dan Target Kinerja</b></p> <p><u>Input :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengusulan dana untuk mengangkat kegiatan tersebut sebesar Rp. 275.000.000</li> </ul> <p><u>Output</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasilnya terciptanya para pewira usaha muda sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat</li> </ul> <p><u>Outcome :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perekonomian masyarakat jauh lebih maju dan meningkat, sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahterah lagi.</li> </ul>							
<b>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</b>	Rp. 275.000.000,- ( Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah )							
<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Kegiatan 1</b>	Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 275.000.000,- untuk Kegiatan Pelatihan Perkoperasian <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Masukan</td> <td>Rp. 275.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td>Kegiatan Pelatihan Perkoperasian</td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td>Terciptanya para pewira usaha muda sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat</td> </tr> </table>	Masukan	Rp. 275.000.000,-	Keluaran	Kegiatan Pelatihan Perkoperasian	Hasil	Terciptanya para pewira usaha muda sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat
Masukan	Rp. 275.000.000,-							
Keluaran	Kegiatan Pelatihan Perkoperasian							
Hasil	Terciptanya para pewira usaha muda sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat							

Pulau Pinang, Maret 2020

Kepala

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan R

Kabupaten Dharmasraya

  
Drs. H. ZUBRIZAT  
Pemhita Azzaria Muda, IV/c  
NIP. 19630907198703 1 007

VERIFIKASI KEGIATAN

<p>Inspektur KANDAM, S. Sos NIP. 196706071991031004</p>	<p>Kepala BKD BARYANTO, S. Sp. M. I NIP. 196906091989081001</p>	<p>Kepala Bapveda Drs. ANDY SUMANTO, VA NIP. 196812201990091001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A, BERRY P RIZKA, S. STP NIP. 19820521200021007</p>
---	---	---	---

**MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

OPD : Dinas Lingkungan Hidup  
 PROGRAM : Peningkatan peran serta masyarakat dalam Pengembangan Dampak Perubahan Iklim

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>Nama Kebijakan/Program/Kegiatan</b>	<b>Data Pembuka Wawasan</b>	<b>ISU GENDER</b>						
		<b>Faktor Kesenjangan</b>	<b>Sebab Kesenjangan Internal</b>	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>	<b>Reformulasi Tujuan</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Basis Data (Base-Line)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>PROKLIM Program :</b> Perlindungan dan Konservasi Sumber daya alam	Jumlah anggota kelompok Pengembangan Dampak Perubahan Iklim tahun 2020: -Kelompok Tani: 30 orang; Lk 10, Pr 20	<b>Akses:</b> Jumlah anggota kelompok Pengembangan Dampak Perubahan Iklim : 30 orang, Lk 10 orang sedangkan Pr 20	1. Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender pemahamannya dan komitmen dari pihak terkait tentang dampak Perubahan Iklim. 3. Kurangnya Pemahaman SDM tentang Pengerusutamaan Gender	Masih rendah alokasi dana terhadap Pengembangan Dampak perubahan iklim	Bertambah jumlah kelompok peran serta masyarakat yang setara antara laki-laki dan perempuan (responsif gender) dalam Pengembangan Dampak Perubahan Iklim	1. Sosialisasi tentang Pengembangan Dampak Perubahan iklim yang responsive gender 2. Pembinaan kelompok masyarakat yang melakukan pengembangan dampak perubahan iklim	Jumlah anggota kelompok Pengembangan Dampak Perubahan Iklim tahun 2021: -Kelompok Tani: 40 orang; Lk 20, Pr 20	<b>Input</b> 1. Terbinanya kelompok pengembangan dampak perubahan iklim sebanyak 40 orang 2. Terlaksananya Sosialisasi tentang pengembangan Dampak Perubahan Iklim
<b>Kegiatan :</b> Pengembangan Dampak Perubahan Iklim		<b>Partisipasi:</b> Jumlah anggota kelompok Pengembangan Dampak Perubahan Iklim : 30 orang, Lk 10 orang sedangkan Pr 20						<b>Out put</b> Terbentuk kelompok baru masyarakat yang peduli terhadap lingkungan yang responsif gender
<b>Tujuan :</b> Membentuk kampung iklim		<b>Control:</b> Tidak sesuai dengan responsif gender jumlah laki-laki dengan perempuan sehingga keterlibatan laki-laki dalam kelompok belum maksimal.						<b>Out come</b> Terbentuknya kampung iklim baru

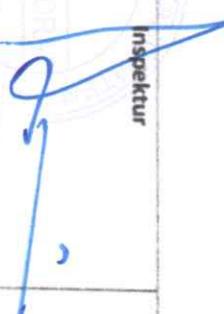
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah	
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	ISU GENDER	Sebab Kesenjangan Eksternal	Sebab Kesenjangan Internal	KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kii
		Manfaat : Peningkatan Dampak Perubahan Iklim belum merasa penting oleh laki-laki				Reformulasi Tujuan			

Pulau Punjung, ..... Maret 2020

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,  
KABUPATEN DHARMASRAYA

(drg. ERINA, MKM)  
NIP. 19620528 198802 2 001

Tim Verifikasi

<p>Inspektur</p>  <p>Kandam, S.Sos NIP. 19670607 199103 1 004</p>	<p>Kepala BKD</p>  <p>Paryanto, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Bappeda</p>  <p>Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP. 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKS</p>  <p>Bobby A. Niza, S.STP, M.Si NIP. 19820521 200012 1 002*</p>
--	---	---	---

## FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)																		
SKPD	: Dinas Lingkungan Hidup																	
TAHUN ANGGARAN	: 2021																	
PROGRAM	Perlindungan dan Konservasi sumber daya Alam																	
KODE PROGRAM	2.05.2.05.01.05.17.																	
KEGIATAN	Pengembangan Dampak Perubahan Iklim																	
HASIL/OUTPUT	Bertambah jumlah kelompok peran serta masyarakat yang setara antara laki-laki dan perempuan ( responsif gender) dalam Pengembangan Dampak Perubahan Iklim																	
ANALISIS SITUASI	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</b> Jumlah anggota kelompok Pengembangan Dampak Perubahan Iklim tahun 2020: Kelompok Tani: 30 orang: Lk 10, Pr 20</p> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah anggota kelompok Pengembangan Dampak Perubahan Iklim : 30 orang, Lk 10 orang sedangkan Pr 20</li> <li>2. Tidak sesuai dengan responsif gender jumlah laki-laki dengan perempuan sehingga keterlibatan laki-laki dalam kelompok belum maksimal.</li> <li>3. Pengembangan Dampak Perubahan Iklim belum merasa penting oleh laki-laki</li> </ol> <p>b. Penyebab Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender</li> <li>2. Kurangnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang dampak Perubahan Iklim</li> <li>3. Kurangnya Pemahaman SDM tentang Pengerusutamaan Gender</li> </ol> <p>c. Penyebab Eksternal Masih rendah alokasi dana terhadap Pengembangan Dampak perubahan Iklim</p>																	
RENCANA AKSI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 15%;"><b>Komponen/ Aktifitas 1</b></td> <td colspan="2">Sosialisasi tentang Pengembangan Dampak Perubahan iklim yang responsive gender</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Tujuan</b></td> <td>Terlaksananya Sosialisasi tetang pengembangan Dampak Perubahan Iklim</td> </tr> <tr> <td><b>Alokasi Anggaran</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3"><b>Komponen/ aktifitas 2</b></td> <td colspan="2">Pembinaan kelompok masyarakat yang melakukan pengembangan dampak perubahan iklim</td> </tr> <tr> <td><b>Tujuan</b></td> <td>Terbinanaya kelompok pengembangan dampak perubahan iklim sebanyak 40 orang</td> </tr> <tr> <td><b>Alokasi Anggaran</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total anggaran:</b></td> <td><b>Rp. 95.700.000,-</b></td> </tr> </table>	<b>Komponen/ Aktifitas 1</b>	Sosialisasi tentang Pengembangan Dampak Perubahan iklim yang responsive gender		<b>Tujuan</b>	Terlaksananya Sosialisasi tetang pengembangan Dampak Perubahan Iklim	<b>Alokasi Anggaran</b>		<b>Komponen/ aktifitas 2</b>	Pembinaan kelompok masyarakat yang melakukan pengembangan dampak perubahan iklim		<b>Tujuan</b>	Terbinanaya kelompok pengembangan dampak perubahan iklim sebanyak 40 orang	<b>Alokasi Anggaran</b>		<b>Total anggaran:</b>		<b>Rp. 95.700.000,-</b>
<b>Komponen/ Aktifitas 1</b>	Sosialisasi tentang Pengembangan Dampak Perubahan iklim yang responsive gender																	
	<b>Tujuan</b>		Terlaksananya Sosialisasi tetang pengembangan Dampak Perubahan Iklim															
	<b>Alokasi Anggaran</b>																	
<b>Komponen/ aktifitas 2</b>	Pembinaan kelompok masyarakat yang melakukan pengembangan dampak perubahan iklim																	
	<b>Tujuan</b>	Terbinanaya kelompok pengembangan dampak perubahan iklim sebanyak 40 orang																
	<b>Alokasi Anggaran</b>																	
<b>Total anggaran:</b>		<b>Rp. 95.700.000,-</b>																

<b>CAPAIAN PROGRAM</b> (di level kegiatan)	Output: <i>Terbentuk kelompok baru masyarakat yang peduli terhadap lingkungan yang responsif gender</i> Outcome: <i>Terbentuknya Kampung Iklim baru</i>
---	--

Pulau Punjung, ...Maret 2020

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

(Irg. ERINA, MKM)  
 NIP. 19620528 198802 2 001

**Tim Verifikasi**

<p><b>Inspektur</b>          Kadam, S.Sos          NIP. 19670607 199103 1 004</p>	<p><b>Kepala BKD</b>          Paryanto, S.Sos, M.T          NIP. 19690609 198902 1 001</p>	<p><b>Kepala Bappeda</b>          Drs. Andy Sumanto, CfrA          NIP. 19681220 199009 1 001</p>	<p><b>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB</b>          Bobby P. Riza, S.STP, M.Si          NIP. 19820521 200612 1 002</p>
---	--	---	--

**MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

OPD : Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya

PROGRAM : Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p><b>Program :</b> Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan</p> <p><b>Kegiatan :</b> Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan dan Gemarikan</p> <p><b>Tujuan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Pengetahuan masyarakat tentang manfaat makan ikan</li> <li>Mengajak masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan</li> <li>Meningkatkan Angka Konsumsi ikan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 sebanyak 241.572 jiwa orang yang terdiri atas :125.278 Jiwa laki-laki dan 116,293 Jiwa perempuan</li> <li>Usia Anak dari 0- 14 tahun sebanyak 72.030 Jiwa</li> <li>Angka Konsumsi ikan Tahun 2018 adalah 36 Kg/Kap/tahun.</li> <li>Target Konsumsi Ikan Nasional Tahun 2021 &gt; 50 Kg/Kap.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akses: 1). Tidak semua masyarakat dapat mengakses kegiatan ini.</li> <li>2). Masyarakat yang ikut dalam kegiatan di dominasi oleh kaum ibu (Wanita).</li> <li>Partisipasi : Tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini (di dominasi oleh kaum perempuan /ibu-ibu )</li> <li>Manfaat : Tidak semua masyarakat menerima manfaat dari kegiatan ini.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan sumberdaya manusia untuk mendukasi masyarakat tentang manfaat makan ikan bagi tubuh.</li> <li>Keterbatasan dukungan pembiayaan yang memadai untuk kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahya kepedulian dan keterlibatan masyarakat terutama laki-laki tentang manfaat makan ikan bagi tubuh terutama anak-anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Pengetahuan masyarakat tentang manfaat makan ikan</li> <li>Mengajak masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan</li> <li>Meningkatkan Angka Konsumsi ikan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan frekuensi Edukasi kepada masyarakat tentang Manfaat Makan ikan</li> <li>Meningkatkan Peran aktif dari seluruh unsur masyarakat dalam mengSosialisasikan manfaat makan ikan</li> <li>Menambah jumlah Media Sosialisasi dan Edukasi manfaat makan ikan melalui event lomba masak serba ikan , pelatihan pengolahan ikan, leaflet, balho dan melalui media sosial lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Sosialisasi dan Edukasi Makan ikan yang dilaksanakan</li> <li>Jumlah masyarakat yang mengikuti / terlibat dalam kegiatan</li> <li>Jumlah Media Edukasi yang di ciptakan/di buat</li> <li>Jumlah Organisasi Pemerintah dan Organisasi Kemsasyarakat yang berperan aktif dalam edukasi dan Sosialisasi manfaat makan ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Output : 1). Persentase Masyarakat yang terlibat dalam Sosialisasi dan edukasi manfaat makan ikan</li> <li>2). Persentase Media yang digunakan untuk edukasi dan Sosialisasi makan ikan</li> <li>Outcome : 1) Angka Konsumsi ikan Daerah</li> </ul>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja

KEPALA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN



	<p>TIM VERIFIKASI</p>		
--	-----------------------	--	--

**GENDER BUDGET STATEMENT  
(Pernyataan Anggaran Gender)**

SKPD : Dinas Pangan dan Perikanan

TAHUN ANGGARAN : 2021

<b>PROGRAM</b>	Optimaliasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
<b>KODE PROGRAM</b>	3.01.2.03.01.23
<b>KEGIATAN</b>	Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan dan Gemarikan
<b>HASIL/OUTPUT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang manfaat makan ikan bagi tubuh dan kesehatan</li> <li>2. Meningkatnya angka Konsumsi ikan perkapita masyarakat</li> </ol>
<b>ANALISA SITUASI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 241.572 Jiwa yang terdiri atas 125.278 Jiwa laki-laki dan 116.293 Jiwa perempuan</li> <li>- Usia Anak dari 0-14 Tahun sebanyak 72.030 Jiwa</li> <li>- Angka Konsumsi Ikan Daerah Tahun 2018 sebanyak sebesar 36 Kg/Kap/Th</li> <li>- Target Konsumsi Ikan Nasional &gt; 50 Kg/Kap/th</li> </ul> </li> <li>2. <b>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Faktor Kesenjangan</b> <p><b>Akses:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak semua masyarakat dapat mengakses kegiatan ini</li> <li>- Masyarakat yang ikut dalam kegiatan ini di dominasi oleh Perempuan (kaum ibu)</li> </ul> <p><b>Partisipasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini ( di dominasi oleh kaum perempuan/ibu-ibu)</li> </ul> <p><b>Manfaat :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak semua masyarakat menerima manfaat dari kegiatan ini</li> </ul> </li> <li>b. <b>Penyebab Internal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatas sumberdaya manusia untuk mengedukasi masyarakat tentang Manfaat makan ikan bagi tubuh</li> <li>- Keterbatasan dukungan pembiayaan yang memadai untuk kegiatan</li> </ul> </li> <li>c. <b>Penyebab Eksternal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya kepedulian dan keterlibatan masyarakat terutama laki- laki tentang manfaat makan ikan bagi tubuh terutama anak-anak</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tolak Ukur Jumlah Dana Rp. 70.000.000,-</li> <li>2. <b>Indikator dan Target Kinerja</b> <p><u>Input :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengusulan dana untuk kegiatan Sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang manfaat makan ikan bagi tubuh sebesar Rp. 70.000.000,-</li> </ul> <p><u>Output:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya Pengetahuan masyarakat tentang manfaat makan ikan bagi kesehatan</li> </ul> <p><u>Outcome :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angka Konsumsi Ikan ( AKI) Daerah</li> </ul> </li> </ol>

<b>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</b>	Rp 70.000.000,- ( Tujuh puluh juta rupiah )		
<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Kegiatan 1</b>	Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 70.000.000,- untuk Peningkatan Forum Komunikasi Perikanan dan Gemarikan	
	<b>Masukan</b>	Rp 70.000.000,-	
	<b>Keluaran</b>	Jumlah event Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat makan ikan bagi tubuh	
	<b>Hasil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terlaksananya event Sosialisasi manfaat makan ikan bagi tubuh</li> <li>- Terlaksananya edukasi masyarakat tentang manfaat makan ikan melalui baliho, leaflet, lomba masak serba ikan dan pelatihan pengolahan ikan</li> <li>- Terlaksananya pemberian makanan berbahan ikan kepada anak-anak dalam masa emas pertumbuhan</li> </ul>	


 Purwanto, M.Pd  
 Kepala Dinas  
 NIP. 19620805 198308 1 001

**VERIFIKASI KEGIATAN**

 <b>Inspektur</b>  <b>KANDAM, S.Sos</b> NIP.196706071991031004	 <b>KEPALA BKD</b>  <b>PARYANTO, S.Sos, M.T</b> NIP.196906091989021001	 <b>Kepala Bappeda</b>  <b>Dts. ANDY SUMANTO, Ofra</b> NIP. 196812201990091001	 <b>Kepala Dinas Sosial, P3A,</b>  <b>BOBRIANZA, S.STP, M.Si</b> NIP.196812201990091002
--	--	--	---

## Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

OPD : Dinas Pendidikan

PROGRAM : Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja
<p><b>Program : Peningkatan Mutu Tenaga dan Kependidikan</b></p> <p><b>Kegiatan : Pelaksanaan sertifikasi Pendidik</b></p> <p><b>Tujuan : Terlaksananya sosialisasi, seleksi dan Pemberkasan dokumen guru SD dan SMP peserta Sertifikasi di kabupaten Dharmasraya</b></p>	<p>*Jumlah Sertifikasi di kabupaten Dharmasraya : 1270 orang</p> <p>*Jumlah Guru sertifikasi Laki – Laki di kabupaten dharmasraya : 306 orang</p> <p>*Jumlah Guru sertifikasi Perempuan di kabupaten dharmasraya : 954 orang</p>	<p><b>Akses:</b></p> <p>* Kuota guru sertifikasi</p> <p>* Anggaran blm memadai</p> <p><b>Partisipasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pindah tugas/ mutasi</li> <li>- Tidak terpenuhinya jumlah jam mengajar</li> </ul> <p><b>Control:</b> Jumlah guru sertifikasi yang ada di kabupaten Dharmasraya</p> <p><b>Manfaat : Seleksi yang diberikan</b></p>	<p>*Masih adanya sekolah kecil / terpencil di kabupaten dharmasraya</p> <p>*Masih terbatasnya jumlah peserta PPG pra jabatan atau dalam jabatan</p>	<p>*Kurangnya anggaran untuk guru sertifikasi</p>	<p>Meningkatkan sosialisasi sertifikasi kepada guru – guru</p>	<p>*Melakukan kerja sama dengan pihak kementrian dan ditjen GTK untuk menambah kuota penerima sertifikat pendidik / sertifikasi</p> <p>*Memberikan pelatihan kepada guru – guru dalam melaksanakan PPG pra jabatan atau dalam jabatan.</p> <p>*Meningkatkan sarana dan prasarana serta minat siswa sekolah</p>	<p><b>Jumlah Guru Sertifikasi</b></p>	<p>*Terlaksananya pelaksanaan sertifikasi pendidik</p> <p>*Meningkatnya Guru Sertifikasi</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base- Line)	Indikator Kinerja

Pulau Punjung, Maret 2020  
Kepala Dinas,



**MARIUS, S.Pd, MM**  
Nip. 19641116 198802 1 002

<p>Inspektur</p> <p><b>KANDAM, S.Sos</b> NIP.196706071991031004</p>	<p>KEPALA BKD</p> <p><b>PARYANTO, S.Sos, M.T</b> NIP.196906091989021001</p>	<p>Kepala Bappeda</p> <p><b>Drs. ANDY SUMANTO, CfrA</b> NIP. 196812201990091001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB</p> <p><b>BOBBY P RIZA, S.STP, M.Si</b> NIP.198205212000121002</p>
---	---	---	--

## FORMAT GBS

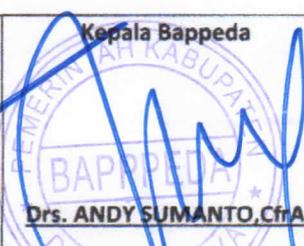
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)		
SKPD	: DINAS PENDIDIKAN	
TAHUN ANGGARAN	: 2021	
PROGRAM	Peningkatan Mutu Tenaga dan Kependidikan	
KODE PROGRAM		
KEGIATAN	Pelaksanaan sertifikasi Pendidik	
HASIL/OUTPUT	Meningkatkan sosialisasi sertifikasi kepada guru – guru	
ANALISIS SITUASI	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</b></p> <p>Jumlah Guru Sertifikasi di kabupaten Dharmasraya : 1270 orang</p> <p>Jumlah Guru sertifikasi Laki – Laki di kabupaten dharmasraya : 306 orang</p> <p>Jumlah Guru sertifikasi Perempuan di kabupaten dharmasraya : 954 orang</p> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p><b>a. Akses:</b></p> <p style="padding-left: 20px;">Kuota guru sertifikasi</p> <p style="padding-left: 20px;">Anggaran blm memadai</p> <p>Partisipasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pindah tugas/ mutasi</li> <li>- Tidak terpenuhinya jumlah jam mengajar</li> </ul> <p style="padding-left: 20px;">Control: Jumlah guru sertifikasi yang ada di kabupaten Dharmasraya</p> <p style="padding-left: 20px;">Manfaat : Seleksi yang diberikan</p> <p><b>b.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih adanya sekolah kecil / terpencil di kabupaten dharmasraya</li> <li>- Masih terbatasnya jumlah peserta PPG pra jabatan atau dalam jabatan</li> </ul> <p><b>c.</b> Kurangnya anggaran untuk guru sertifikasi</p>	
RENCANA AKSI	<b>Komponen/ Aktifitas 1</b>	Memberikan pelatihan kepada guru – guru dalam melaksanakan PPG pra jabatan atau dalam jabatan.
	<b>Tujuan</b>	Meningkatnya Guru Sertifikasi
	<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp.65.500.000,00
	<b>Total anggaran</b>	Rp.65.500.000,00
CAPAIAN PROGRAM	<p>-Terlaksananya pelaksanaan sertifikasi pendidik</p> <p>-Meningkatnya Guru Sertifikasi</p>	

		<b>Anggaran</b>	
	<b>Total anggaran</b>		Rp.65.500.000,00
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	-Terlaksananya pelaksanaan sertifikasi pendidik -Meningkatnya Guru Sertifikasi		

Pulau Punjung, Maret 2020  
 Kepala Dinas,



**MARIUS, S. Rd, MM**  
 Nip. 19641116 198802 1 002

Inspektur  <b>KANDAM, S. Sos</b> NIP.196706071991031004	KEPALA BKD  <b>RARYANTO, S. Sos, M.T</b> NIP.196906091989021001	Kepala Bappeda  <b>Drs. ANDY SUMANTO, CfrA</b> NIP. 196812201990091001	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB  <b>BOBBY PRIZA, S.STP, M.SI</b> NIP.198205212000121002
--	--	--	--

## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender		Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
			Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal				
<p><b>Program :</b> Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</p> <p><b>Kegiatan :</b> Pembangunan Gedung Terminal Tipe C</p> <p><b>Tujuan :</b> Melayani Kendaraan Penumpang Umum untuk Angkutan Pedesaan (ADES).</p>	<p>Data penumpang ADES pada tahun 2019 ± 7980 Orang yg terdiri dari : *laki-laki 2480 orang *perempuan 5500 orang</p>	<p><b>Akses</b> Banyaknya jumlah penumpang perempuan karena terminal berada di dalam pasar.</p> <p><b>Partisipasi</b> Belum sempurnanya pelayanan terhadap penumpang</p> <p><b>Manfaat</b> Memberikan fasilitas bagi penumpang perempuan dan laki-laki yang berada di</p>	<p>Belum optimalnya tempat istirahat bagi penumpang perempuan yang ada di terminal</p> <p>Karena tempat/keadaannya yang belum memadai</p> <p>Belum maksimalnya pelayanan terhadap penumpang</p>	<p>Fungsi dan manfaat terminal yang masih harus ditingkatkan</p> <p>Masih kurangnya service terhadap penumpang</p>	<p>Melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Pedesaan (ADES)</p>	<p>Meningkatkan pelayanan terhadap penumpang laki-laki dan perempuan</p> <p>Membuat penumpang nyaman mungkin</p>	<p>Jumlah data penumpang ADES</p>	<p>Output : Terselenggaranya pelayanan yang sempurna terhadap penumpang</p> <p>Outcome : Meningkatnya kepuasan penumpang terhadap pelayanan di terminal</p>

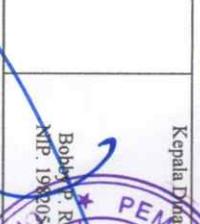
			terminal.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

  
 Gunung Medan, Maret 2020  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**RAMILUS, SP.M.Si**  
 Pembina Utama Muda / IV C  
 Nip. 19670918 199203 1 004

  
**Inspektur**  
 Kandam, S.Sos  
 NIP. 19670607 199203 1 004

  
**Kepala BKD**  
 Paryanto, S.Sos.M.Pd  
 NIP. 19690609 198902 1 001

  
**Kepala Bappeda**  
 Drs. Andy Sumanto, CFA  
 NIP. 19681220 199009 1 001

  
**Kepala Bidang SP3A PPKB**  
 Bobak P. Riza, S.STP-M.Si  
 NIP. 19820521 200012 1 002

Tim Verifikasi  


## FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)								
SKPD TAHUN ANGGARAN	: <i>DINAS PERHUBUNGAN</i> : <i>Tahun Anggaran 2020</i>							
PROGRAM	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan							
KODE PROGRAM	2.09.2.09.01.18							
KEGIATAN	Pembangunan Gedung Terminal Tipe C							
HASIL/OUTPUT	Melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Pedesaan (ADES)							
ANALISIS SITUASI	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</b></p> <p>Data penumpang ADES pada tahun 2019 ± 7980 orang yang terdiri dari laki-laki 2480 orang dan perempuan 5500 orang.</p> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p>a. Banyaknya jumlah penumpang perempuan karena terminal berada di dalam pasar.</p> <p>b. Belum optimalnya tempat istirahat bagi penumpang perempuan yang ada di terminal.</p> <p>c. Fungsi dan manfaat terminal yang masih harus di tingkatkan.</p>							
RENCANA AKSI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 15%;"><b>Komponen/ Aktifitas 1</b></td> <td colspan="2">Meningkatkan pelayanan terhadap penumpang laki-laki dan perempuan</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Tujuan</b></td> <td>Supaya penumpang senang dan nyaman</td> </tr> <tr> <td><b>Alokasi Anggaran</b></td> <td>Rp. 50.000.000.-</td> </tr> </table>	<b>Komponen/ Aktifitas 1</b>	Meningkatkan pelayanan terhadap penumpang laki-laki dan perempuan		<b>Tujuan</b>	Supaya penumpang senang dan nyaman	<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 50.000.000.-
	<b>Komponen/ Aktifitas 1</b>		Meningkatkan pelayanan terhadap penumpang laki-laki dan perempuan					
			<b>Tujuan</b>	Supaya penumpang senang dan nyaman				
		<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 50.000.000.-					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 15%;"><b>Komponen/ aktifitas 2</b></td> <td colspan="2">Membuat penumpang nyaman mungkin</td> </tr> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Tujuan</b></td> <td>Supaya penumpang ADES meningkat</td> </tr> <tr> <td><b>Alokasi Anggaran</b></td> <td>Rp. 20.000.000.-</td> </tr> </table>	<b>Komponen/ aktifitas 2</b>	Membuat penumpang nyaman mungkin		<b>Tujuan</b>	Supaya penumpang ADES meningkat	<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 20.000.000.-
<b>Komponen/ aktifitas 2</b>	Membuat penumpang nyaman mungkin							
	<b>Tujuan</b>		Supaya penumpang ADES meningkat					
	<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 20.000.000.-						
<b>Total anggaran</b>		Rp. 70.000.000.-						
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	<p><b>Output :</b> Terlaksananya Pelayanan yang sempurna terhadap penumpang</p> <p><b>Outcome :</b> Meningkatnya kepuasan penumpang terhadap pelayanan di terminal</p>							

Gunung Medan, Maret 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



RAMILUS, SP.M.Si

Pembina Utama Muda IV/C

Nip. 19670918 199203 1 004

Tim Verifikasi

<p>Inspektur</p>  <p>Kadam, S.Sos</p> <p>NIP. 19670607 199203 1 004</p>	<p>Kepala BKD</p>  <p>Paryanto, S.Sos, M.I</p> <p>NIP. 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Bappeda</p>  <p>Drs. Andy Sumanto, CFA</p> <p>NIP. 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala Dinas SOSPE/APPKB</p>  <p>Bobby P. Riza, S.STP, M.Si</p> <p>NIP. 19820521 200012 1 002</p>
--	---	--	--

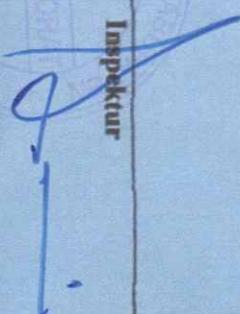
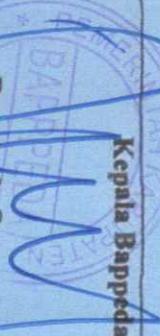
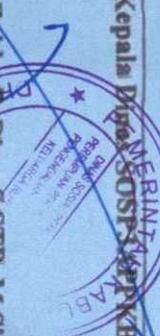
### GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program : Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Monitoring Indikator Gender
<p>Kegiatan : Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis</p> <p>Tujuan : meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian</p>	<p>Jumlah petani Jumlah penyuluh Kelompok tani Kelompok wanita tani (KWT)</p>	<p>Akses: dampungan yang diberikan antara perempuan dan laki-laki</p> <p>Partisipasi: tidak seluruh petani yang mendapatkan dampungan</p> <p>Control: dampungan yang di berikan</p>	<p>Sebab Kesenjangan Internal SDM tidak mencukupi</p> <p>Jumlah kelompok tani dan dan kelompok wanita tani</p>	<p>Tingkat Antusias masyarakat</p>	<p>Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian/Perkebunan</p> <p>Meningkatkan fungsi kelembagaan petani</p>	<p>Penyuluhan ke pada KWT dan kelompok tani</p>	<p>Jumlah petani Jumlah penyuluh Kelompok tani</p>	<p>Jumlah penilaian kelembagaan petani, SDM petugas dan petani berprestasi</p>

Manfaat : dengan penyuluhan dan dampingan yang diberikan bisa meningkatkan produksi

Pulau Punjung, Maret 2020  
Kepala Dinas Pertanian

**DARISMAN, SSI, MM**  
NIP. 19750217-200003 1001

 <b>Inspektur</b> Kandam, S.Sos NIP. 19670607 199203 1 004	 <b>Kepala BKD</b> Paryanto, S.Sos, M.T NIP. 10690609 198902 1 001	 <b>Kepala Bappeda</b> Drs. Audy Sumanto, CERA NIP. 19681220 199009 1 001	 <b>Kepala Dinas</b> Bobbi Riza, S.STP, M.Si NIP. 19631021 200012 1 002
--	---	---	---

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD : DINAS PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN : 2021

<b>PROGRAM</b>	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani								
<b>KODE PROGRAM</b>	2.01.01.15								
<b>KEGIATAN</b>	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis								
<b>HASIL/OUTPUT</b>	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian/Perkebunan  Meningkatkan fungsi kelembagaan petani								
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Jumlah petani</li> <li>➢ Jumlah penyuluh</li> <li>➢ Kelompok tani</li> <li>➢ Kelompok wanita tani(KWT)</li> </ul> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p>a. Faktor Kesenjangan Akses: dampingan yang diberikan antara perempuan dan laki-laki  Partisipasi: tidak seluruh petani yang mendapatkan dampingan  Control: dampingan yang di berikan  Manfaat : dengan penyuluhan dan dampingan yang diberikan bisa meningkatkan produksi</p> <p>b. Penyebab Internal SDM tidak mencukupi  Jumlah kelompok tani dan dan kelompok wanita tani</p> <p>c. Penyebab Eksternal Tingkat Antusias masyarkat</p>								
<b>RENCANA AKSI</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>Komponen/ Aktifitas I</b></td> <td>Penyuluhan ke pada KWT dan kelompok tani</td> </tr> <tr> <td><b>Tujuan</b></td> <td>Diisi dengan informasi yang mendukung pencapaian hasil kegiatan yang responsif Gender</td> </tr> <tr> <td><b>Alokasi Anggaran</b></td> <td>Rp. 507.000.000,-</td> </tr> <tr> <td><b>Total anggaran</b></td> <td>Rp. 507.000.000,-</td> </tr> </table>	<b>Komponen/ Aktifitas I</b>	Penyuluhan ke pada KWT dan kelompok tani	<b>Tujuan</b>	Diisi dengan informasi yang mendukung pencapaian hasil kegiatan yang responsif Gender	<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 507.000.000,-	<b>Total anggaran</b>	Rp. 507.000.000,-
<b>Komponen/ Aktifitas I</b>	Penyuluhan ke pada KWT dan kelompok tani								
<b>Tujuan</b>	Diisi dengan informasi yang mendukung pencapaian hasil kegiatan yang responsif Gender								
<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 507.000.000,-								
<b>Total anggaran</b>	Rp. 507.000.000,-								
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	Jumlah penilaian kelembagaan petani, SDM petugas dan petani berprestasi								

Pulau Punjung, Maret 2020  
Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Dharmasraya

DARISMAN, Ssi, MM  
NIP. 19750217 200003 1001

INSPEKTUR  KANDAM, S.Sos NIP. 196706071991031004	VERIFIKASI KEGIATAN KEPALA BKB PARIYANTO, S.Sos, M.T NIP. 196906091989021001	KEPALA BAPPEDA DRS. ANDY SUMANTO, C.vrA NIP. 196812201990091001	KEPALA DINAS SOEYATNO, PPKB BOBBY RIZA, S.STP, M.Si NIP. 198308212000121002
---	---	---	--

## Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>Nama Kegiatan/Program/ Kegiatan</b>	<b>Data Pembuka Wawasan</b>	<b>Faktor Kesenjangan</b>	<b>ISU GENDER</b>	<b>Sebab Kesenjangan Internal</b>	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>	<b>KEJUJUKAN DAN RENCANA KEDEPAN</b>	<b>RENCANA AKSI</b>	<b>PENGUKURAN HASIL</b>
<b>Program :</b> Peningkatan Kemampuan Pemerintah Nagari <b>Kegiatan :</b> Pembinaan LPM Nagari <b>Tujuan :</b> Terselenggaranya pembinaan LPM yang handal	<b>Dasar</b> Pedoman LPM No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang mengamankan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Nagari <b>LPM</b> terdiri dari 3 anggota kepengurusan yaitu Ketua, Sekretaris, Ben dahara <b>Jumlah</b> anggota LPM 156 orang dari 52 Nagari yang Hadir dalam pembinaan LPM kurang dari 50% sekitar 60 orang	<b>Akses</b> - Kurangnya anggaran operasional untuk kegiatan LPM - rendahnya gaji / penghasilan yang diterima oleh anggota LPM <b>Partisipasi</b> - Rendahnya partisipasi dan semangat anggota LPM untuk mengikuti pembinaan LPM <b>Kontrol</b> - Pembinaan LPM hanya sebatas memenuhi amanat Permendagri No 18 Tahun 2018 - Hanya untuk mengikuti kegiatan tahunan	<b>Sebab Kesenjangan Internal</b> - LPM belum memahami dengan tugas pokok dan fungsi dari LPM - Banyak yang mengundurkan diri dari ke pengurusan LPM karena keterbatasan anggaran	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b> - Masih rendahnya pemahaman dan komitmen dari peserta pembinaan LPM - Peserta lebih banyak diikuti oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan - Minimnya pelaksanaan sosialisasi kepada LPM terkait pembinaan LPM - Masih minimnya informasi/pengetahuan yang dimiliki oleh anggota LPM	<b>Reformulasi Tujuan</b> Terwujudnya pembinaan LPM yang handal dan kompeten	<b>Rencana Aksi</b> - Meningkatkan koordinasi dengan OPD Provinsi - Membentuk kelompok LPM yang dibagi berdasarkan wilayah kerja	<b>Basis Data (Base-Line)</b> - Pelaksanaan Pembinaan LPM Nagari tahun 2019 yang hadir berjumlah 60 orang peserta - komposisi jenis kelamin 40 laki-laki dan 10 perempuan. - komposisi elemen yang hadir dari LPM dan sekretaris seluruh Nagari di Dharmastara	<b>Indikator Kinerja</b> <b>Kegiatan 1:</b> Pembinaan LPM Nagari <b>Input:</b> Rp. 175.000.000,- <b>Output:</b> Pembinaan LPM di Nagari <b>Outcome:</b> Terselenggaranya pembinaan LPM Nagari yang handal dan kompeten

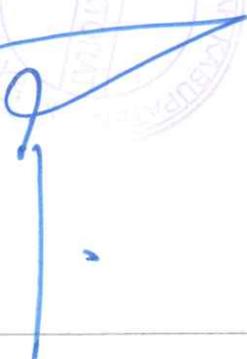
Pulang-Panting, 23 Maret 2020

 Kepala Dinas  
 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Kabupaten Dharmastara


 (HASTO KUNCOROM, Pd.)  
 NIP. 19730301 199801 1 001

TIM VERIFIKASI

Lembar : 2

<p>INSPEKTUR</p>   <p>KANDAM, S. Sos NIP. 19670607 199103 1 004</p>	<p>KEPALA BKD</p>   <p>PARYANTO, S. Sos, MT NIP. 19690909 198902 1 001</p>	<p>KEPALA BAPPPEDA</p>   <p>Drs. ANDY SUMANTO, CFIA NIP. 19681220 199009 1 001</p>	<p>KEPALA DINSOSP3APPKB</p>   <p>BOBBY P RIZA, S. STP, M. SI NIP. 19820521 200012 1 002</p>
---	---	--	---

## GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
TAHUN ANGGARAN : 2021

PROGRAM	PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA		
KODE PROGRAM	1.02.07.1.02.07.01.18		
ANALISA SITUASI	<p>1. <b>Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</b></p> <p>a. Dasar Pedoman Pembentukan LPM adalah Permendagri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, yang mengamanatkan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/ Nagari</p> <p>b. LPM terdiri dari 3 anggota kepengurusan yaitu Ketua, Sekretaris, Bendahara</p> <p>c. Jumlah anggota LPM 156 orang dari 52 Nagari yang Hadir dalam pembinaan LPM kurang dari 50% sekitar 60 orang</p> <p>2. <b>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p>a. <b>Faktor Kesenjangan Akses</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya anggaran operasional untuk kegiatan LPM</li> <li>- rendahnya gaji / penghasilan yang diterima oleh anggota LPM</li> </ul> <p><b>Partisipasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya partisipasi dan semangat anggota LPM untuk mengikuti pembinaan LPM</li> </ul> <p><b>Kontrol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan LPM hanya sebatas memenuhi amanat Permendagri No 18 Tahun 2018 Hanya untuk mengikuti kegiatan tahunan</li> </ul> <p>b. <b>Penyebab Internal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM belum memahami dengan tugas pokok dan fungsi dari LPM</li> <li>2. Banyak yang mengundurkan diri dari ke pengurusan LPM k arena keterbatasan anggaran</li> </ol> <p>c. <b>Penyebab Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya pemahaman dan komitmen dari peserta pembinaan LPM</li> <li>2. Peserta lebih banyak diikuti oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan</li> <li>3. Minimnya pelaksanaan sosialisasi kepada LPM terkait pembinaan LPM</li> <li>4. Masih minimnya informasi/pengetahuan yang dimiliki oleh anggota LPM</li> </ol>		
CAPAIAN PROGRAM	<p>1. <b>Tolak Ukur</b> Jumlah Dana Rp.175.000.000,-</p> <p>2. <b>Indikator dan Target Kinerja</b></p> <p><b>Input</b> Dana yang diusulkan sebesar 175.000.000,-</p> <p><b>Output</b> Pembinaan LPM di Nagari</p> <p><b>Outcome</b> Terlaksananya pembinaan LPM Nagari yang handal dan kompeten</p>		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 175.000.000,-		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1		
		Masukan	Rp. 175.000.000,-
		Keluaran	Pembinaan LPM di Nagari
		Hasil	Terlaksananya pembinaan LPM Nagari yang handal dan kompeten

Pulau Punjung, 23 Maret 2020

Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Dharmasraya

(HASTO KUNCORO, M.Pd)  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19730301 199801 1 001

TIM VERIFIKASI

INSPEKTUR	KEPALA BKD	KEPALA BAPPPEDA	KEPALA DINSOSP3APPKB
  <b>KANDAM, S.Sos</b> NIP.19670607 199103 1 004	  <b>PARYANTO, S.Sos, MT</b> NIP.19690609 198902 1 001	  <b>Drs. ANDY SUMANTO, CFA</b> NIP.19681220 199009 1 001	  <b>BOBBY RIZA, S.STP., M.Si</b> NIP.19820521 200012 1 002

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PROGRAM : Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka/ Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Program : 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor yang representative	Akses : Belum tersedianya design yang responsive gender  Manfaat : Bangunan yang belum responsive gender belum dapat dimanfaatkan oleh kelompok gender	- Terbatasnya info persyaratan bangunan yang responsive gender - Keterbatasan anggaran	Terbatasnya info persyaratan bangunan yang responsive gender - Keterbatasan anggaran - musrembang sentral, tetapi untuk menghadirkan mereka sulit	lansia, disabilitas	- Melakukan advokasi pentingnya bangunan yang responsive gender sesuai dengan permenpu - Membangunan/ redesign toilet untuk L dan P, penyandang disabilitas - Menyediakan ruang laktasi - Menyediakan dan membangun akses bagi pemakai kursi roda - Menyediakan taman pentipan anak	- Musrembang yang dilaksanakan : diikuti oleh .... Laki-laki, .... - Perempuan, .... Lansia, .... Disabilitas, .... Forum anak (minimal tiga tahu	Output ..... Outcome : .....

Sungai Dareh,

Maret 2020

KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



Ir. JUNAEADI YUNUS

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19630929 199803 1 003

FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)														
SKPD TAHUN ANGGARAN	: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG : 2021													
PROGRAM	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR													
KODE PROGRAM	1.03 . 1.03.01 . 02													
KEGIATAN	Pembangunan Gedung Kantor													
HASIL/OUTPUT														
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- persentase perangkat daerah memiliki gedung kantor yang representative</li> </ul> <p>2. Isuduan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>Akses: Belum tersedianya design yang responsive gender</p> <p>Manfaat :</p> <p>Bangunan yang belum responsive gender belum dapat dimanfaatkan oleh kelompok gender</p> <p>a. Penyebab Internal Terbatasnya info persyaratan bangunan yang responsive gender</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan anggaran</li> </ul> <p>b. Penyebab Eksternal Terbatasnya info persyaratan bangunan yang responsive gender</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan anggaran</li> <li>- musrembang sentral, tetapi untuk menghadirkan mereka sulit</li> </ul>													
RENCANA AKSI	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3">Komponen/ Aktifitas 1</td> <td colspan="2">- Melakukan advokasi pentingnya bangunan yang responsive gender sesuai dengan permenpu</td> </tr> <tr> <td colspan="2">- Membangunan/ redesign toilet untuk L dan P, penyandang disabilitas</td> </tr> <tr> <td>Tujuan</td> <td>lansia, disabilitas</td> </tr> <tr> <td>Alokasi Anggaran</td> <td colspan="2">Rp. 250.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>Total anggaran</td> <td colspan="2">Rp. 250.000.000,-</td> </tr> </table>	Komponen/ Aktifitas 1	- Melakukan advokasi pentingnya bangunan yang responsive gender sesuai dengan permenpu		- Membangunan/ redesign toilet untuk L dan P, penyandang disabilitas		Tujuan	lansia, disabilitas	Alokasi Anggaran	Rp. 250.000.000,-		Total anggaran	Rp. 250.000.000,-	
	Komponen/ Aktifitas 1		- Melakukan advokasi pentingnya bangunan yang responsive gender sesuai dengan permenpu											
			- Membangunan/ redesign toilet untuk L dan P, penyandang disabilitas											
		Tujuan	lansia, disabilitas											
Alokasi Anggaran	Rp. 250.000.000,-													
Total anggaran	Rp. 250.000.000,-													
CAPAIAN PROGRAM	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor yang representatif													

Sungai Dareh, Maret 2020

KEPALA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



**Ir. JUNAEDI YUNUS**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19630929 199803 1 003

Tim Verifikasi

<p>Inspektur</p> <p><b>KANDAM, S.Sos</b> NIP.196706071991031004</p>	<p>KEPALA BKD</p> <p><b>PARYANTO, S.Sos, M.T</b> NIP.196906091989021001</p>	<p>Kepala Bappeda</p> <p><b>Drs. ANDY SUMANTO, Cfra</b> NIP.196812201990091001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPI</p> <p><b>BOBBY P RIZA, S.STP, M.SI</b> NIP.198205212000121002</p>
---	---	--	---



Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	ISU GENDER		Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator
			Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal				
	sebagai pendamping kekerasan j. Tersedianya P2TP2A dan LK3 sebagai wadah konsultasi							perempuan anak di Kal Dharmasra

Kandam, S.Sos  
NIP. 19670607 199203 1 004

Palyanto, S.Sos; M.T  
NIP. 10690609 198902 1 001

Drs. Andy Sumanto, CFA  
NIP. 19681220 199009 1 001

Bobby P. Riza, S.STP, M.Si  
NIP. 19820521 200012 1 002

Inspektur

Kepala BKD

Kepala Bappeda

Kepala Dinas SOS3APPKB

Tim Verifikasi

Bobby P. Riza, S.STP, M.Si  
NIP. 19820521 200012 1 002

Pulau Penjung, Maret 2020  
Kepala Dinas SOS3APPKB



**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

**SKPD : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (SOSP3APPKB)**  
**TAHUN ANGGARAN : 2021**

<b>PROGRAM</b>	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		
<b>KODE PROGRAM</b>	2.02.1.06.01.17		
<b>KEGIATAN</b>	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan		
<b>HASIL/OUTPUT</b>	Menurunnya tingkat kekerasan pada perempuan dan anak		
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</b>            Dari data tahun 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah KDRT yang melapor 5 orang</li> <li>b. Jumlah perempuan korban kekerasan 14 orang</li> <li>c. Jumlah anak korban kekerasan 14 orang laki-laki (14,3%) dan perempuan (85,7%)</li> <li>d. Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) sebanyak 12 terdiri dari               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ABH sebagai pelaku laki-laki 9 orang (100%)</li> <li>2) ABH sebagai saksi laki-laki 2 orang (100%)</li> <li>3) ABH sebagai korban 1 orang (100%)</li> </ol> </li> <li>e. Diversi tingkat penyidik laki-laki 8 orang (100%) dan pembinaan di Lapas laki-laki 1 orang (100%)</li> <li>f. 2 orang psikolog dan 2 orang peksos sebagai pendamping kekerasan dan tersedianya P2TP2A dan LK3 sebagai wadah konsultasi</li> </ol> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Faktor Kesenjangan Kontrol                Masih ada keluarga yang tidak mau melaporkan anaknya sebagai korban kekerasan</li> <li>b. Penyebab Internal                Penyebab internal terjadinya kesenjangan ini adalah kurangnya promosi tentang stop kekerasan pada perempuan dan anak serta adanya lembaga yang melindungi perempuan anak dari kekerasan</li> <li>c. Penyebab Eksternal                Masyarakat masih beranggapan bahwa KDRT urusan domestik rumah tangga masing-masing sehingga tidak boleh ikut campur dan masih merasa malu/tabu jika melaporkan kekerasan pada perempuan dan anak</li> </ol>		
<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Komponen/ Aktifitas 1</b>	Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	
		<b>Tujuan</b>	Meningkatnya pengetahuan anggota P2TP2A dan Masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak
		<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 60.000.000,-
	<b>Komponen/ aktifitas 2</b>	Pendampingan kasus oleh psikolog	
		<b>Tujuan</b>	Berkurangnya trauma yang dialami korban
		<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 10.000.000,-
<b>Total anggaran</b>		Rp. 70.000.000,-	

<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menurunnya KDRT dari 5 orang menjadi 2 orang</li> <li>- Menurunnya korban kekerasan pada perempuan dari 14 orang menjadi 8 orang</li> <li>- Menurunnya anak korban kekerasan dari 14 orang menjadi 8 orang</li> <li>- Menurunnya ABH pelaku dari 9 orang menjadi 5 orang</li> </ul> <p>Out Come: Menurunnya tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kab. Dharmasraya</p>
------------------------	---

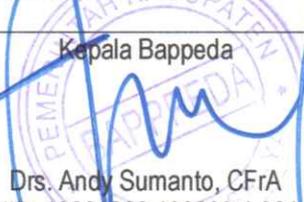
Pulau Punjung, Maret 2020

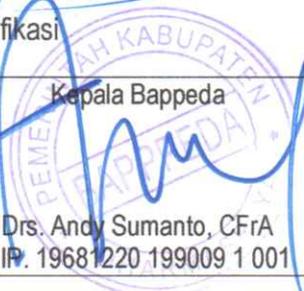
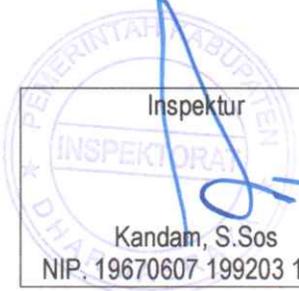
Kepala Dinas SOSP3APPKB

Bobby P. Riza, S.STP, M.Si  
NIP. 198205212006121002



Tim Verifikasi

<p>Inspektur</p>  <p>Kadam, S.Sos NIP. 19670607 199203 1 004</p>	<p>Kepala BKD</p>  <p>Paryanto, S.Sos, M.T NIP. 10690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Bappeda</p>  <p>Drs. Andy Sumanto, CFrA NIP. 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala Dinas SOSP3APPKB</p>  <p>Bobby P. Riza, S.STP, M.Si NIP. 198205212006121002</p>
--	---	---	---



Kabupaten Dharmasraya		
Tahun Anggaran 2019		
Urusan Pemerintahan	1,01	Urusa Wajib Pelayanan Dasar
Organisasi	1.01.06.02	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
Program	2.02.1.06.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Kegiatan	2.02.1.06.01.17.08	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
Lokasi Kegiatan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana	
Jumlah Tahun n-1	Rp.	
Jumlah Tahun n	Rp.	
Jumlah Tahun n + 1	Rp.	

Indikator	TOLAK UKUR KINERJA	TARGET
Masukan	Jumlah Dana	70.000.000
Keluaran	Memfasilitasi upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan serta ketahanan keluarga	80%
Hasil	Terfasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	80%
Manfaat	Terfasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	80%
Dampak	Tercapainya perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga	50%

Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	( Rp )
1	2	3	4	5	6 = ( 3x5)
5	<b>BELANJA</b>				<b>70.000.000</b>
5 2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>70.000.000</b>
5 2 1	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>70.000.000</b>
5 2 1 01	<b>Honorarium PNS</b>				<b>9.000.000</b>
5 2 2 01 26	<b>Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Wasit/Juri/Pelatih/So</b> <b>plr</b>				<b>9.000.000</b>
	Honor narasumber provinsi	2	org	1.000.000	2.000.000
	Honor narasumber provinsi Non ASN	3	keg	1.500.000	4.500.000
	Honor narasumber kabupaten	4	org	500.000	2.000.000
	Honor pembawa acara	1	org	150.000	150.000
	Honor pembaca doa	1	org	150.000	150.000
	Moderator	1	org	200.000	200.000
5 2 2 01	<b>Belanja bahan pakai habis</b>				<b>1.935.000</b>
5 2 2 01 06	<b>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas</b>				<b>1.935.000</b>
	BBM Premium	300	liter	6.450	1.935.000
5 2 2 03	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				<b>11.800.000</b>
5 2 2 03 18	<b>Belanja jasa Dekorasi</b>				<b>300.000</b>
	Pembuatan Spanduk	1	buah	300.000	300.000
5 2 2 03 24	<b>Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Instruktur</b>				<b>10.000.000</b>
	Honor Pendamping Kasus	20	kasus	500.000	10.000.000
5 2 2 03 31	<b>Belanja jasa pengganti transportasi</b>				<b>1.500.000</b>
	transportasi narasumber luar daerah	5	org	300.000	1.500.000
5 2 2 07	<b>Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/ Parkir</b>				<b>3.700.000</b>
5 2 2 07 02	<b>Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ tempat</b>				<b>3.700.000</b>
	sewa penginapan Narasumber	2	hr	350.000	700.000
	Sewa gedung pertemuan	2	hr	1.500.000	3.000.000
5 2 2 11	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>9.000.000</b>
5 2 2 11 02	<b>Belanja Makan dan Minum Rapat</b>				<b>900.000</b>
	Makan minum rapat	30	bks	30.000	900.000
5 2 2 11 06	<b>Belanja Makan dan Minum Penunjang Kegiatan</b>				<b>8.100.000</b>
	Makan Minum sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak	270	bks	30.000	8.100.000
5 2 2 15	<b>Belanja perjalanan dinas</b>				<b>34.565.000</b>
5 2 2 15 01	<b>Belanja perjalanan dinas dalam daerah</b>				<b>10.565.000</b>
		1	th	10.565.000	
5 2 2 15 02	<b>Belanja perjalanan dinas Luar daerah</b>				<b>24.000.000</b>
		1	th	24.000.000	
<b>Jumlah</b>					<b>70.000.000</b>

Pulau Pinang

**Bobby Perdana Dize, S.TP, M.Si**  
NIP. 19820521 200012 1 002

Keterangan  
Tanggal Pembahasan  
Catatan Hasil Pembahasan

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (SOSP3APPKB)

PROGRAM : Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak

Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	
	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN			PENGUKURAN HASI			
Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator			
<p><b>Program :</b> Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak</p> <p><b>Kegiatan :</b> Pembentukan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA)</p> <p><b>Tujuan :</b> Terciptanya Kabupaten Dhamasraya Layak Anak</p>	<p>a. Pada Tahun 2019 Kabupaten Dhamasraya mendapatkan KLA untuk Kategori pratama</p> <p>b. Jumlah puskesmas ramah anak sebanyak 6 (42,8%)</p> <p>c. Jumlah sekolah ramah anak 26 (12,9%)</p> <p>d. Jumlah Kecamatan yang memiliki forum anak (63,6%)</p> <p>e. Jumlah anak korban kekerasan 14 orang laki-laki (14,3%) dan perempuan (85,7%)</p> <p>f. ABH pelaku laki-laki 9 orang (100%)</p>	<p><b>Partisipasi</b> Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam KLA</p> <p><b>Manfaat</b> Belum semua anak mendapatkan manfaat kabupaten layak anak</p>	<p>- Kemampuan petugas dalam mengkampanyekan KLA masih terbatas</p>	<p>- Masih kurangnya partisipasi dunia usaha dalam mendukung KLA</p> <p>- Masih kurangnya forum anak di tingkat kecamatan</p> <p>- Tidak tersedianya ruang bermain ramah anak</p>	<p>Terciptanya Kabupaten Dhamasraya Layak Anak</p>	<p>- Pembentukan Asosiasi Perusahaannya Sahabat Anak Indonesia (APSAI)</p> <p>- Pelatihan Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan</p> <p>- Sosialisasi puskesmas dan sekolah ramah anak</p> <p>- Pembangunan ruang bermain ramah anak</p>	<p>a. Jumlah puskesmas ramah anak sebanyak 6 (42,8%)</p> <p>b. 7 (Jumlah sekolah ramah anak 26 (12,9%))</p> <p>c. Jumlah Kecamatan yang memiliki forum anak 63,6%</p> <p>d. Jumlah anak korban kekerasan 14 orang laki-laki (14,3%) dan perempuan (85,7%)</p> <p>e. ABH pelaku laki-laki 9 orang (100%)</p>	<p>Output</p> <p>- Terbentuknya APSA Kabudhamasraya</p> <p>- Berdiri Forum Anak</p> <p>- Meningkatkan keca 63,6%</p> <p>- Meningkatkan jumlah puskesmas ramah anak 42,8%</p> <p>- Meningkatkan jumlah korban kekerasan 50%</p> <p>- Menurunkan jumlah ABH pelaku laki-laki 9 orang</p>		<p>- Tersedianya ruang bermain ramah</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9		
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	ISU GENDER		Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator
										Outcome Terciptan Kabupate Anak kate madya

Tim Verifikasi

**Inspektur**

Kandam, S.Sos  
NIP. 19670607 199203 1 004

**Kepala BKD**

Paryanto, S.Sos, M.T  
NIP. 10690609 198902 1 001

**Kepala Bappeda**

Drs. Andy Sumanto, CFTA  
NIP. 19681220 199009 1 001

**Kepala Dinas SOSPPPKB**

Pulau Pupjung, Maret 2020  
Kepala Dinas SOSPPPKB  
Bobby P. Riza, S.STP, M.Si  
NIP. 19820521 200012 1 002

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

**SKPD : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (SOSP3APPKB)**  
**TAHUN ANGGARAN : 2021**

<b>PROGRAM</b>	Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak		
<b>KODE PROGRAM</b>	1.06.01.15		
<b>KEGIATAN</b>	Pembentukan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA)		
<b>HASIL/OUTPUT</b>	Terciptanya Kabupaten Dharmasraya Layak Anak		
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</b></p> <p>a. Pada Tahun 2019 Kabupaten Dharmasraya mendapatkan KLA untuk Kategori pratama</p> <p>b. Jumlah puskesmas ramah anak sebanyak 6 (42,8%)</p> <p>c. Jumlah sekolah ramah anak 26 (12,9%)</p> <p>d. Jumlah Kecamatan yang memiliki forum anak (63,6%)</p> <p>e. Jumlah anak korban kekerasan 14 orang laki-laki (14,3%) dan perempuan (85,7%)</p> <p>f. ABH pelaku laki-laki 9 orang (100%)</p> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam KLA</li> <li>- Manfaat Belum semua anak mendapatkan manfaat kabupaten layak anak</li> </ul> <p>b. Penyebab Internal Penyebab internal terjadinya kesenjangan ini adalah masih kurangnya kemampuan petugas dalam mengkampanyekan KLA.</p> <p>c. Penyebab Eksternal Penyebab eksternal terjadinya kesenjangan ini adalah masih kurangnya partisipasi dunia usaha dalam mendukung KLA, masih kurangnya forum anak di tingkat kecamatan dan tidak tersedianya ruang bermain ramah anak.</p>		
<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Komponen/ Aktifitas 1</b>	Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)	
		<b>Tujuan</b>	Terbentuknya APSAI di Kab. Daharmasraya
		<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 20.000.000,-
	<b>Komponen/ aktifitas 2</b>	Pelatihan Forum Anak Kabupaten dan Kecamatan	
		<b>Tujuan</b>	Meningkatnya pengetahuan forum anak
		<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 40.000.000,-
	<b>Komponen/ aktifitas 3</b>	Sosialisasi puskesmas dan sekolah ramah anak	
		<b>Tujuan</b>	Terbentuknya puskesmas dan sekolah ramah anak
		<b>Alokai Anggaran</b>	Rp. 40.000.000,-
	<b>Komponen/ aktifitas 4</b>	Pembangunan ruang bermain anak	
<b>Tujuan</b>		terbentuknya ruang bermain ramah anak	
<b>Alokasi Anggaran</b>		Rp. 150.000.000,-	
<b>Total anggaran</b>		Rp. 250.000.000,-	

<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbentuknya APSAI di Kabupaten Dharmasraya</li> <li>- Bertambahnya Forum anak di kecamatan dari 63,6% menjadi 100%)</li> <li>- Meningkatkan jumlah puskesmas ramah anak dari 42,8% menjadi 50%</li> <li>- Meningkatkan sekolah ramah anak dari 12,9% menjadi 25%</li> <li>- Tersedianya ruang bermain ramah anak</li> </ul>
------------------------	---

	Out Come: Terciptanya Kabupaten Layak Anak kategori Nidya
--	--

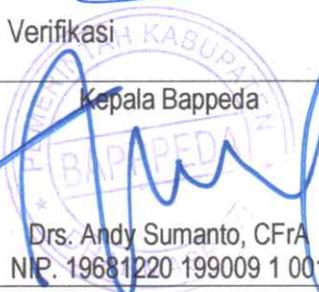
Pulau Punjung, Maret 2020

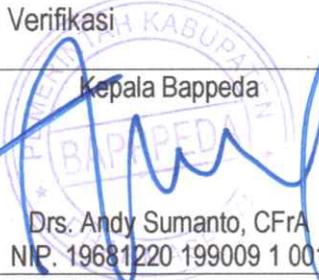
Kepala Dinas SOSP3APPKB

Bobby P. Riza, S.STP, M.Si  
NIP. 1982052112000121002



Tim Verifikasi

Inspektur   Kadam, S.Sos NIP. 19670607 199203 1 004	Kepala BKD   Paryanto, S.Sos, M.T NIP. 10690609 198902 1 001	Kepala Bappeda   Drs. Andy Sumanto, C.FrA NIP. 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas SOSP3APPKB   Bobby P. Riza, S.STP, M.Si NIP. 19820521 200012 1 002
--	---	--	--





**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021**

RKA - SKPD.2.2.1

Urusan Pemerintahan	1.06	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
Organisasi	1.06.01	Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB ( Dinas SOS3APPKB )				
Program	1.06.01.15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Perempuan dan Anak				
Kegiatan	1.06.01.15.06	Pembentukan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak				
Waktu Pelaksanaan	01-01-2021 sampai dengan 31-12-2021					
Lokasi Kegiatan	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & KB					
Sumber Dana						
Jumlah Tahun n-1	Rp.					
Jumlah Tahun n	Rp.					250.000.000
Jumlah Tahun n + 1	Rp.					
<b>Indikator</b>		<b>Tolak Ukur Kinerja</b>				
Capaian Program	Terpenuhi dan terlindunginya hak-hak anak di Kabupaten Dharmasraya secara layak					50%
Masukan	Jumlah Dana					250.000.000
Keluaran	mensinergikan Peran Anak agar mampu berperan dalam segala Bidang Urusan Pemerintahan					80%
Hasil	Terbentuknya Kabupaten Dharmasraya yang Layak Anak					80%
Kelompok Sasaran	Anak Usia dibawah 18 th					
Kegiatan						
Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
KODE REKENING	URAIAN	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)	
		Volume	Satuan	Harga Satuan		
5	1 BELANJA	3	4	5	6 = 3 x 5	
5	2 BELANJA LANGSUNG				250.000.000	
5	2 1 BELANJA BARANG DAN JASA				7.500.000	
5	2 1 01 Honorarium PNS				7.500.000	
5	2 2 01 Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber/wasit/juri/pelatih	26				
5	2 2 Belanja Barang dan Jasa				92.500.000	

5	2	2	01	06	Belanja Bahan Pakai Habis					3.437.850
5	2	2	01	06	Belanja bahan bakar minyak/gas					3.437.850
					BBM Premium	533	liter	6.450		3.437.850
5	2	2	03	12	Belanja Jasa Kantor					10.400.000
5	2	2	03	12	Belanja transportasi dan akomodasi					10.400.000
					Transportasi Narasumber Luar Daerah	3	org	300.000		900.000
					Transportasi Pelatihan 2P Forum Anak Kabupaten	80	oh	50.000		4.000.000
					Transportasi Pelatihan 2P Forum Anak Kecamatan	220	oh	25.000		5.500.000
					Transportasi Forum Anak dalam rangka Rapat Kerja	100	oh	50.000		5.000.000
5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan					4.500.000
5	2	2	06	01	Belanja Cetak:					4.500.000
					Pembuatan Spanduk	15	buah	300.000		4.500.000
5	2	2	07		Belanja sewa rumah /Gedung/Gudang/Parkir					11.050.000
5	2	2	07	02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat					1.200.000
					Sewa Penginapan nara sumber Sosialisasi Sekolah Ramah Anak (TK/RA, MI, MTs)	1	hari	400.000		400.000
					Sewa Penginapan nara sumber APSAI	1	hari	400.000		400.000
					Sewa Penginapan nara sumber Pelatihan 2P Forum Anak Kabupaten	1	hari	400.000		400.000
5	2	2	07	03	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan					9.850.000
					Sewa ruang pertemuan Sosialisasi Sekolah Ramah Anak	1	hari	2.000.000		2.000.000
					Sewa ruang pertemuan kegiatan Pembentukan APSAI	1	hari	2.000.000		2.000.000
					Sewa ruang pertemuan Pelatihan 2P Forum Anak Kabupaten Dharmasraya	1	hari	2.000.000		2.000.000
					Sewa ruang pertemuan pelatihan 2P Forum Anak Kecamatan	11	hari	350.000		3.850.000
5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman					23.100.000
5	2	2	11	05	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					23.100.000
					Makan minum rapat GT KLA	120	pkt	30.000		3.600.000
					Makan minum sosialisasi sekolah ramah anak (TK/RA, MI, MTs)	50	pkt	30.000		1.500.000
					Makan minum rapat kerja forum anak	100	pkt	30.000		3.000.000
					Makan minum kegiatan Pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI)	50	pkt	30.000		1.500.000
					Makan Minum Pelatihan 2P Forum Anak Kecamatan	330	pkt	30.000		9.900.000
					Makan Minum Pelatihan 2P Forum Anak Kabupaten	80	pkt	30.000		2.400.000
					Makan Minum Pembinaan Puskesmas Ramah Anak	40	pkt	30.000		1.200.000
5	2	2	15		Belanja perjalanan dinas					40.012.150
5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah					15.012.150
					Belanja perjalanan dinas Luar daerah	1	tahun	15.012.150		15.012.150
5	2	2	15	02	Belanja perjalanan dinas Luar daerah					25.000.000

5	2	2	031	35	Belanja Modal			1	tahun	25.000.000	25.000.000
					Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak			1	Paket	150.000.000	150.000.000
										250.000.000	

Pulau Pungung, 11 Maret 2020

KEPALA

DINAS SOSIAL DAN KEBUDUKITAN  
 KABUPATEN KABUPATEN  
 PANGKAJENE NEARU  
 KABUPATEN KABUPATEN  
 PANGKAJENE NEARU

Bobby K Riva S. STP, M. Si  
 NIP. 19820521-200012 1 002

Keterangan

Tanggal Pengesahan

Catatan Hasil Pembahasan

1											
2											
3											
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH											
NO	N A M A					I	J A B A T A N				T A N D A T A N G A N
1											
2											
3											
4											
5											
6											

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

KPPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (SOSP3APPKB)

PROGRAM : Keluarga Berencana

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	
<p><b>Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan</b></p> <p><b>Program :</b> Keluarga Berencana</p> <p><b>Kegiatan :</b> Kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi KB</p> <p><b>Tujuan :</b> Meningkatkan tingkatnya ikutsertaan laki-laki ber-KB</p>	<p><b>Data Pembuka Wawasan</b></p> <p>a. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 2019 sebanyak 43.849</p> <p>b. Jumlah peserta KB aktif perempuan 95,7% dan laki-laki 0,12%</p> <p>c. Jumlah peserta KB baru perempuan 92,9% dan laki-laki 7%</p> <p>d. Alat kontrasepsi peserta KB aktif yang digunakan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IUD = 5,1%</li> <li>- MOW = 3,7%</li> <li>- MOP = 0,12%</li> <li>- Kondom = 4,19%</li> <li>- Implant = 21,8%</li> <li>- Suntik = 49,9%</li> <li>- Pil = 15,2%</li> </ul> <p>e. Alat kontrasepsi peserta KB baru</p>	<p><b>Faktor Kesenjangan</b></p> <p><b>Partisipasi</b> Masih banyak Laki-laki yang belum mau menggunakan alat kontrasepsi</p> <p><b>Manfaat</b> Masih banyak laki-laki tidak mendapatkan manfaat ber-KB</p>	<p><b>ISU GENDER</b></p> <p><b>Sebab Kesenjangan Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya promosi tentang manfaat kontrasepsi bagi laki-laki</li> <li>- Kemampuan PLKB dalam mengajak laki-laki untuk ikut pelayanan pemasangan kontrasepsi KB</li> </ul> <p><b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat masih beranggapan bahwa yang lebih berhak menggunakan alat kontrasepsi adalah perempuan bukan laki-laki.</li> <li>- Masyarakat masih beranggapan bahwa jika laki-laki ber-KB cenderung untuk selingkuh</li> </ul>			<p><b>Reformulasi Tujuan</b></p> <p>Meningkatnya keikutsertaan laki-laki ber-KB</p>	<p><b>Rencana Aksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Advokasi dan KIE pada Lintas sektoral</li> <li>- Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat alat kontrasepsi bagi laki-laki</li> <li>- Pelatihan tentang komunikasi efektif untuk PLKB</li> <li>- Pelayanan KB pada laki-laki</li> </ul>	<p><b>Basis Data (Base-Line)</b></p> <p>a. Jumlah peserta KB aktif perempuan 95,7% dan laki-laki 0,12%</p> <p>b. Jumlah peserta KB baru perempuan 92,9% dan laki-laki 7%</p>	<p><b>Indikator</b></p> <p>Output : - Mening peserta laki-laki 0,12% - Mending peserta laki-laki menjadi 2%</p> <p>Outcome Menurun kelahiran Dhammasr</p>
			<p><b>KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN</b></p>	<p><b>PENGUKURAN HASIL</b></p>					

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Mawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL		
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator	
	yang digunakan adalah: - IUD = 4,3% - MOW = 1,9% - MOP = 0,07% - Kondom = 6,9% - Implant = 20,4% - Suntik = 48,1% - Pil = 18,1%								

Tim Verifikasi

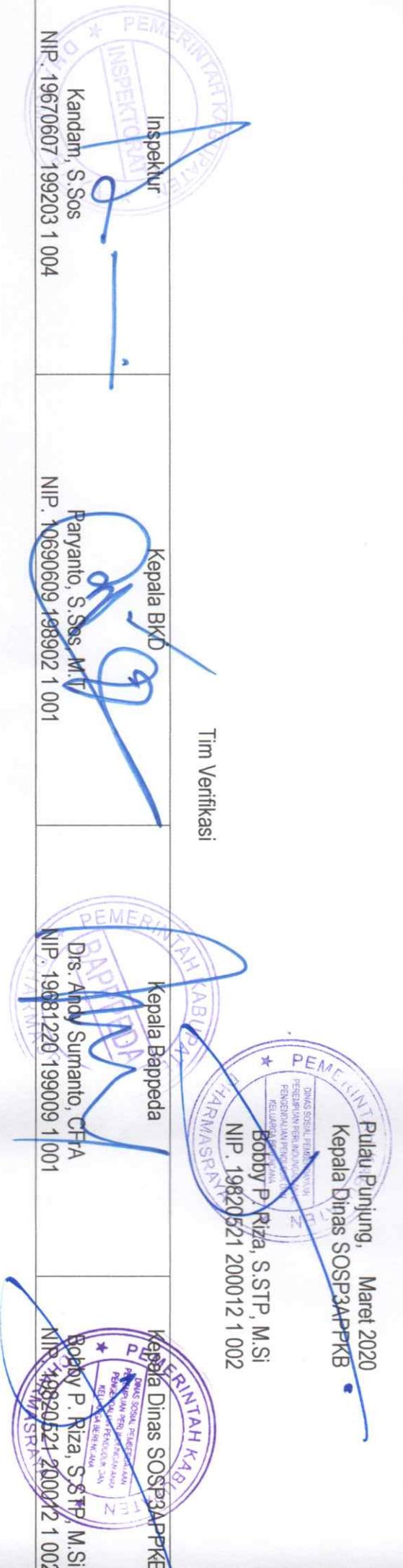
Inspektur  
Kandam, S.Sos  
NIP. 19670607 199203 1 004

Kepala BKD  
Paryanto, S.Sos, M.T  
NIP. 10690609 198902 1 001

Kepala Bappeda  
Drs. Andy Sumanto, CHA  
NIP. 19681220 199009 1 001

Kepala Dinas SOSPPPKB  
Bobby P. Riza, S.STP, M.Si  
NIP. 19820521 200012 1 002

Pulau Pinjung, Maret 2020  
Kepala Dinas SOSPPPKB



**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

**SKPD : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (SOSP3APPKB)**  
**TAHUN ANGGARAN : 2021**

<b>PROGRAM</b>	Keluarga Berencana		
<b>KODE PROGRAM</b>	(Kode Program sesuai RKA SKPD)		
<b>KEGIATAN</b>	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB		
<b>HASIL/OUTPUT</b>	Meningkatnya keikutsertaan laki-laki ber-KB		
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</b> Pasangan Usia Subur di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 sebanyak 43.849 dengan jumlah peserta KB aktif perempuan sebanyak 95,7%, laki-laki sebanyak 0,12%, untuk peserta KB baru perempuan 92,9% sedangkan laki-laki sebanyak 7%. Dari data tersebut dapat diambil kesimpulan sudah terjadi kesenjangan gender dalam kegiatan pelayanan pemasangan kontrasepsi KB, dimana peserta KB aktif maupun baru lebih banyak perempuan dibanding laki-laki.</p> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi Masih rendahnya partisipasi laki-laki dalam menggunakan alat kontrasepsi dibandingkan perempuan.</li> <li>- Manfaat Dari segi manfaat pelayanan KB, laki-laki masih kurang mendapatkan manfaat dibandingkan perempuan</li> </ul> <p>b. Penyebab Internal Penyebab internal terjadinya kesenjangan ini adalah kurangnya promosi tentang manfaat kontrasepsi bagi laki-laki dan kemampuan yang dimiliki PLKB dalam mengajak laki-laki untuk ikut pelayanan pemasangan kontrasepsi KB masih kurang.</p> <p>c. Penyebab Eksternal Masih adanya budaya di dalam masyarakat yang dapat mengambat laki-laki untuk menggunakan alat kontrasepsi antara lain masyarakat masih beranggapan bahwa yang lebih berhak menggunakan alat kontrasepsi adalah perempuan bukan laki-laki dan jika laki-laki ber-KB cenderung untuk selingkuh.</p>		
<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Komponen/ Aktifitas 1</b>	Advokasi dan KIE pada lintas sektoral	
		<b>Tujuan</b>	Meningkatnya pengetahuan dan dukungan dari lintas sektoral
		<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 30.250.000,-
	<b>Komponen/ aktifitas 2</b>	Sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat alat kontrasepsi bagi laki-laki	
		<b>Tujuan</b>	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat alat kontrasepsi laki-laki
		<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 30.250.000,-

	<b>Komponen/ aktifitas 3</b>	Pelatihan tentang komunikasi efektif untuk PLKB	
		<b>Tujuan</b>	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan PLKB dalam mengajak laki-laki ber-KB
		<b>Alokai Anggaran</b>	Rp. 30.250.000,-
	<b>Komponen/ aktifitas 4</b>	Pelayanan KB pada laki-laki	
		<b>Tujuan</b>	Meningkatnya pelayanan KB bagi laki-laki
		<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 30.250.000,-
<b>Total anggaran</b>		Rp. 121.000.000,-	
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	Output : - Meningkatnya peserta KB aktif laki-laki dari 0,12% menjadi 2% - Meningkatnya peserta KB baru laki-laki dari 7% menjadi 10%  Out Come: Menurunnya angka kelahiran di Kab. Dharmasraya		

Pulau Punjung, Maret 2020

Kepala Dinas SOSP3APPKB

Bobby P. Riza, S.STP, M.Si  
NIP. 19820521 200012 1 002

Tim Verifikasi

Inspektur  Kandam, S.Sos NIP. 19670607 199203 1 004	Kepala BKD  Paryanto, S.Sos, M.T NIP. 10690609 198902 1 001	Kepala Bappeda  Drs. Andy Sumanto, CFA NIP. 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas SOSP3APPKB  Bobby P. Riza, S.STP, M.Si NIP. 19820521 200012 1 002
--	--	--	---



# RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TA. 2021

**Formulir  
RKA-SKPD 2.2.1**

**TA. 2021**

<b>Urusan Pemerintahan</b>	: 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
<b>Organisasi</b>	: 1.01.06.02 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>Program</b>	: 1.02.08.1.01.06.16 Keluarga Berencana
<b>Kegiatan</b>	: 1.02.08.1.01.06.02.16.27 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
<b>Lokasi Kegiatan</b>	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

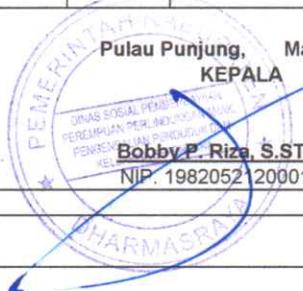
### Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
<b>Pencapaian Program</b>	: Lintas sektor terkait, calon akseptor KB	
<b>Masukan</b>	: Dana yang tersedia	
<b>Keluaran</b>	: Terlaksananya Advokasi KIE pada lintas sektoral dan pelayanan KB di Kab. Dharmasraya	Rp 121.000.000 3 Kegiatan ( KKG PKK, IBI, TMKK)
<b>Hasil</b>	: Tercapainya PPM peserta KB baru dan terbinanya peserta KB aktif	6500 PA
<b>Manfaat</b>	: Menurunnya angka kelahiran	5%
<b>Dampak</b>	: Terkendalinya pertumbuhan penduduk di daerah	5%

### ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER KEGIATAN

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
5 2	BELANJA LANGSUNG				Rp 121.000.000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				Rp 97.200.000
5 2 2 01	Belanja Bahan Pakai Habis				Rp 5.047.000
5 2 2 01 06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas				Rp 5.047.000
	BBM	980	liter	5.150	Rp 5.047.000
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				Rp 1.875.000
5 2 2 03 17	Belanja Dekorasi				Rp 625.000
	Dokumentasi	5	rol	125.000	Rp 625.000
5 2 2 03 18	Belanja Dekorasi				Rp 1.250.000
	Spanduk	5	ls	250.000	Rp 1.250.000
5 2 2 03 13	Biaya jasa Pengganti Transportasi				Rp 22.000.000
	Transportasi operasional penyuluhan Program Bangsa Kencana	220	OH	50.000,00	Rp 11.000.000
	Transportasi bimbingan terpadu ( Bindu)	220	oh	50.000,00	Rp 11.000.000
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				Rp 3.000.000
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				Rp 3.000.000
	Foto copy	10.000	lbr	300	Rp 3.000.000
5 2 2 10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				Rp 2.893.000
5 2 2 10 05	Belanja sewa tenda				Rp 2.000.000
	Sewa tenda + kursi pencahangan KB-KES IBI Tk. Kab. Dharmasraya	1	kl	2.000.000	Rp 2.000.000
5 2 2 10 07	Belanja sewa sound system				Rp 893.000
	Sewa sound system	1	kl	893.000	Rp 893.000
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				Rp 38.125.000
5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				Rp 7.000.000
	Mami rapat persiapan pencahangan Bhakti IBI-KB-KES Tk. Kab. Dharmasraya	30	org	25.000	Rp 750.000
	Mami rapat persiapan pencahangan TNI-KB-KES Tk. Kab. Dharmasraya	30	org	25.000	Rp 750.000
	Konsumsi bimbingan terpadu (BINDU)	220	bks	25.000	Rp 5.500.000
5 2 2 11 05	Belanja Makanan dan Minuman Penunjang Kegiatan				Rp 31.125.000
	Makan dan minum pelaksanaan pelayanan (3 keg x 10 kec x 30 org )	900	org	25.000	Rp 22.500.000
	Makan dan Minum pencahangan ( TNI-KB-KES )	50	org	25.000	Rp 1.250.000
	Makan dan Minum pencahangan Bhakti Sosial IBI KB-KES Tk. Kab. Dharmasraya	75	org	25.000	Rp 1.875.000
	Konsumsi operasional penyuluhan Program Bangsa Kencana	220	bks	25.000	Rp 5.500.000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				Rp 24.260.000
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah				Rp 13.560.000
	Ess. II	4	oh	300.000	Rp 1.200.000
	Ess. III	18	oh	225.000	Rp 4.050.000
	Ess. IV	17	oh	200.000	Rp 3.400.000
	Gol III	12	oh	175.000	Rp 2.100.000
	Gol. II	12	oh	150.000	Rp 1.800.000
	Sopir	10	oh	100.000	Rp 1.000.000

5	2	2	15	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah					Rp	10.710.000
					Luar Daerah dalam Provinsi					Rp	10.710.000
					Uang Harian					Rp	10.710.000
					Ess. II	2	oh	425.000,00		Rp	850.000
					Ess. III	4	oh	375.000,00		Rp	1.500.000
					Ess. IV	10	oh	350.000,00		Rp	3.500.000
					Gol III	10	oh	300.000,00		Rp	3.000.000
					Gol. II	6	oh	250.000,00		Rp	1.500.000
					Sopir	2	oh	180.000,00		Rp	360.000
5	2	2	25		<b>HONORARIUM / UPAH</b>					Rp	23.800.000
5	2	2	25	01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber					Rp	23.800.000
					K3 Pelayanan ( 3 x 10 kec )	30	kali	50.000		Rp	1.500.000
					K3 Pencanaan ( IBI, TMKK)	1	paket	300.000		Rp	300.000
					Honorarium narasumber bimbingan terpadu ( BINDU)	44	ok	250.000,00		Rp	11.000.000
					Honorarium narasumber operasional penyuluhan Program Bangga Kencana	44	ok	250.000,00		Rp	11.000.000

				
Keterangan				
Tanggal Pembahasan				
Cattan Hasil Pembahasan				
1.				
2.				
3.				
Tim Anggaran Pemerintah Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tandatangan
1				
2				
3				
4				

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SIKPPD : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (SOSP3APPKB)

PROGRAM : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

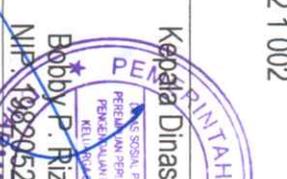
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	ISU GENDER		Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
						Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal				
<b>Program :</b> Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.		<b>Data Pembuka Wawasan</b> a. SAD hidup secara nomaden dengan mata pencaharian berburu dan mencari tumbuh-tumbuhan b. Hidup sebagai suku minoritas dan miskin yang memerlukan bimbingan dan bantuan c. Terdapat di Kecamatan IX Koto dan Koto Besar berjumlah 19 KK (77 jiwa) terdiri dari 43 laki-laki dan 34 perempuan d. Kabupaten Dharmasraya sudah memiliki Tim Rencana Aksi Daerah dalam melakukan pembinaan SAD	<b>Partisipasi</b> SAD masih sulit bergabung dengan masyarakat	- Kemampuan SDM dalam melakukan pembinaan - Sarana dan prasarana dalam melakukan pembinaan	Hidup secara nomaden menyebabkan SAD sulit mendapatkan kehidupan yang layak	Terbentuknya Usaha Ekonomi Produktif (UEP) SAD	- Rapat Tim Rencana Aksi Daerah - Desiminasi Informasi SAD Kabupaten Dharmasraya ke SAD Muaro Bungo - Bantuan UEP untuk SAD		a. Hidup sebagai suku minoritas dan miskin yang memerlukan bimbingan dan bantuan b. Terdapat di Kecamatan IX Koto dan Koto Besar berjumlah 19 KK (77 jiwa) terdiri dari 43 laki-laki dan 34 perempuan	Output : - Terbebas dari kemiskinan - Usaha Produktif SAD s.d. meningkatkan kesejahteraan	
											<b>Faktor Kesenjangan</b>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	ISU GENDER		KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator
			Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal				


  
 Inspektur  
 Kandarni, S.Sos  
 NIP. 19670607 199203 1 004


  
 Kepala BKD  
 Paryanto, S.Sos, MT  
 NIP. 10690609 198902 1 001


  
 Kepala Bappeda  
 Drs. Andy Sumanto, CFIA  
 NIP. 19681220 199009 1 001


  
 Kepala Dinas SOS3APPKE  
 Bobby P. Riza, S.STP, M.Si  
 NIP. 19820521 200012 1 002

Tim Verifikasi  
  

  
 Pulau Purijung, Maret 2020  
 Kepala Dinas SOS3APPKB  
 Bobby P. Riza, S.STP, M.Si  
 NIP. 19820521 200012 1 002

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD

: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (SOSP3APPKB)

TAHUN ANGGARAN

: 2021

<b>PROGRAM</b>	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya		
<b>KODE PROGRAM</b>			
<b>KEGIATAN</b>	Pembinaan Suku Anak Dalam (SAD)		
<b>HASIL/OUTPUT</b>	Terbentuknya Usaha Ekonomi Produktif (UEP) SAD		
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</b> Suku anak dalam biasa disebut dengan suku kubu atau anak rimba terdapat di Kecamatan XI Koto dan Koto Besar berjumlah 19 KK (77 jiwa) yang terdiri dari 43 laki-laki dan 34 perempuan. Mereka hidup secara nomaden dengan mata pencaharian berburu dan mencari tumbuh-tumbuhan dan sebagai suku minoritas yang miskin menyebabkan mereka memerlukan bimbingan dan bantuan, namun demikian di Kabupaten Dharmasraya sudah memiliki Tim Rencana Aksi Daerah untuk melakukan pembinaan kepada SAD.</p> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partisipasi SAD masih sulit bergabung dengan masyarakat</li> <li>- Kontrol Semua keputusan ada pada ketua rombongan</li> <li>- Manfaat SAD belum mendapatkan manfaat dari pembinaan petugas</li> </ul> <p>b. Penyebab Internal Penyebab internal terjadinya kesenjangan ini karena masih kurangnya kemampuan SDM dalam melakukan pembinaan dan sarana serta prasaran yang dimiliki masih sangat kurang sehingga sulit menjangkau lokasi SAD.</p> <p>c. Penyebab Eksternal Hidup secara nomaden menyebabkan SAD sulit mendapatkan kehidupan yang layak</p>		
<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Komponen/ Aktifitas 1</b>	Rapat Tim Rencana Aksi Daerah	
		<b>Tujuan</b>	Terbentuknya kesepakatan
		<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 1.560.000,-
	<b>Komponen/ aktifitas 2</b>	Desiminasi Informasi SAD Kabupaten Dharmasraya ke SAD Muaro Bungo	
		<b>Tujuan</b>	Meningkatnya pengetahuan SAD Kabupaten Dharmasraya dalam pengelolaan UEP
		<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 22.444.550,-
	<b>Komponen/ aktifitas 3</b>	Bantuan UEP untuk SAD	
		<b>Tujuan</b>	Terbentuknya 2 kelompok UEP SAD di Kabupaten Dharmasraya
		<b>Alokai Anggaran</b>	Rp. 26.000.000,-
	<b>Total anggaran</b>		Rp. 50.004.550,-
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<p>Output :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya pengetahuan SAD</li> <li>- Terbentuknya Usaha Ekonomi Produktif (UEP) SAD sebanyak 2 kelompok</li> </ul>		

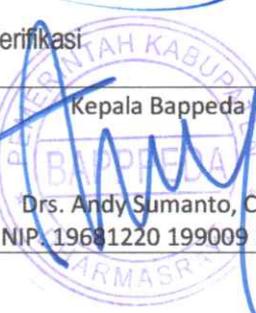
Out Come:  
Meningkatnya pendapatan SAD

Pulau Punjung, Maret 2020

Kepala Dinas SOSP3APPKB

Bobby P. Riza, S.STP, M.Si  
NIP. 19820521 200012 1 002

Tim Verifikasi

<p>Inspektur</p>  <p>Kadam, S.Sos NIP. 19670607 199203 1 004</p>	<p>Kepala BKD</p>  <p>Paryanto, S.Sos, M.T NIP. 10690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Bappeda</p>  <p>Drs. Andy Sumanto, CFA NIP. 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala Dinas SOSP3APPKB</p>  <p>Bobby P. Riza, S.STP, M.Si NIP. 19820521 200012 1 002</p>
---	--	---	---



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**Formulir  
RKA-OPD 2.2.1**

Urusan Pemerintahan	1.06.1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Organisasi	1.06.1.06.01 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & KB
Program	1.06.1.06.01.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Kegiatan	1.06.1.06.01.15.01 Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pempamping sosial
Lokasi Kegiatan	Kabupaten Dharmasraya
Jumlah Tahun n-1	Rp. 0
Jumlah Tahun n	50.004.550
Jumlah Tahun n+1	Rp. 0

**Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung**

Indikator	Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Pencapaian Program	Jumlah SAD yang diberi UEP	100%
Masukan	Jumlah dana	<b>50.004.550</b>
Keluaran	Terlatihnya SAD dalam mengelola UEP	12 bulan
Hasil	Terbentuknya UEP SAD	2 kelompok

Kel. Sasaran Keg.	SAD (Suku Anak Dalam)
-------------------	-----------------------

**Rincian Anggaran Belanja Langsung  
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	5	6=(3x5)
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>50.004.550</b>
<b>5 2</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>50.004.550</b>
<b>5 2 2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>50.004.550</b>
<b>5 2 2 01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>2.444.550</b>
5 2 2 01 06	Belanja Bahan bakar minyak/gas sarana mobilitas				2.444.550
	- BBM	379	Ltr	6.450	2.444.550
5 2 2 03 31	Belanja jasa pengganti transportasi				<b>3.000.000</b>
	- Bantuan transportasi peserta pertemuan	60	OT	50.000	3.000.000
<b>5 2 2 11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				<b>1.560.000</b>
5 2 2 11 02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat				1.560.000
	- Makan	60	bks	18.000	1.080.000
	- Minum	60	bks	8.000	480.000
<b>5 2 2 15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>17.000.000</b>
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	pkt	2.000.000	2.000.000
5 2 2 15 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	1	pkt	15.000.000	15.000.000
	<b>Bantuan yang diberikan</b>				<b>26.000.000</b>
	Bantuan UEP untuk SAD	2	paket	13.000.000	26.000.000
<b>Jumlah</b>					<b>50.004.550</b>

**Rencana Penarikan dana Per Triwulan**

Pulau Punjung, Maret 2020  
Kepala Dinas Sosial, PP, Perlindungan Anak  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

**BOBBY P. RIZA, S.STP. M.Si.**  
NIP. 19820521 200012 1 002

Keterangan :  
Tanggal Pembahasan :  
Catatan Hasil Pembahasan :  
1.  
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

### MATTRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROGRAM : Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>Nama Kebijakan/Program/Kegiatan</b>	<b>Data Pembuka Wawasan</b>	<b>Faktor Kesenjangan</b>	<b>ISU GENDER</b>	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>	<b>Reformulasi Tujuan</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Basis Data (Base-Line)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
Program : Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah aparatur atau pengelola pelayanan perizinan	Akses: Masih Kurangnya fasilitas pelayanan perizinan yang responsif gender baik untuk pemohon yang umum maupun yang pernyandang Disabilitas	Sebab Kesenjangan Internal - kurangnya pemahaman pengelola pelayanan perizinan dengan OPD terkait maupun dengan pengelola pelayanan perizinan di tingkat provinsi	- Koordinasi lintas sector yang masi belum optimal	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan perizinan	Meningkatkan kompetensi dan kemampuan aparatur atau pengelola pelayanan perizinan dengan cara mengalokasikan dana untuk mengikuti pelatihan dan bintek baik yang diadakan oleh provinsi maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).	Tercapainya Target izin yang telah di rencanakan	Input : Melakukan sharing atau study banding ke daerah yang sudah mendapat predikat terbaik dalam hal pelayanan perizinan agar dapat menyerap ilmunya untuk diterapkan di Kab. Dharmasraya. Output : Meningkatkan pemahamannya pengelola pelayanan perizinan
<b>Kegiatan :</b> Penyediaan prosedur perizinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Tersedianya fasilitas pelayanan perizinan yang memadal yang responsive gender baik yang umum maupun yang pernyandang Disabilitas	Partisipasi: Kurangnya sosialisasi tentang perizinan kepada masyarakat atau pelaku usaha.						
<b>Tujuan :</b> Penertiban dokumen perizinan dan nonperizinan terpadu		<b>Manfaat :</b> meningkatnya pengetahuan tentang perizinan bagi masyarakat atau pelaku usaha.						

Sikabau, Maret 2020  
Kepala Dinas PMP TSP

Dinas Perencanaan  
dan Pembangunan  
MOP dan PMP  
TSP  
Naldi, S.STP, M.Si.  
Perubira Tk. I (V/b)  
NIP. 19820411 200012 1 002

Tim Verifikasi

 Inspektur KANDAM, S.Sos NIP. 19670607 199103 1 004	 Kepala BKD Paryanto, S.Sos, M.T NIP. 19690609 198902 2 001	 Kepala Bappeda Drs. Anir Sumanto, CFA NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala Dinas Sosial PSA PPKB BOBYP RIZA, S.STP, M.Si NIP. 19820921 200012 1 002
--	--	---	--



**GENDER BUDGET STATEMENT  
(Pernyataan Anggaran Gender)**

SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
TAHUN ANGGARAN : 2021

<b>PROGRAM</b>	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		
<b>KODE PROGRAM</b>			
<b>KEGIATAN</b>	Penyederhanaan Prosedur Perizinan Dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal		
<b>HASIL/OUTPUT</b>	Penerbitan Dokumen Perizinan Dan Nonperizinan Terpadu		
<b>ANALISA SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</b> Jumlah aparatur atau pengelola pelayanan perizinan</p> <p>Tersedianya fasilitas pelayanan perizinan yang memadai yang responsive gender baik yang untuk pemohon yang umum maupun yang penyandang Disabilitas</p> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p><b>a. Faktor Kesenjangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih Kurangnya fasilitas pelayanan perizinan yang responsif gender baik yang untuk pemohon yang umum maupun yang penyandang Disabilitas</li> </ul> <p><b>b. Penyebab Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• kurangnya pemahaman pengelola pelayanan perizinan</li> <li>• Kurangnya koordinasi dengan OPD terkait maupun dengan pengelola pelayanan perizinan di tingkat propinsi</li> </ul> <p><b>c. Penyebab Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi lintas sector yang masih belum optimal</li> </ul>		
<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Kegiatan</b> 1	Meningkatkan kompetensi dan kemampuan aparatur atau pengelola pelayanan perizinan dengan cara mengalokasikan dana untuk mengikuti pelatihan dan bimtek baik yang diadakan oleh provinsi maupun Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).	
		<table border="1"> <tr> <td>Tujuan</td> <td>Tercapainya Target izin yang telah di rencanakan</td> </tr> </table>	Tujuan
	Tujuan	Tercapainya Target izin yang telah di rencanakan	
<b>Indikator Output</b>	Meningkatnya pemahaman pengelola pelayanan perizinan		

Sikabau, Maret 2020

**PI. KEPALA DINAS PMPTSP**



**NALDI. S.STP.,M.Si.**

RebinaTk.I (IV/b)

NIP. 19820411 200012 1 002

**Tim Verifikasi**

<p>Inspektur</p>  <p><b>KANDAM. S.Sos</b> NIP 19670607 199103 1 004</p>	<p>Kepala BKD</p>  <p><b>Paryanto. S.Sos.M.T</b> NIP 19640609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Bappeda</p>  <p><b>Drs. Andy Sumanto, CFA</b> NIP 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial PPKB</p>  <p><b>BOBBY RIZA, S.STP.M.Si</b> NIP 19820521 200012 1 002</p>
--	---	---	--

**MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

OPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PROGRAM : Kualitas dan Peningkatan Produktivitas

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan</b>	<b>Data Pembuka Wawasan</b>	<b>Faktor Kesenjangan</b>	<b>ISU GENDER</b>	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>	<b>Reformulasi Tujuan</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Basis Data (Base-Line)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>Program : Kualitas dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja</b>	Jml Angkatan Kerja laki2 70.324 pr. 36.689 Yg bekerja laki2 64.28% pr. 32.03% Pengangguran lk 1,44 pr. 2,26	Akses: * kuato pelatihan * Anggaran bim memadai Partisipasi: - Jumlah Pengangguran yang dibina laki2 1,44% dan Perempuan 2,26%	*Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas untuk menampung dan meningkatkan keberdayaan peserta pelatihan *masih belum adanya kerjasama dengan pihak swasta yang mau menerima /mempekerjakan peserta pelatihan *tidak adanya tindak lanjut setelah kegiatan tersebut dilakukan	*Rendahnya motivasi peserta perempuan *Tidak adanya penampungn bagi peserta untuk mendapatkan pekerjaan	Meningkatkan keterampilan bagi angkatan kerja dan mengurangi kerentanan ekonomi	*Dengan Instansi melakukan perakuan peserta pelatihan *Melakukan identifikasi peserta pelatihan berdasarkan jenis kelamin, usia *Meningkatkan sarana dan prasarana sehingga kegiatan yang dilakukan dapat maksimal *memberikan motivasi dan pengertian kepada peserta	- peserta yang akan mengikuti pelatihan berjumlah 800 orang dari keseluruhan dengan satu paket kegiatan 16 orang	Out put *Jumlah angkatan kerja yang mengikuti pelatihan Outcome *meningkatkan kompetensi peserta pelatihan *jumlah tenaga kerja yang terampil dan kompeten sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahtera
<b>Tujuan : Menyediakan Tenaga Kerja yg Kompeten, Produktif dan berdaya saing tinggi</b>		Manfaat : Jenis Pembinaan yang diberikan berupa Pendidikan dan Pelatihan						

Maret 2020

Pulau Pinjung,  
Pjt, Kepala Dinas



MARTEN YUNUS, S.Kom., M.Eng  
Pembina Tk. I/ IV b  
NIP. 19740821 200212 1 001

VERIFIKASI KEGIATAN

<p>Inspektur KANDAM, S.Sos NIP. 196706071991031004</p>	<p>KEPALA BKD PARYANTO, S.Sos.M.T. NIP. 196906094989021001</p>	<p>Kepala Bappeda Drs. ANDY SUMANTO, CTA NIP. 196812201990091001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB BOBBY P RIZANS, STP, M.Si NIP. 1982092120000721007</p>
--	--	--	--

## GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja  
TAHUN ANGGARAN : 2021

<b>PROGRAM</b>	Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga kerja							
<b>KEGIATAN</b>	Pendidikan dan Keterampilan bagi Pencari Kerja							
<b>KODE KEGIATAN</b>	14.15							
<b>ANALISA SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</b> Jika dilihat dari angkatan kerja dengan jumlah 107.013 yang bekerja laki-laki 64,28% dan Perempuan 32,03% sedangkan yang pengangguran laki laki 1,44% perempuan 2,26%, Maka dengan adanya kegiatan pelatihan bagi pencari kerja bahwasanya kaum perempuan juga memiliki peran yang baik dan bahkan juga bisa berwirausaha agar tidak terjadi ketimpangan atau kesenjangan gender. Dalam kegiatan ini terbentuk 800 orang dari jumlah keseluruhan dengan satu kali tahapan berjumlah 16 orang per kegiatan.</p> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p><b>a. Faktor Kesenjangan</b></p> <p><b>Akses:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuota pelatihan</li> <li>- Anggaran belum memadai</li> </ul> <p><b>Partisipasi:</b> Jumlah Pengangguran yang dibina laki laki 1,44% dan perempuan 2,26%</p> <p><b>Control:</b> Jumlah Pengangguran yang ada di Dharmasraya</p> <p><b>Manfaat :</b> Anggapan bahwa pelatihan ini hanya bermanfaat bagi kaum laki-laki</p> <p><b>b. Penyebab Internal</b> Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas untuk menampung dan meningkatkan keberdayaan peserta pelatihan.</p> <p><b>c. Penyebab Eksternal</b> Rendahnya motivasi peserta perempuan dan tidak adanya penampungan bagi peserta untuk mendapatkan pekerjaan.</p>							
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<p><b>1. Tolak Ukur</b> Jumlah Dana sebesar Rp. 5.000.000.000,-</p> <p><b>2. Indikator dan Target Kinerja</b></p> <p><b>Input :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengusulan dana untuk mengangkat kegiatan tersebut sebesar Rp. 5.000.000.000,-</li> </ul> <p><b>Output:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasilnya terciptanya tenaga kerja yang berkomptensi yang mengikuti pelatihan</li> </ul> <p><b>Outcome :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angkatan kerja mempunyai kemampuan dengan keahlian keterampilan, sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahterah lagi.</li> </ul>							
<b>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</b>	Rp. 5,000,000,000,- ( Lima Milyar Rupiah )							
<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Kegiatan 1</b>	<p>Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp.5,000,000,000,- untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Masukan</td> <td>Rp. 5,000,000,000,-</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td>Kegiatan pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja</td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td>Terciptanya angkatan kerja yang mempunyai keahlian dan keterampilan sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat</td> </tr> </table>	Masukan	Rp. 5,000,000,000,-	Keluaran	Kegiatan pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja	Hasil	Terciptanya angkatan kerja yang mempunyai keahlian dan keterampilan sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat
Masukan	Rp. 5,000,000,000,-							
Keluaran	Kegiatan pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja							
Hasil	Terciptanya angkatan kerja yang mempunyai keahlian dan keterampilan sehingga meningkatnya perekonomian masyarakat							

REKAM BUDGET 2020  
Peningkatan Anggaran

Pulau Punjung, Maret 2020  
Kepala  
Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja  
Kabupaten Dharmasraya



MARTEN YUNUS, S.Nom.,M.Eng  
Pembina TK I, IV/b  
NIP.19740821 200212 1 001

VERIFIKASI KEGIATAN

<p>Inspektur</p>  <p>KANDAM, S.Sos NIP.196706071991031004</p>	<p>KEPALA BKD</p>  <p>PARYANTO, S.Sos, M.T NIP.196906091989021001</p>	<p>Kepala Bappeda</p>  <p>Drs. ANDY SUMANTO, CfrA NIP. 196812201990091001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB</p>  <p>BOBBY R RIZA, S.STP, M.Si NIP.198205212000121802</p>
--	--	---	---

# Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

: Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kategori Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Minat dan Keterampilan	Jumlah layanan perpustakaan keliling, sekolah, nagari, TBM, Mesjid	<p><b>Akses:</b> Kurang tersedianya sarana dan prasarana layanan</p> <p><b>Partisipasi:</b> Kurang orang berkunjung ke perpustakaan</p> <p><b>Control:</b> Koleksi buku yang tidak sesuai dengan kebutuhan pemustaka</p> <p><b>Manfaat :</b> masyarakat cerdas dan berkualitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang baca perpustakaan yang kurang memadai.</li> <li>- Masih kurangnya Judul/koleksi buku pada Perpustakaan</li> <li>- Kurang nyaminat baca di tingkat Sekolah dan Masyarakat</li> </ul>	<p>Minat Baca Laki-laki memang kurang di sebabkan karena,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemajuan Teknologi ( dimana terdapat banyak hal- hal yang lebih menarik dari pada membaca seperti permainan )</li> </ul>	Meningkatkan minat budaya baca	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Sosialisasi tentang mamfaat perpustakaan kepada masyarakat yang lebih intersif</li> <li>- Menambah koleksi buku perpustakaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Kunjungan tahun 2019 Total 460 orang</li> <li>Pria 138 orang</li> <li>Wanita 322 orang</li> <li>Jumlah Anggota Perpustakaan 2019 Total 713</li> <li>Pria 268 orang</li> <li>Wanita 445 orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Output Jumlah pemustaka sekolah, nagari</li> <li>-Outcome Meningkatnya kunjungan ke perpustakaan</li> </ul>

Pulau Punjung, 26 Maret 2020

Kepala,

(Drs. Irsyad, MM)

Pembina utamamuda / IV.c

NIP. 19630810 199003 1 003

Tim Verifikasi

Inspektur

Kepala BKD

Kepala Bappeda

Kepala Dinas Sosial P3A PPKB

Kandam, S.Sos

Paryanto, S.Sos, MT

Drs. Andy Sumanto, Cfra

Bobby P Riza S.STP, Msi

Nip.196706071991031004

Nip.196908091989021001

Nip.196812201990091001

Nip.198205212000121002

## GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TAHUN ANGGARAN : 2021

PROGRAM	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	
KODE PROGRAM	2.18.2.17.01.21	
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah layanan perpustakaan keliling, sekolah, nagari, TBM, Masjid</li> </ul>	
ANALISA SITUASI	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender	
	<p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kurang tersedianya sarana dan prasarana layanan</li> <li>➤ Kurangnya orang berkunjung ke perpustakaan</li> </ul> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Ruang baca perpustakaan yang belum memadai.</li> <li>➤ Masih kurangnya Judul/koleksi buku pada Perpustakaan</li> </ul> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kemajuan Teknologi</li> </ul>	
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur: Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca	
	2. Indikator dan Target Kinerja : Jumlah pemustaka sekolah, nagari / 18.000 orang	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 239.482.000 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Melakukan perpustakaan keliling
		Masukan Rp. 102.015.000,-
		Keluaran Jumlah pemustaka sekolah, nagari
		Hasil Peningkatan Partisipasi Minat dan Budaya Baca
	Kegiatan 1	Lomba Bercerita Tingkat SD / MI
		Masukan Rp. 52.288.900,-
		Keluaran Bertambahnya jumlah minat dan budaya baca
		Hasil Meningkatnya pengunjung perpustakaan

Pulau Punjung, Maret 2020

Kepala,

(Drs. H. Syad, MM)  
DPRM Muda / IV.c  
NIP. 19630810 199003 1 003

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas Sosial P3A
Kamdarn, S.Sos Nip. 196706071991031004	Paryanto, S.Sos, MT Nip. 196306091989021001	Drs. Andi Sumanto, CfrA Nip. 196812201990091001	Bobby P. Riza S.STP, Msi Nip. 198205212000121002

## Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

: Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Kategori Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
Administrasi	- Jumlah pengelola arsip Perangkat Daerah yang mengikuti bimtek	<b>Akses:</b> - Belum tersedianya SDM yang handal	- Keterbatasan anggaran	- Kurangnya pemahaman tentang pentingnya arsip	Terbinanya pengelola arsip laki-laki dan perempuan yang handal, komprehensif dan terpadu	- Melaksanakan bimtek kearsipan bagi pengelola arsip nagari	Bimtek kearsipan yang akan dilaksanakan diikuti oleh pengelola arsip laki-laki dan perempuan sebanyak 52 orang	-Output Jumlah SDM, pengelola arsip Nagari yang memperoleh bimtek kearsipan  -Outcome Arsip nagari dikelola dengan baik
Kearsipan	Perempuan dari pada Laki laki, karena Perempuan lebih menguasai tentang Pengelolaan Kearsipan	<b>Partisipasi:</b> - Adanya pembatasan jenis kelamin laki-laki dan perempuan <b>Control:</b> - Data pengelola arsip yang mengikuti bimtek kearsipan <b>Manfaat :</b> - Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip dengan baik						
Data pasitas								
daerah								

Pulau Punjung, 26 Maret 2020

Kepala,

(Drs. Irsyad, MM)

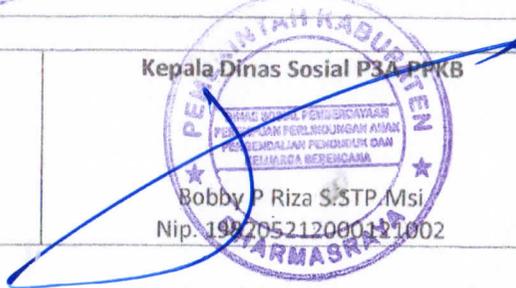
Pembina utamamuda / IV.c

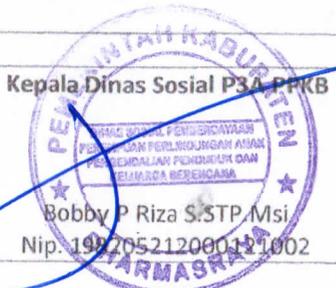
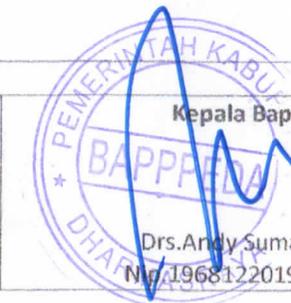
NIP. 19630810 199003 1 003

  
Inspektur  
Kamdam, S.Sos  
Nip. 196706071991031004

  
Kepala BKD  
Payanto, S.Sos, MM  
Nip. 196906091980021001

  
Kepala Bappppeda  
Drs. Andy Sumanto, CfrA  
Nip. 196812201990091001

  
Kepala Dinas Sosial P3A-PPKB  
Bobby P Riza S.STP, Msi  
Nip. 199205212000121002



## GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

TAHUN ANGGARAN : 2021

PROGRAM	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	
KODE PROGRAM	2.18.2.17.01.15	
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Jumlah pengelola arsip Perangkat Daerah yang mengikuti bimtek Laki laki dan perempuan</li> </ul>	
ANALISA SITUASI	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender	
	a. Faktor Kesenjangan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Belum tersedianya SDM yang handal</li> </ul>	
	b. Penyebab internal	
ANALISA SITUASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Keterbatasan anggaran</li> </ul>	
	c. Penyebab Eksternal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kurangnya pemahaman tentang pentingnya arsip</li> </ul>	
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur: Pengelola arsip Perangkat Daerah yang memahami aturan kearsipan	
	2. Indikator dan Target Kinerja :Jumlah SDM Pengelola Arsip Perangkat Daerah yang memperoleh pembinaan kearsipan melalui Bimtek Pengelolaan kearsipan/ 52 orang	
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp.160.836.000 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Melaksanakan Bimtek Pengelolaan Kearsipan dan Pelaporan Kearsipan
		Masukan Rp. 100.000.000
		Keluaran Jumlah SDM Pengelola Arsip Perangkat Daerah yang memperoleh pembinaan kearsipan melalui Bimtek Pengelolaan kearsipan
		Hasil Meningkatnya SDM pengelola kearsipan
	Kegiatan 2	Melakukan Monitoring Evaluasi
		Masukan Rp. 50.000.000,-
		Keluaran Jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Arsip secara Baku.
		Hasil Arsip tertata sesuai dengan aturan yang berlaku

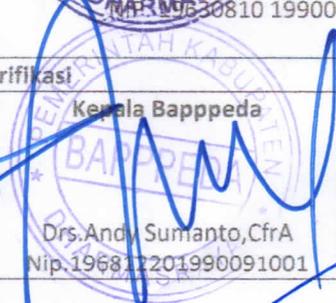
Pulau Punjung, Maret 2020

Kepala,

(Drs. Irsyad, MM)

Pembina Utama muda / IV.c

M. 19810308101990031003

 Inspektur Kamdani, S.Sos Nip.196706071991031004	 Kepala BKD Parwanto, S.Sos, MT Nip.196906091989021001	Tim Verifikasi  Kepala Bappeda Drs. Andy Sumanto, CfrA Nip.196812201990091001	 Kepala Dinas Sosial P3A Bobby Riza S.STR, Msi Nip. 198309212000121002
--	--	---	--

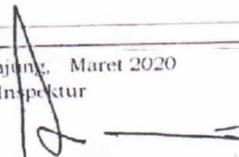
**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**  
Inspektorat Kab. Dharmasraya

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>Program :</b> Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan  <b>Kegiatan:</b> Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa & Aparatur  <b>Tujuan :</b> Agar diklat dapat diikuti oleh APIP sesuai kebutuhan organisasi sekaligus mempertimbangkan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan	<b>Data Pembuka Wawasan</b>  * Jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 28 orang yang terdiri 15 orang laki-laki dan 13 perempuan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
		* akses : Diklat yang dilaksanakan pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 2 hari dengan lokasi pelaksanaan diklat yang jauh dari Daerah Kabupaten Dharmasraya sehingga menyulitkan bagi APIP terutama yang perempuan karena harus meninggalkan keluarga terutama yang hamil atau ibu menyusui  * Tidak semua APIP dapat melakukan pekerjaan pemeriksaan terutama untuk kegiatan fisik konstruksi di lapangan sehingga yang bisa melakukan secara profesional adalah	* Peran ganda APIP perempuan yang bekerja di kantor dan bekerja sebagai ibu rumah tangga  * Adanya perbedaan dalam latar belakang pendidikan dan kemampuan	* Lokasi penyelenggaraan diklat yang jauh dari Kabupaten Dharmasraya dan jangka waktu pelaksanaan yang relatif lama	Pelaksanaan diklat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan keikutsertaan laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan lamanya diklat serta lokasi pelaksanaan diklat	Memetakan diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sehingga diklat yang akan diikuti telah memperhatikan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pengetahuan serta memperhatikan lama pelaksanaan diklat serta lokasi dilaksanakannya diklat tersebut	Jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 28 orang yang terdiri 15 orang laki-laki dan 13 perempuan	Output: Diikutnya diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sesuai kebutuhan organisasi.  Outcome: Semua APIP mampu melaksanakan pengawasan sesuai program/ kegiatan yang ada



# FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)		
SKPD	: Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya	
TAHUN ANGGARAN	: 2021	
PROGRAM	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	
KODE PROGRAM	3.07.3.07.01.05.01	
KEGIATAN	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala/ pemeriksaan rutin	
HASIL/OUTPUT	Tersusunnya tim pemeriksaan sesuai kebutuhan objek pemeriksaan	
ANALISIS SITUASI	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah APIP pada Inspektorat Kab. Dharmasraya sebanyak 28 orang, yang terdiri dari 15 orang laki laki dan 13 orang perempuan.</li> </ul> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan anggota tim pemeriksaan dilakukan secara acak dan lokasi objek pemeriksaan yang cenderung jauh sehingga terdapat kemungkinan wanita hamil/menyusui dengan APIP yang sudah tua /sering sakit dalam satu tim dan mendapatkan lokasi obrik yang jauh sehingga menyulitkan dalam pemeriksaan fisik</li> <li>b. Adanya perbedaan dalam latar belakang pendidikan dan kemampuan dalam melakukan pemeriksaan rutin/berkala maupun cek fisik</li> <li>c. Lokasi objek pemeriksaan yang cenderung jauh dan membutuhkan pemeriksaan fisik</li> </ol>	
RENCANA AKSI	<b>Komponen/ Aktifitas 1</b>	Penyusunan tim pemeriksaan disesuaikan dengan kebutuhan dengan keikutsertaan laki-laki dan perempuan
	<b>Tujuan</b>	Tersusunnya tim pemeriksaan sesuai kebutuhan objek pemeriksaan
	<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 1.500.000.000,-
CAPAIAN PROGRAM	Terlaksananya pengawasan internal sesuai PKPT	

Pulau Punjung, Maret 2020  
Inspektur  
  
Kandam, S.Sos  
NIP.19670607 199103 1 004

**TIM VERIFIKASI**

 Inspektur Kandam, S.Sos NIP.19670607 199103 1 004	 Kepala BKD Daryanto, S.Sos, MT NIP.19690609 198002 1 001	 Kepala Bappeda Des. Andy Sumanto, CRA NIP.19681220 199009 1 001	 Kepala Dirsos, I.A.A.PP&U Bobby T. K. G. SSTP, M.Si NIP.19800521 200012 1 001
--	---	---	--

Kep  
  
Bob  
NIP.1

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**  
**Inspektorat Kab. Dharmasraya**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>Program :</b> <b>Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>  <b>Kegiatan:</b> <b>Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa &amp; Aparatur</b>  <b>Tujuan :</b> Agar diklat dapat diikuti oleh APIP sesuai kebutuhan organisasi sekaligus mempertimbangkan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan	<b>Data Pembuka Wawasan</b>  * Jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 28 orang yang terdiri 15 orang laki-laki dan 13 perempuan	<b>Isu Gender</b>			<b>Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan</b>		<b>Monitoring</b>	
		<b>Faktor Kesenjangan</b>	<b>Sebab Kesenjangan Internal</b>	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>	<b>Reformulasi Tujuan</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Data Dasar (Baseline)</b>	<b>Indikator Gender</b>
		*akses : Diklat yang dilaksanakan pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 2 hari dengan lokasi pelaksanaan diklat yang jauh dari Daerah Kabupaten Dharmasraya sehingga menyulitkan bagi APIP terutama yang perempuan karena harus meninggalkan keluarga terutama yang hamil atau ibu menyusui  * Tidak semua APIP dapat melakukan pekerjaan pemeriksaan terutama untuk kegiatan fisik konstruksi di lapangan sehingga yang bisa melakukan secara profesional adalah	* Peran ganda APIP perempuan yang bekerja di kantor dan bekerja sebagai ibu rumah tangga  * Adanya perbedaan dalam latar belakang pendidikan dan kemampuan	* Lokasi penyelenggaraan diklat yang jauh dari Kabupaten Dharmasraya dan jangka waktu pelaksanaan yang relatif lama	Pelaksanaan diklat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan keikutsertaan laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan lamanya diklat serta lokasi pelaksanaan diklat	Memetakan diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sehingga diklat yang akan diikuti telah memperhatikan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pengetahuan serta memperhatikan lama pelaksanaan diklat serta lokasi dilaksanakannya diklat tersebut	Jumlah APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebanyak 28 orang yang terdiri 15 orang laki-laki dan 13 perempuan	Output: Diikutinya diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sesuai kebutuhan organisasi.  Outcome: Semua APIP mampu melaksanakan pengawasan sesuai program/ kegiatan yang ada

APIP dengan latar belakang pendidikan teknik sipil yang umumnya tidak dimiliki oleh APIP perempuan, sedangkan semua APIP dituntut dapat bekerja pada semua bidang/ program/ kegiatan

Pulau Punjung, Maret 2020  
Inspektur

Kandam, S.Sos  
NIP.19670607 199103 1 004

**TIM VERIFIKASI**

Inspektur

Kandam, S.Sos  
NIP.19670607 199103 1 004

Kepala BKD

Faryanto, S.Sos, MT  
NIP.19690609 198902 1 001

Kepala Bappeda

Drs. Anty Sumanto, CfrA  
NIP.19681220 199009 1 001

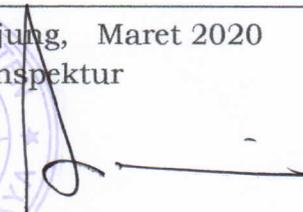
Kepala Dinsos, PSA, PPKB

Bobby P. Rizki Satrio, M. Si  
NIP.19820521 200012 1 002

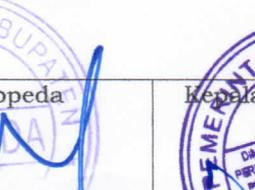
# FORMAT GBS

<b>PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)</b>		
<b>SKPD TAHUN ANGGARAN</b>	<b>: Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya : 2021</b>	
<b>PROGRAM</b>	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	
<b>KODE PROGRAM</b>	3.07.3.07.01.05.01	
<b>KEGIATAN</b>	Pelatihan dan pengembangan tenaga pemeriksa & Aparatur	
<b>HASIL/OUTPUT</b>	Diikutinya diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sesuai kebutuhan organisasi	
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah APIP pada Inspektorat Kab. Dharmasraya sebanyak 28 orang, yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 13 orang perempuan.</li> <li>• Terdapat perbedaan latar belakang pendidikan dan kemampuan APIP, sedangkan APIP dituntut untuk mampu melakukan pengawasan pada semua bidang, program/kegiatan</li> </ul> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Diklat yang dilaksanakan pada umumnya membutuhkan waktu lebih dari 2 hari dengan lokasi pelaksanaan diklat yang jauh dari Daerah Kabupaten Dharmasraya sehingga menyulitkan bagi APIP terutama yang perempuan karena harus meninggalkan keluarga terutama yang hamil atau ibu menyusui</li> <li>b. Tidak semua APIP dapat melakukan pekerjaan pemeriksaan terutama untuk kegiatan fisik konstruksi di lapangan sehingga yang bisa melakukan secara profesional adalah APIP dengan latar belakang pendidikan teknik sipil yang umumnya tidak dimiliki oleh APIP perempuan, sedangkan semua APIP dituntut dapat bekerja pada semua bidang/ program/ kegiatan</li> <li>c. Peran ganda APIP perempuan yang bekerja di kantor dan bekerja sebagai ibu rumah tangga</li> <li>d. Adanya perbedaan dalam latar belakang pendidikan dan kemampuan</li> <li>e. Lokasi penyelenggaraan diklat yang jauh dari Kabupaten Dharmasraya dan jangka waktu pelaksanaan yang relatif lama</li> </ol>	
<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Komponen/ Aktifitas 1</b>	Memetakan diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sehingga diklat yang akan diikuti telah memperhatikan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pengetahuan serta memperhatikan lama pelaksanaan diklat

		serta lokasi dilaksanakannya diklat tersebut
	<b>Tujuan</b>	Agar diklat dapat diikuti oleh APIP sesuai kebutuhan organisasi sekaligus mempertimbangkan kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan
	<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 550.000.000,-
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	Diikutinya diklat yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan sesuai kebutuhan organisasi	

Pulau Punjung, Maret 2020  
 Inspektur  
  
 Kandang, S.Sos  
 NIP.19670607 199103 1 004

**TIM VERIFIKASI**

 Inspektur Kandang, S.Sos NIP.19670607 199103 1 004	 Kepala BKD Paryanto, S.Sos, MT NIP.19690609 198902 1 001	 Kepala Bappeda Drs. Andy Sumanto, CfrA NIP.19681220 199009 1 001	 Kepala Dinsos, P3A, PKB Bobby P. Riza, SSTP, M.Si NIP.19820521 200012 1 002
--	--	---	---

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>Pilih Kebijakan/ Program/ Penerangan Agama Islam</b>  <b>Kegiatan yang akan dianalisis.</b> <b>Pembinaan Penyuluh Agama Islam</b>  <b>Identifikasi tujuannya</b> <b>Peningkatan SDM Penyuluh Agama Islam</b>	<b>Data Pembuka Wawasan</b>  <i>-Jumlah Penyuluh Agama Islam 71 Laki Laki 40 Orang Permpuan 31 Orang</i>	<b>Isu Gender</b>			<b>Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan</b>		<b>Monitoring</b>	
		<b>Faktor Kesenjangan</b>  <i>Kemajuan Informasi dan Teknologi</i>  <i>Tingkat Kemampuan Penyuluh Agama Dalam Memanfaatkan Kemajuan Informasi dan Teknologi</i>	<b>Sebab Kesenjangan Internal</b>  <i>Masih rendahnya Kemampuan Penyuluh Agama memanfaatkan IT di sebabkan keterbatasan SDM Penyuluh Agama Islam Kurangnya pembinaan bagi Penyuluh itu sendiri</i>	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>  <i>Fokus pada sebab eksternal lembaga dan pada proses implementasi di masyarakat</i>	<b>Reformulasi Tujuan</b>  <i>- Tersedianya Penyuluh Agama Islam yang profesional</i> <i>- Terukurnya kinerja Penyuluh Agama Islam</i>	<b>Rencana Aksi</b>  <i>Menetapkan rencana aksi Meningkatkan Sumber Daya Manusia Bagi Penyuluh Agama Islam</i>	<b>Data Dasar (Baseline)</b>  <i>Jumlah Penyuluh Agama Islam</i>  <i>Kwalifikasi Bakat dan Minat</i>	<b>Indikator Gender</b>  <i>Ukuran untuk memperlihatkan:</i>  <i>- Meningkatnya SDM Penyuluh Agama Islam</i>

Pulau Punjung,      Maret 2020  
 An. Kepala Kantor Kementerian Agama  
 Kabupaten Dharmasraya  
 Kasi Bimas Islam



Tim Verifikasi

INSPEKTUR	KEPALA BKD	KEPALA BAPPEDA	KEPALA DINAS SOSIAL, P3A, PPKB
KANDAM, S.SOS	PARYANTO, S.SoS, MT	Drs. ANDY SUMANTO, Cfr.A	BOBBY F. RIZA, S.STP.M.S.i
NIP.196706071991031004	NIP.196906091989021001	NIP.196812201990091001	NIP.198205212000121002

# FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)			
SKPD	: <i>Kementerian Agama Kab Dharmasraya</i>		
TAHUN ANGGARAN	: <i>2020</i>		
PROGRAM	Penerangan Agama Islam		
KODE PROGRAM	025.03.6639502123.004.b		
KEGIATAN	Pembinaan Penyuluh Agama Islam		
HASIL/OUTPUT	Tersedianya Penyuluh Agama Islam yang profesional		
ANALISIS SITUASI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Penyuluh Agama Islam 71 Orang  <span style="padding-left: 20px;">Laki Laki + 41 Orang</span>  <span style="padding-left: 20px;">Perempuan 31 Orang</span> </li> <li>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tingkat Kemampuan Penyuluh Agama Islam dalam berdakwah Melalui media Sosial.</li> <li>b. Rendahnya kesadaran Penyuluh Agama mengikuti perkembangan Metode Dakwah</li> <li>c. Keterbatasan anggaran dalam Pembinaan Penyuluh Agama Islam</li> </ol> </li> </ol>		
RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	(Diambil dari GAP langkah 7)	
		Tujuan	Peningkatan Penyuluh Agama Islam
	Alokasi Anggaran	Dipa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 pada Seksi Bimas Islam	
	Komponen/ aktifitas 2	Meningkatkan Kemampuan Penyuluh Agama Islam dalam memanfaatkan IT	
		Tujuan	Penyuluh Agama dapat berdakwah melalui Media Sosial
	Alokasi Anggaran		
Total anggaran	36.000.000 ( Tiga Puluh Enam Juta Rupiah )		
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Tersedinya Penyuluh Agama Islam yang Profesional		

Pulau Punjung,     Maret 2020  
 An. Kepala Kantor Kementerian Agama  
 Kabupaten Dharmasraya  
 Kasi Bimas Islam

Zulhendri

Tim Verifikasi

INSPEKTUR  KANDAM, S.SOS NIP.196706071991031004	KEPALA BKD  PARYANTO, S.Sos, MT NIP.196906091989021001	KEPALA BAPPEDA  Drs. ANDY SUMANTO, Cfr.A NIP.196812201990091001	KEPALA DINAS SOSIAL, P3A, PPKB  BOBBY P. RIZA, S.STP, M.S. NIP.198205212000121002
--	---	--	---

## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Kecamatan : Asam Jujahan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>PROGRAM :</b> Program Koordinasi Kecamatan	<b>Data Pembuka Wawasan</b>	<b>Isu Gender</b>			<b>Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan</b>		<b>Monitoring</b>	
<b>KEGIATAN:</b> Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya  Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang	<b>Faktor Kesenjangan</b>	<b>Sebab Kesenjangan Internal</b>	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>	<b>Reformulasi Tujuan</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Data Dasar (Baseline)</b>	<b>Indikator Gender</b>
<b>TUJUAN:</b> Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang <b>Tahun 2017</b> :110 org <b>Tahun 2018</b> : 115 org <b>Tahun 2019</b> : 105 org <b>Tahun 2020</b> : 82 org  Tahun 2018, dari 115 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 84 orang peserta laki-laki dan 31 Orang peserta perempuan  Tahun 2019, dari 105 Orang ada, diikuti oleh	<u><b>Akses :</b></u> <u><b>Terbatasnya akses peserta musrenbang perempuan karena geografis Khusus bagi nagari Lubuk besar dan nagari Tanjung Alam</b></u>  <u><b>Partisipasi :</b></u> Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang  <u><b>Manfaat :</b></u> Belum semua masyarakat mengetahui	- belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang  - Sedikitnya jumlah/kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan  - Masih rendahnya	Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang  Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang  Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang	Terumuskan-nya usulan program Perioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2020 yang responsif gender	Mengumpulkan DURKP Nagari  Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan  Distribusi undangan ke nagari  Menjalin koordinasi dan soooosialisasi dengan pihak terkait secara iinternal sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur  Tersusunnya usulan prioritas kecamatan  Dari kehadiran tahun 2020 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingannya lak-laki 75 % dan perempuan 25%  meningkatnya wawasan Peserta Laki-laki 75% menjadi 90% dan perempuan meningkat dari 1 % menjadi 4%	<b>Output :</b> Meningkatnya Peran usulan laki – laki dari 11 % menjadi 60 % Perempuan dari 11% menjadi 30 %  <b>Outcome :</b> <b>Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKPD yang Responsif Gender</b>

sebanyak 82 orang peserta laki-laki dan 23 Orang peserta perempuan

Tahun 2020, dari 80 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 55 orang peserta laki-laki dan 25 Orang peserta perempuan

*Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 jumlah yang dundang 130. lak –lak i yang hadir sebanyak 55 Orang.. dan yang menyampaikn 15 usulan( 11 %)*

*peserta perempuan yang di nundang 75. orang dan nyang hadir 25. Orang serta yang menyampaikn usulan sebanyak 4 Usulan (1%)*

manfaat dari kegiatan Musrenbang terutama perempuan

**Kontrol**

Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya

Sdm pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang

- Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan belum paham betul tentang peengasutamaan geender

Sosial Budaya Minang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat

Kondisi jalan yang belum memadai terutama bagi peserta perempuan nagari Lubuk Besar dan Nagari Tanjung Alam

*Hasil musrenbang difokuskan untuk peningkatan kelas jalan Nagari Lubuk Besar dan nagari Tanjung Alam*

*Menyampaikan saran ke bappeda untuk membuat regulasi tentang keterwakilan Perempuan dan anak di Musenbang*

*Sosialisasi Musrenbang ke masyarakat*

Msrenbang Tahun 2020, dari 80 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 55 orang peserta laki-laki dan 25 Orang peserta perempuan

*Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 jumlah yang dundang 130. lak –lak i yang hadir sebanyak 55 Orang.. dan yang menyampaikn 15 usulan( 11 %)*

*peserta perempuan yang di nundang 75. orang dan nyang hadir 25. Orang serta yang menyampaikn usulan sebanyak 4 Usulan (1%)*

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sungai Lmau, Maret 2020

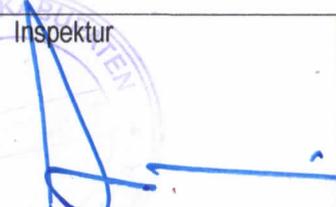
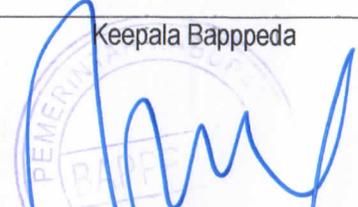
CAMAT ASAM JUJUHAN



IMAM MAHFURI, SE

Nip. 196910131993031002

TIM VERIFIKASI

<p>Inspektur</p>  <p>KANDAM, S.Sos. Nip. 19680607 199103 1004</p>	<p>Kepala BKD</p>  <p>RARYANTO, S.Sos.M.T. Nip. 19690609 198902 1 001</p>	<p>Keepala Bappeda</p>  <p>Drs. ANDY SUMANTO, CfrA Nip. 19681220 199009 1 001</p>	<p>Keepala Dinas Sosial, P3APPKB</p>  <p>BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si Nip. 19820521 2000121 002</p>
--	---	--	--

## FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)						
SKPD	: Kecamatan Asam Jujuhan					
TAHUN ANGGARAN	: 2021					
PROGRAM	Koordinasi Kecamatan					
KODE PROGRAM	4.01.4.01.12.86.04					
KEGIATAN	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan					
HASIL/OUTPUT	Terumuskannya prioritas usulan Musrenbang Kecamatan yang tertampung pada Musrenbang RKPD yang responsif gender					
ANALISIS SITUASI	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</b> Pelaksanaan Musrenbang setiap tahunnya di Kecamatan dengan jumlah peserta yang mengikuti musrenbang dari Tahun :</p> <p>Tahun 2017 : 110 orang Tahun 2018 : 115 orang Tahun 2019 : 105 Orang Tahun 2020 : 82 orang</p> <p>Pada musrenbang tahun 2020 dari 80 Orang peserta musrenbang yang terdiri dari 55 Orang Peserta Laki-Laki dan 25 Orang Peserta Perempuan.</p> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p>a. Pada Musrenbang tingkat Kehadiran Sangat sedikit yang disebabkan oleh akses jalan sangat jelek khususnya bagi Nagari Lubuk Besar dan Nagari Tanjung Alam dan walupun hadir sangat rendah persentasenya yang berani menyampaikan usulan</p> <p>b. Peserta Musrenbang sangat sedikit Keterwakilan perempuan yang disediakan karena belum adanya aturan yang mewajibkan tingkat keterwakilan perempuan yang selama ini sangat rendahnya pemahaman Sumberdaya manusia dan komitmen pihak terkait tentang pelaksanaan musrenbang.</p> <p>c. Ketidak ingin tahaun perempuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang disebabkan oleh tidak adanya informasi yang jelas tentang pentingnya musrenbang, disamping itu masih mengutamakan kepentingan pribadi, juga faktor sosial budaya minangkabau yang membatasi ruang gerak perempuan, terlebih lagi akses jalan yang sangat sulit dilalui oleh perempuan untuk mengikuti musrenbang yang berasal dari nagari Lubuk besar dan Nagari Tanjung Alam</p>					
RENCANA AKSI	<b>Komponen/ Aktifitas 1</b>	<p>Mengumpulkan DURKP Nagari dengan melakukan rekapitulasi masing –masing usulan yang menjadi prioritas</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Tujuan</b></td> <td>Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung adanya kegiatan yang responsif gender</td> </tr> <tr> <td><b>Alokasi Anggaran</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Tujuan</b>	Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung adanya kegiatan yang responsif gender	<b>Alokasi Anggaran</b>	
<b>Tujuan</b>	Untuk melihat usulan masing –masing nagari yang mendukung adanya kegiatan yang responsif gender					
<b>Alokasi Anggaran</b>						
	<b>Komponen/ aktifitas 2</b>	<p>Memilih dan memilah usulan kegiatan pembangunan yang responsif gender</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Tujuan</b></td> <td>Perioritas usulan peningkatan kelas jalan</td> </tr> </table>	<b>Tujuan</b>	Perioritas usulan peningkatan kelas jalan		
<b>Tujuan</b>	Perioritas usulan peningkatan kelas jalan					

		dari Nagari Lubuk Besar menuju Kantor Camat Asam Jujuhan, begitu juga jalan dari Nagari Tanjung Alam Menuju Kantor Camat Asam Jujuan, sehingga perempuan tidak akan merasa takut lagi untuk melewati jalan tersebut.
	<b>Alokasi Anggaran</b>	
	<b>Total anggaran</b>	Rp. 7.000.000,-
<b>CAPAIAN PROGRAM</b> (di level kegiatan)	Menigkatnya tingkat kehadiran dan keberanian Perempuan menyampaikan usulan dalam proses pelaksanaan musrenbang, serta tertampungnya pada Musrenbang KPD Kabupaten yang responsif gender	

Sungai Limau, Maret 2020

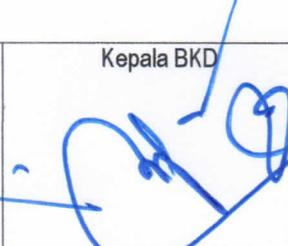
CAMAT ASAM JUJUAN



IMAM MAHFURI, SE

Nip. 196910131993031002

TIM VERIFIKASI

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas Sosial, P3APPKB
			
KANDAM, S.Sos Nip. 19680607 199103 1004	PARYANTO, S.Sos.M.T Nip. 19690609 198902 1 001	Drs. ANDY SUMANTO, CfrA Nip. 19681220 199009 1 001	BOBBY P. RIZA, S.STP, M.Si Nip. 19820521 200012 1 002

## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

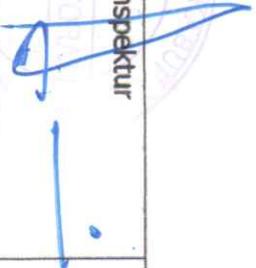
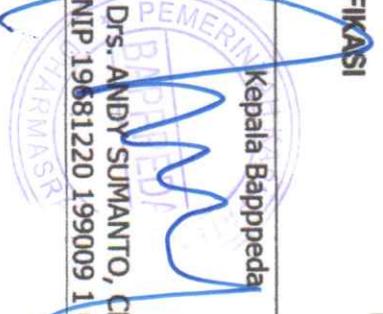
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Koordinasi Kecamatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
<b>KEGIATAN:</b> Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya	<b>Akses :</b>  <b>Partisipasi :</b> Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang	- belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang  - Sedikitnya jumlah kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan	Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang	Terumuskannya usulan program prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKP Tahun Anggaran 2021 yang responsif gender	Mengumpulkan DURKP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan  Distribusi undangan ke nagari	Meningkatkan kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur	Outcome : Meningkatkan a peran usulan laki-laki dari 17 % menjadi 60 %, peran usulan perempuan dari 4 % menjadi 40 %
<b>TUJUAN:</b> Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKP	Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2017 : 130 org Tahun 2018 : 149 org Tahun 2019 : 158 org Tahun 2020 : 165 org  Tahun 2018, dari 149 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 101 orang peserta laki-laki	<b>Manfaat :</b> Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang	Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang	Dari kehadiran tahun 2020 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan,	<b>Outcome :</b> Usulan Musrenbang tertampung			

	dan 48 Orang peserta perempuan					berjalan lancar	perbandingan laki-laki 62% dan perempuan 38%	di Musrenbang RKKPD Yang Responsif Gender
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Tahun 2019, dari 158 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 117 orang peserta laki-laki dan 41 Orang peserta perempuan Tahun 2020, dari 165 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 111 orang peserta laki-laki dan 54 Orang peserta perempuan Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 120 orang yang hadir 111 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 60 (%)	<b>Kontrol</b> Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya	Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang - Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan	Sosial Budaya Minang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat		Mekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang ketersediaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang Melakukan sosialisasi internal tentang penting keterwakilan perempuan di musrenbang	Meningkatnya usulan Peserta Laki-laki 17 % dan perempuan meningkat dari 0 % menjadi 3% Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 120 orang yang hadir 111 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 60% peserta	

	peserta perempuan yang diundang sebanyak 70 orang yang hadir 54 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 50%						perempuan yang diundang sebanyak 70 orang yang hadir 54 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 50%	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Koto Baru, 20 Maret 2020  
 Camat Koto Baru  
  
 BERLIAN, S.Sos  
 NIP. 196601101993031008

**TIM VERIFIKASI**

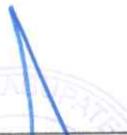
Inspektur KANDAM, S.Sos NIP 19670607 199103 1 004 	Kepala BKD PARYANTO, S.Sos, M.T. NIP 19690609 198902 1 001 	Kepala Bappeda Drs. ANDY SUMANTO, CFA NIP 19681220 199009 1 001 	Kepala Dinas Sosial /P3A, PPKB BOBAY A RIZY, S.STP., M.Si. NIP 19820521 200012 1 002 
--	--	--	---

# FORMAT GBS

<b>PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)</b>	
<b>SKPD</b>	: Kecamatan Koto Baru
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	: 2021
<b>PROGRAM</b>	Koordinasi Kecamatan
<b>KODE PROGRAM</b>	4.01.4.01.08.86
<b>KEGIATAN</b>	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
<b>HASIL/OUTPUT</b>	Terumuskannya usulan Program Prioritas dan Kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2021 yang Responsif Gender
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya.</li> <li>➢ Masing-masing Nagari mengutus Peserta mengikuti Musrenbang (Tahun 2019 158 orang, Tahun 2020 165 orang)</li> <li>➢ Tahun 2019 dari 158 peserta diikuti oleh sebanyak 117 orang peserta laki-laki dan 41 orang opeserta perempuan.</li> <li>➢ Tahun 2020 dari 165 peserta diikuti oleh sebanyak 111 orang peserta laki-laki dan 54 orang peserta perempuan</li> <li>➢ Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 120 orang yang hadir 111 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 60% peserta perempuan yang diundang sebanyak 70 orang yang hadir 54 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 50%</li> </ul> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p><b>Partisipasi :</b> Masih Banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan Musrenbang</p> <p><b>Manfaat :</b> Belum semua Peserta perempuan mengetahui manfaat dari Musrenbang</p> <p><b>Kontrol :</b> Dalam Musrenbang Peserta Perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya.</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada Musrenbang</li> <li>➢ Sedikitnya jumlah kuota peserta Musrenbang dari keterwakilan unsure perempuan yang disediakan</li> <li>➢ Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang</li> </ul> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kurangnya keinginan atau minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang</li> <li>➢ Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang</li> <li>➢ Adanya kesibukan lain dari calon peserta Musrenbang</li> <li>➢ Sosial budaya Minang Kabau dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat.</li> </ul>

RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Mengumpulkan DURKP Nagari	
		Tujuan	Mengetahui jumlah usulan Nagari
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ aktifitas 2	Merekap data untuk usulan prioritas Kecamatan	
		Tujuan	Memilah usulan nagari menjadikan usulan prioritas kecamatan
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ Aktifitas 3	Distribusi undangan ke nagari	
		Tujuan	Memberitahu waktu pelaksanaan Musrenbang
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ Aktifitas 4	Menjalin koordinasi dan sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	
		Tujuan	Mendapatkan kepastian kehadiran pihak-pihak terkait
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ Aktifitas 5	Merekomendasikan kepada BAPPEDA untuk membuat regulasi / kebijakan Tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang	
		Tujuan	Supaya perempuan bias banyak ikut serta dalam kegiatan Musrenbang
		Alokasi Anggaran	
Komponen/ Aktifitas 6	Melakukan sosialisasi internal tentang pentingnya keterwakilan perempuan pada Musrenbang		
	Tujuan	Agar Perempuan lebih paham tentang kedudukan dan perannya pada acara Musrenbang	
	Alokasi Anggaran		
<b>Total anggaran</b>		Rp. 20.000.000,-	
<b>CAPAIAN PROGRAM</b> (di level kegiatan)	<b>Output:</b> Meningkatnya peran usulan Laki-laki dari 10% menjadi 60% dan peran usulan perempuan dari 6% menjadi 40%  <b>Outcome :</b> Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang OPD yang Resposif Gender.		

Koto Baru, 20 Maret 2020  
Camat Koto Baru  
  
BERLIAN, S.Sos  
NIP. 196601101993031008

Inspektur  KANDAM, S.Sos NIP 19670607 199103 1 004	Kepala BKD  PARYANTO, S.Sos., M.F. NIP 19690609 198802 1 001	Kepala Bappeda  Drs. ANDY SUMANTO, CfrA NIP 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas Sosial, P3A, PRKB  BOBBY P. RIZA, S.STP., M.Si NIP 19820521 200012 1 002
--	--	--	---

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)  
KECAMATAN KOTO BESAR**

Program : Program Koordinasi Kecamatan

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>PROGRAM :</b> Program Koordinasi Kecamatan  <b>KEGIATAN:</b> Pelaksanaan Musyarah Kecamatan  <b>TUJUAN:</b> Hasil Musyarah Kecamatan yang tertampung dalam RKP	<b>Data Pembaca Wawasan</b>  Kegiatan Musyarah dilaksanakan setiap tahunnya  Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musyarah yang	<b>Faktor Kesenjangan</b>  <b>Akses:</b>  <b>Partisipasi:</b>	<b>Isu Gender</b>  Sub Kesenjangan Internal	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	<b>Data Dasar (Base)</b>	<b>Indikator Gender</b>
<b>Manfaat:</b> Belum semua masyarakat mengetahui manfaat dari kegiatan Musyarah		Dalam Musyarah peserta perempuan masih sedikit yang diutamakan		Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musyarah		Mengumpulkan DURKP bagi Merkeap dari usulan prioritas kecamatan,		Outcome : Usulan hasil Musyarah yang bertamng dalam RKP Tahun anggaran 2021 yang Responsif Gender

<p>(70%) Perempuan : 44 orang (30%)</p>	<p>Tahun 2020 : jumlah yang diundang 154 yang hadir : 125 Orang (81%) terdiri dari laki-laki : 84 orang (67,2%) dan Perempuan : 41 orang (32,8%)</p>	<p>menyampaikan n usulannya</p>	<p>komitmen dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang</p>	<p>tidak dapat memberikan perdapat</p>	<p>Adanya Mutasi Pegawai Pengekala Musrenba ng Kecamatan n, dan pejabat penguganti SIDM yang ada sakarng belum memahami seputary a tentang pelaksanaan n Musrenba ng di Kecamatan n.</p>	<p>kan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang</p>	<p>kegiatan tahun 2021, juga masih dominan laki- laki dari pada perempuan, perbandingann ya lak-laki 67,2% dan perempuan 32,8%</p>	<p>Meningkatnya wawasan Peserta perempuan sebesar 2,8% dari 30% menjadi 32,8%</p>

Dari Nominasi Usulan Museum yang 2020 peserta laki-laki sebanyak 76 asetan/ 85 %) dari 89 asetan serta bidang dan peserta perengyan vehanyak 13 Usulan (15 %), dari 89 asetan serta bidang								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

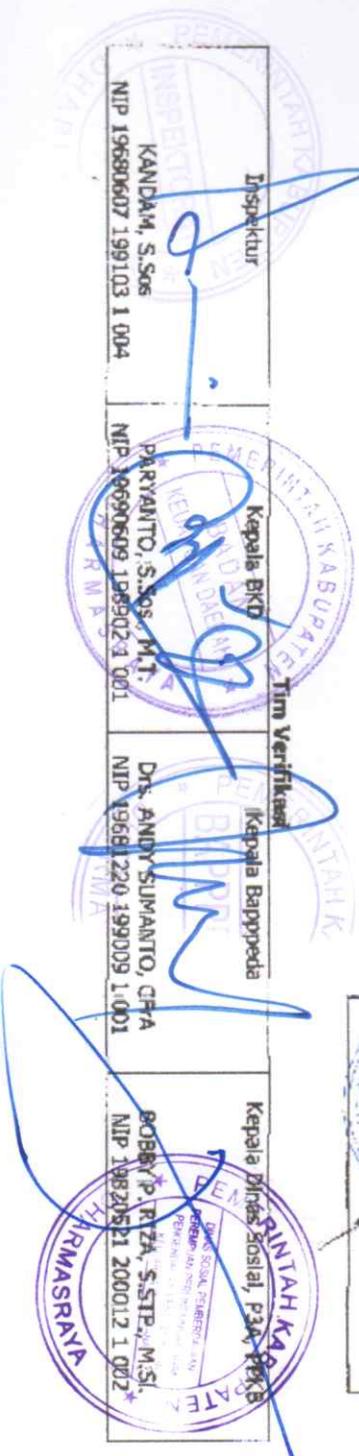
Inspektur  
**KANDAM, S.Sos**  
 NIP. 196890607 199103 1 004

Kepala BKD  
**PARYANTO, S.Sos, M.T.**  
 NIP. 19690609 198902 3 001

Tim Verifikasi  
 Kepala Bappoda  
**Drs. ANDY SUMANTO, CPA**  
 NIP. 19681220 199009 1 001

Kepala Dinas Sosial, P3A, P3B  
**BOBAY P. RIZA, S.STP, M.Si.**  
 NIP. 19820521 200012 1 002

~~Kep. Bessu, Marti 2020  
 Komand Kamp Besar~~  
**H. YUSRIAN, SKH, MH**  
 NIP. 196803241990031002



**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

<b>OPD</b>	<b>: KECAMATAN KOTO BESAR</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>: 2021</b>
<b>PROGRAM</b>	KOORDINASI KECAMATAN
<b>KODE PROGRAM</b>	4.01.4.01.08.86
<b>KEGIATAN</b>	PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN
<b>HASIL/OUTPUT</b>	Terumuskannya usulan program prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun anggaran 2021 yang responsif Gender
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya</li> <li>• Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang</li> <li>• Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2019 : Jumlah yang diundang 200 orang yang hadir 145 Orang (72,5%) dari undangan yg terkirim terdiri dari laki-laki : 101 orang (70%) perempuan : 44 orang (30%)</li> <li>• Jumlah peserta yang mengikuti musrenbang Tahun 2020 : Jumlah yang diundang 154 yang hadir : 125 Orang (81%) terdiri dari laki-laki : 84 orang (67,2%) dan Perempuan : 41 orang (32,8%)</li> <li>• Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 peserta laki-laki sebanyak 76 usulan (85 %) dari 89 usulan semua bidang dan peserta perempuan sebanyak 13 Usulan (15 %) dari 89 usulan semua bidang</li> </ul> </li> <li>• <b>Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Faktor Kesenjangan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Partisipasi :</u> Masih banyak kaum perempuan yang kurang dilibatkan dalam kegiatan musrenbang</li> <li><u>Manfaat :</u> Belum semua masyarakat mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang</li> <li><u>Kontrol :</u> Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya</li> </ul> </li> <li>◦ <b>Penyebab Internal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada Musrenbang</li> <li>• Sedikitnya jumlah/kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan</li> <li>• Masih rendahnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang</li> <li>• Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan, dan pejabat pengganti SDM yang ada sekarang belum memahami sepenuhnya tentang pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

	<p style="text-align: center;">c) <b>Penyebab Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya keinginan/minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang</li> <li>• Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang</li> <li>• Adanya kesibukan/kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang</li> <li>• Sosial Budaya Minangkabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat</li> </ul>		
<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Komponen/ Aktifitas 1</b>	Mengumpulkan DURKP nagari	
		<b>Tujuan</b>	Mengetahui jumlah usulan nagari
		<b>Alokasi Anggaran</b>	
	<b>Komponen/ Aktifitas 2</b>	Merekap data sesuai prioritas kecamatan	
		<b>Tujuan</b>	Memilih usulan Nagari menjadikan usulan prioritas Kecamatan
		<b>Alokasi Anggaran</b>	
	<b>Komponen/ Aktifitas 3</b>	Distribusi undangan ke nagari	
		<b>Tujuan</b>	Memberitahu waktu pelaksanaan musrenbang
		<b>Alokasi Anggaran</b>	
	<b>Komponen/ Aktifitas 4</b>	Menjalin koordinasi dan sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	
		<b>Tujuan</b>	Mendapatkan kepastian kehadiran pihak-pihak
		<b>Alokasi Anggaran</b>	
	<b>Komponen/ Aktifitas 5</b>	Merekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang	
		<b>Tujuan</b>	Supaya peserta perempuan meningkat dan bisa seimbang dengan peserta laki-laki
<b>Alokasi Anggaran</b>			
<b>Komponen/ Aktifitas 6</b>	Membuat himbauan atau sosialisasi tentang pentingnya keikutsertaan perwakilan perempuan dalam kegiatan Musrenbang		
	<b>Tujuan</b>	Perempuan lebih memahami tentang kedudukannya dan peran sertanya dalam musrenbang.	
	<b>Alokasi Anggaran</b>		
	<b>Total Anggaran</b>	Rp. 6.250.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)	
<b>CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)</b>	<b>Indikator Output</b>		
	Meningkatnya Peran usulan Perempuan dan Anak dalam musrenbang dari 15% menjadi 50 %		

**Indikator Outcome :**  
 Usulan hasil Musrenbang Yang tertampung dalam RKPD Tahun anggaran 2021 yang Responsif Gender

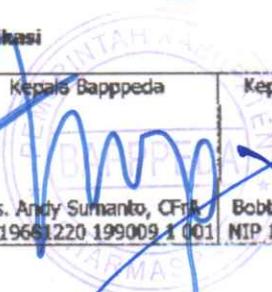
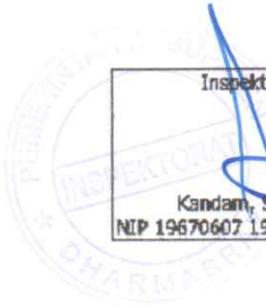
Kota Besar, Maret 2020  
 Camat Kota Besar



**H. YUSRIYAL, SKM.MM**  
 NIP. 196803211990031002

**Tim Verifikasi**

<p><b>Inspektur</b>           Kandam, S.Sos          NIP 19670607 199103 1 004</p>	<p><b>Kepala BKD</b>           Paryanto, S.Sos., M.T.          NIP 19690609 198902 1 001</p>	<p><b>Kepala Bappeda</b>           Drs. Andy Sumanto, CFik          NIP 19661220 199009 1 001</p>	<p><b>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB</b>           Bobby P. Riza, S.STP., M.Si.          NIP 19630531 200012 1 002</p>
--	--	---	--



**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)  
KECAMATAN KOTO SALAK**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>PROGRAM :</b> Program Koordinasi Kecamatan	<b>Data Pembukaan Wawasan</b>  Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya  Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang	<b>Faktor Kesenjangan</b>  <b>Akses :</b>  <b>Partisipasi:</b> Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang	<b>Sebab Kesenjangan Internal</b>  belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>  Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang	<b>Reformulasi Tujuan</b>  Tenunuskannya usulan program prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RPKD Tahun Anggaran 2021 yang responsif gender	<b>Rencana Aksi</b>  Mengumpulkan DUKRKP Nagari Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan	<b>Data Dasar (Baseline)</b>  Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur  Tersusunnya usulan prioritas kecamatan	<b>Monitoring</b>  <b>Indikator Gender</b>  <b>Output :</b> Meningkatnya peran usulan laki-laki dari 10 % menjadi 60 % peran usulan perempuan dari 6 % menjadi 40 %
Tahun 2019, dari 70 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 49 orang peserta laki-laki dan 21 perempuan	Tahun 2020, dari 70 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 52 orang peserta laki-laki dan 18 Orang peserta perempuan	<b>Mandat:</b> Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang	Sedikitnya jumlah kuota peserta Musrenbang dan unsur keterwakilan perempuan yang disediakan	Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang	Distribusi undangan ke nagari	Mengalin koordinasi dan Sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	Dan kehadiran tahun 2020 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingannya laki-laki 64 % dan perempuan 36%	Outcome : Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RPKD Yang Responsif Gender

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 52 orang yang hadir 45 orang yang menyampaikan usulan sebanyak 11 orang (10 %). peserta perempuan yang diundang sebanyak 18 orang yang hadir 12 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 2 orang (2%)	Kontrol Dalam musrenbang 9 Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya	Masih rendahnya SDM dan pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang	Sosial Budaya Minang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat		Mekomendasikan ke Bappenda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang	Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 52 orang yang hadir 45 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 11 orang (10 %) peserta perempuan yang diundang sebanyak 18 orang yang hadir 12 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 2 orang (2%)	

Inspektur  
KANDAM, S.Sos  
NIP.19670607.199103.1.004

Tim Verifikasi  
Drs. BKO  
Drs. VANTO, S.Sos, M.H  
NIP.19690605.198702.1.001

Kepala Bappenda  
Drs. ANDY SUMANTO, CFA  
NIP.19681129.199009.1.001

Kepala Dinas Sosial, P3A, P3K  
BERRY RITZA, S.STP, M.SI  
NIP.19910521.200012.1.002

KOTO SALAK, 26 MARET 2020  
CAIMAT KOTO SALAK  
MARGO ANDRIAS, S.IP, MM  
NIP.19880603.2007011.001

FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)			
SKPD	: KECAMATAN KOTO SALAK		
TAHUN ANGGARAN	: 2021		
PROGRAM	KOORDINASI KECAMATAN		
KODE PROGRAM	4.01.4.01.11.86.04		
KEGIATAN	PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN		
HASIL/OUTPUT	Terumuskannya usulan program Perioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2021 yang responsif gender		
ANALISIS SITUASI	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya</li> <li>➢ Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang</li> <li>➢ Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang (Tahun 2019 70 orang, tahun 2020 70 orang)</li> <li>➢ Tahun 2019, dari 70 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 49 orang peserta laki-laki dan 21 Orang peserta perempuan</li> <li>➢ Tahun 2020, dari 70 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 52 orang peserta laki-laki dan 18 Orang peserta perempuan</li> <li>➢ Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 52 orang yang hadir 45 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 11 orang (10%), peserta perempuan yang diundang sebanyak 18 orang yang hadir 12 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 2 orang (2%)</li> </ul> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <p><u>Partisipasi</u> : Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang</p> <p><u>Manfaat</u> : Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang</p> <p><u>Kontrol</u> : Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya</p> <p>b. Penyebab Interna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang</li> <li>➢ Sedikitnya jumlah/kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan</li> <li>➢ Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang</li> </ul> <p>c. Penyebab Eksterna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang</li> <li>➢ Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang</li> <li>➢ Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang</li> <li>➢ Sosial Budaya Minang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat</li> </ul>		
RENCANA AKSI	Komponen / Aktifitas 1	Mengumpulkan DURKP Nagari	
		Tujuan	Mengetahui Jumlah usulan Nagari
		Alokasi Anggaran	
	Komponen / aktifitas 2	Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan	
		Tujuan	Memilah usulan nagari menjadikan usulan prioritas kecamatan
		Alokasi Anggaran	
	Komponen / aktifitas 3	Distribusi undangan ke nagari	
		Tujuan	Memberitahu waktu pelaksanaan musrenbang
		Alokasi Anggaran	
	Komponen / aktifitas 4	Menjalni koordinasi dan Sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	
		Tujuan	Mendapatkan kepastian kehadiran pihak-pihak terkait
		Alokasi Anggaran	



OPD : Kecamatan Padang Laweh

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
PROGRAM : Program Koordinasi Kecamatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
KEGIATAN: Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya	Akses : Terbatasnya akses peserta musrenbang perempuan karena geografis	- belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang	Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang	Terumuskannya usulan program Prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2020 yang responsif gender	Mengumpulkan DURKP Nagari	Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur	Meningkatnya peran usulan laki-laki dari 24 % menjadi 29 %, peran usulan perempuan dari 1 % menjadi 7 %
TUJUAN: Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang	-kondisi jalan yang belum memadai seperti jalan batu rijal muaro sopan	- belumlah ada regulasi yang mengatur keterwakilan perempuan yang disediakan	Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang		Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan	Tersusunnya usulan prioritas kecamatan	
	Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2017 : 92 org Tahun 2018 : 76 org Tahun 2019 : 145 org Tahun 2020 : 130 org	<u>Partisipasi :</u> Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang	Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan	Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang		Distribusi undangan ke nagari	Dari kehadiran tahun 2020 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingannya laki-laki 78% dan perempuan 21%	Outcome : Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKPD Yang Responsif Gender
	Tahun 2018, dari 76 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 59 orang peserta laki-laki dan 17 Orang peserta perempuan	<u>Manfaat :</u> Belum semua masyarakat mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang	Masih rendahnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang	Sosial Budaya Minang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat		Menjalin koordinasi dan Sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar		
	Tahun 2019, dari 145 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 101 orang peserta laki-laki dan 44 Orang peserta perempuan	<u>Kontrol</u> Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya		Kondisi jalan yang belum memadai terutama bagi peserta perempuan		Mekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang	Meningkatnya usulan Peserta Laki-laki 24% menjadi 29% dan perempuan meningkat dari 1 % menjadi 7%	
	Tahun 2020, dari 130 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 102 orang					Melakukan sosialisasi internal tentang penting	Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 110.	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
	<p>peserta laki-laki dan 28 Orang peserta perempuan</p> <p>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 110 orang yang hadir 102 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 25 orang (29%)</p> <p>peserta perempuan yang diundang sebanyak 35 orang yang hadir 28 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 2 orang (7%)</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan</li> <li>SDM yang ada sekarang belum sepenuhnya memahami tentang pelaksanaan Musrenbang Kecamatan</li> </ul>			<p>keterwakilan perempuan di musrenbang</p> <p>Mekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang</p> <p>Melakukan sosialisasi internal tentang penting keterwakilan perempuan di musrenbang</p>	<p>orang yang hadir 102 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 25 (29%)</p> <p>peserta perempuan yang diundang sebanyak 35 orang yang hadir 28 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 2 orang (7%)</p>	

Padang Laweh, 20 Maret 2020  
 Camat Padang Laweh  
 HENDRI S. Ag, M. Si  
 NIP.197111122006041015

<p>Inspektur</p> <p>KANDAM, S.Sos        NIP.195706071991031004</p>	<p>Kepala BKD</p> <p>PARYANTO, S.Sos., M.T.        NIP.196906091989021001</p>	<p>Kepala Bappeda</p> <p>Drs. ANDY SUMANTO, CFA        NIP.196812201990091001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, PPK, PPKB        PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,        PENGENDALIAN PENDUKUR DAN        KELUARGA BERESIKAWI SI</p> <p>BOEY P. RIZKA, S.SPB, M. Si        NIP.198205212000121002</p>
---	---	---	--

Tim Verifikasi

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**

**(GENDER BUDGET STATEMENT)**

SKPD : KECAMATAN PADANG LAWEH

TAHUN ANGGARAN : 2021

PROGRAM : Koordinasi Kecamatan

KODE PROGRAM : 4.01.4.01.14.86

KEGIATAN : Pelaksanaan musrenbang Kecamatan

HASIL/OUTPUT : Terumuskan-nya usulan program Prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2020 yang responsif gender

**ANALISIS SITUASI**

**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).**

- Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya
- Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang
- Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang (Tahun 2019 145 orang, tahun 2020 130 orang)
- Tahun 2019 : dari 145 orang ada, diikuti oleh sebanyak 101 orang peserta laki-laki dan 44 orang peserta perempuan
- Tahun 2020 : dari 130 orang ada, diikuti oleh sebanyak 102 orang peserta laki-laki dan 28 orang peserta perempuan
- Dari Notulen usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 110 orang yang hadir 102 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 25 orang (29%), peserta perempuan yang diundang sebanyak 35 orang yang hadir 28 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 2 orang (7 %)

**2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender**

**a. Faktor Kesenjangan**

**Partisipasi :** Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang

**Manfaat :** Belum semua masyarakat mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang

**Kontrol :** Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya

**b. Penyebab Internal**

- belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada Musrenbang
- Sedikitnya jumlah\kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan
- Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang
- Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan

**c. Penyebab Eksternal**

- Kurangnya keinginan/minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang
- Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang
- Adanya kesibukan/kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang
- Sosial Budaya Minang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberi pendapat

<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Komponen/ aktifitas 1</b>	<b>Mengumpulkan DURKP Nagari</b>	
		<b>Tujuan</b>	Mengetahui Jumlah usulan Nagari
		<b>Alokasi anggaran</b>	
	<b>Komponen/ aktifitas 2</b>	<b>Merekap data untuk usulan prioritas Kecamatan</b>	
		<b>Tujuan</b>	Memilah usulan Nagari menjadikan usulan prioritas Kecamatan
		<b>Alokasi anggaran</b>	
	<b>Komponen/ aktifitas 3</b>	<b>Distribusi undangan ke Nagari</b>	
		<b>Tujuan</b>	Memberitahu waktu pelaksanaan musrenbang
		<b>Alokasi anggaran</b>	
	<b>Komponen/ aktifitas 4</b>	<b>Menjalin koordinasi dan sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan musrenbang berjalan lancar</b>	

	<b>aktifitas 4</b>	<b>Tujuan</b> Alokasi anggaran	Mendapat kepastian kehadiran pihak-pihak terkait
	<b>Komponen/ aktifitas 5</b>	Merekondasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang	
		<b>Tujuan</b>	Supaya perempuan bisa banyak ikut serta dalam kegiatan Musrenbang
		<b>Alokasi anggaran</b>	
	<b>Komponen/ aktifitas 6</b>	Melakukan sosialisasi internal tentang penting keterwakilan perempuan di musrenbang	
		<b>Tujuan</b>	Perempuan lebih paham tentang kedudukannya dan perannya dalam Musrenbang
		<b>Alokasi anggaran</b>	
	<b>Total Anggaran</b>		Rp.14.000.000
<b>CAPAIAN PROGRAM</b> (di level kegiatan)	<b>Indikator Ouput</b> Meningkatnya peran usulan laki-laki dari 24 % menjadi 29% peran usulan perempuan dari 1% menjadi 7%  <b>Indikator Outcome :</b> Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RPKD yang Responsif Gender		

Padang Laweh, 20 Maret 2020  
Camat Padang Laweh  
KECAMATAN  
PADANG LAWEH  
\* HENDRI, S.Ag, M.Si  
NIP.19711122006041015

Tim Verifikasi

<b>Inspektur</b> Kandam, S.Sos NIP 19670607 199103 1 004	<b>Kepala BKD</b> Paryanto, S.Sos., M.T. NIP 19690609 198902 1 001	<b>Kepala Bappeda</b> Drs. Andy Sumanto, CFrA NIP 19681220 199009 1 001	<b>Kepala Dinas Sosial, PSA, PPKB</b> Bobby F. Riza, S.STP., M.Si NIP 19820521 200012 1 002
--	--	---	---

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)  
KECAMATAN SEMBILAN KOTO**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah
PROGRAM : Program Koordinasi Kecamatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender	Faktor	Sebab	Sebab	Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan	Data Dasar (Baseline)	Monitoring
			Kesenjangan	Kesenjangan Internal	Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan		
<p><b>KEGIATAN:</b> Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan</p> <p><b>TUJUAN:</b> Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD</p>	<p>Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya</p> <p>Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang</p> <p>Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang  <b>Tahun 2018 :</b> 105 org  <b>Tahun 2019 :</b> 115 org  <b>Tahun 2020 :</b> 100 org</p> <p>Tahun 2018, dari 105 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 79 orang peserta laki-laki dan 36 Orang peserta perempuan</p> <p>Tahun 2019, dari 115</p>	<p><b>Akses :</b> Terbatasnya akses peserta musrenbang perempuan karena geografis</p> <p>(kondisi jalan yang ada dikecamatan blm lancar</p> <p><b>Partisipasi :</b> Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang</p> <p><b>Manfaat :</b> Belum semua masyarakat</p>	<p>- belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang</p> <p>- Sedikitnya jumlah kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan</p> <p>- Masih rendahnya pemahaman</p>	<p>Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang</p> <p>Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang</p>	<p>Terumuskannya usulan program Perioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKP Tahun Anggaran 2021 yang responsif gender</p>	<p>Mengumpulkan DURKP Nagari</p> <p>Merikap data untuk usulan prioritas kecamatan</p> <p>Distribusi undangan ke nagari</p> <p>Menjalin koordinasi dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar</p> <p>Membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan</p>	<p>Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur</p> <p>Tersusunnya usulan prioritas kecamatan</p> <p>Dari kehadiran tahun 2020 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingannya laki-laki 62% dan perempuan 38%</p> <p>Meningkatnya wawasan Peserta Laki-laki 79% menjadi 88% dan perempuan</p>	<p><b>Output :</b> Meningkatkan usulan laki-laki menjadi 60 usulan pere % menjadi 4</p> <p><b>Outcome :</b> Usulan Mus tertampung Musrenbang Responsif G</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>Orang ada, diikuti oleh sebanyak 80 orang peserta laki-laki dan 35 Orang peserta perempuan</p> <p>Tahun 2020, dari 100 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 79 orang peserta laki-laki dan 21 Orang peserta perempuan</p> <p>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 100 orang yang hadir 79 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 20 (%)</p> <p>peserta perempuan yang diundang sebanyak 50 orang yang hadir 21 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 5 orang (%)</p>	<p>mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang</p> <p><u>Kontrol</u> Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya</p>	<p>dan komitmen dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang</p> <p>Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan</p>	<p>dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat</p> <p>Kondisi jalan yang belkum memadai terutama bagi peserta perempuan</p>		<p>perempuan dalam kegiatan Musrenbang</p> <p>Sosialisasi ke masyarakat pentingnya Musrenbang</p>	<p>meningkat dari 0% menjadi 3%</p> <p>Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 100 orang yang hadir 79 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 20 (%)</p> <p>peserta perempuan yang diundang sebanyak 50 orang yang hadir 21 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 5 orang (%)</p>	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

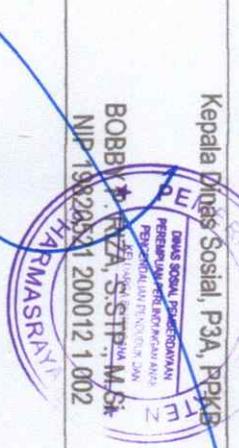
Inspektur  
**KANDAM, S.Sos**  
 NIP 19680607 199103 1 004

Kepala BKD  
**PARYANTO, S.Sos., M.Si.**  
 NIP 19690609 198902 1 001

Tim Verifikasi  
 Kepala Baappeda  
**Drs. ANDY SUMANTO, CFIA**  
 NIP 19681220 199009 1 001

Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB  
**BOBBY HAZA, S.STP., M.Si.**  
 NIP 19820531 200012 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN  
 SIBOLGA  
 KECAMATAN CAMAL SEMBLIHAN KOTO  
 Sibolga, Maret 2020  
**H.SYAFUL ANWAR, S.Pd.M.Pd**  
 DHARIMIP 19670927 198802 1 001



## GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : KECAMATAN SEMBILAN KOTO  
TAHUN : 2021  
ANGGARAN

<b>PROGRAM</b>	Program Koordinasi Kecamatan		
<b>KODE PROGRAM</b>	4.01.4.01.09.86.04		
<b>KEGIATAN</b>	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan		
<b>HASIL/OUTPUT</b>	Terumuskannya usulan program dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2021 yang responsive gender		
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</b> Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang untuk tahun Tahun 2019 = 115 orang Tahun 2020 = 100 orang Untuk tahun 2020 dari 100 peserta musrenbang terdiri dari 79 peserta laki-laki dan 21 orang peserta wanita</p> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p><b>a. Faktor Kesenjangan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah peserta laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, dengan perbandingan laki-laki 79% dan perempuan 21%;</li> <li>2. Peserta Musrenbang diserahkan kepada pemerintah Nagari;</li> <li>3. Kecenderungan peserta usulan laki-laki lebih diakomodasi dari pada usulan perempuan;</li> </ol> <p><b>b. Penyebab Internal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender ;</li> <li>2. Sedikitnya jumlah\kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan gender yang disediakan;</li> <li>3. Masih rendahnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang</li> </ol> <p><b>c. Penyebab Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terbatasnya keinginan masyarakat dalam Musrenbang;</li> <li>2) Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang;</li> <li>3) Adanya kesibukan/ kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang</li> </ol>		
<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Komponen/ Aktifitas 1</b>	Mengumpulkan DURK Nagari	
		<b>Tujuan</b>	Mengetahui usulan Nagari.
		<b>Alokasi Anggaran</b>	
		Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan	

	<b>Komponen/aktifitas 2</b>	<b>Tujuan</b>	Memilah usulan nagari menjadi usulan prioritas kecamatan
		<b>Alokasi Anggaran</b>	
	<b>Komponen/aktifitas 3</b>	Distribusi undangan ke nagari	
		<b>Tujuan</b>	Memberi tahu waktu pelaksanaan musrenbang
		<b>Alokasi Anggaran</b>	
	<b>Komponen/aktifitas 4</b>	Menjalin koordinasi dan sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan musrenbang berjalan dengan lancar	
		<b>Tujuan</b>	Mendapatkan kepastian pihak pihak terkait untuk dapat hadir
		<b>Alokasi Anggaran</b>	
	<b>Komponen/aktifitas 5</b>	Mekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang	
		<b>Tujuan</b>	Mendapat hak-hak perempuan dalam menyampaikan usulan dalam musrenbang
<b>Total anggaran</b>		Rp. 12.855.000,-	
<b>CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)</b>	<b>Output :</b> Meningkatnya kehadiran perempuan dan usulan peserta Musrenbang <b>Input :</b> Tersusunnya Dokumen Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2021 yang responsive gender		



Silago, Maret 2020  
Camat Sembilan Koto

**H.SYAIFUL ANWAR.S.Pd.M.Pd**  
NIP. 19670927 198802 1 001

**TIM VERIFIKASI**

<b>INSPEKTUR</b>   <b>KANDAM, S.Sos</b> NIP.19670607 199103 1 004	<b>KEPALA BKD</b>  <b>PARYANTO, S.Sos., MT</b> NIP.19690609 198902 1 001	<b>KEPALA BAPPEDA</b>  <b>Drs. ANDY SUMANTO, CFrA</b> NIP.19681220 199009 1 001	<b>KEPALA DIN SOS PJARPKB</b>  <b>BOBBY R RIZA, S.STP, M.Si</b> NIP.19640521 200012 1 002
--	--	--	---

## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KECAMATAN SITUNG

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9	
PROGRAM : Program Koordinasi Kecamatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Monitoring
<b>KEGIATAN:</b> Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya:  Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang	<b>Akses :</b>  <b>Partisipasi:</b> Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang	- belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang  - Sedikitnya jumlah kuota peserta	Kurangnya keinginan /minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang  Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang	Terumuskannya usulan program prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPDP Tahun Anggaran 2021 yang responsif gender	Mengumpulkan DURKP Nagari  Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan  Distribusi undangan ke nagari  Menjalin koordinasi dan Sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	Meningkatnya kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur  Tersusunnya usulan prioritas kecamatan  Dari kehadiran tahun 2020 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingannya laki-laki 70% dan perempuan 30%  Meningkatnya usulan Peserta Laki-laki 17 % dan perempuan meningkat dari 0 % menjadi 3%	<b>Output :</b> Meningkatnya peran usulan laki-laki dari 1 % menjadi 65 %, perempuan usulan perempuan dari 5 % menjadi 35 %  <b>Outcome :</b> Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKPDP Yang Responsif Gen	
<b>TUJUAN:</b> Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan Yang tertampung dalam RKPDP	Tahun 2017, dari 100 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 63 orang peserta laki-laki dan 37 Orang peserta perempuan  Tahun 2018, dari 102 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 67 orang peserta laki-laki dan 35 Orang peserta perempuan  Tahun 2019 : 106 Org Tahun 2020 : 86 Org	<b>Manfaat:</b> Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>Tahun 2019, dari 106 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 57 orang peserta laki-laki dan 49 Orang peserta perempuan</p> <p>Tahun 2020, dari 86 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 47 orang peserta laki-laki dan 39 Orang peserta perempuan</p> <p>Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 80 orang yang hadir 47 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 15 orang (15 %), peserta perempuan yang diundang sebanyak 50 orang yang hadir 39 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 5 orang (5%)</p>	<p><b>Kontrol</b> Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya</p>	<p>- Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang</p> <p>- Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan</p>	<p>Sosial Budaya Minang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat</p>		<p>Mekomendasikan ke Bappreda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang</p> <p>Melakukan sosialisasi internal tentang penting, keterwakilan perempuan di musrenbang</p>	<p>Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 80 orang yang hadir 47 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 15 orang (15 %)</p> <p>peserta perempuan yang diundang sebanyak 50 orang yang hadir 39 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 5 orang (5%)</p>	

Sitiung, 20 Maret 2020

**Pihak Pertama**  
CAMAT SITIUNG



H. HAMIDI, S.Sos  
NIP. 196304051985031011

Tim Verifikasi

 Inspektur KANDAM, S.Sos NIP 19670607 199103 1 004	 Kepala BKO PARYANTO, S.Sos./M.T. NIP 196996609 198902 1 001	 Kepala Bappeda Drs. ANDY SUMANTO, CFA NIP 19681220 199009 1 001	 Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB BOBBY P. RIZA, S.SIP, M.Si. NIP 19820521 200012 1 002
--	---	--	---

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

<b>SKPD</b>	: <b>KECAMATAN SITIUNG</b>
<b>TAHUN ANGGARAN</b>	: <b>2021</b>
<b>PROGRAM</b>	COORDINASI KECAMATAN
<b>KODE PROGRAM</b>	4.01.4.01.10.86.04
<b>KEGIATAN</b>	PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN
<b>HASIL/OUTPUT</b>	Terumuskan-nya usulan program Perioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2021 yang responsif gender

<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya</li> <li>➢ Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang</li> <li>➢ Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang (Tahun 2019 106 orang, tahun 2020 86 orang)</li> <li>➢ Tahun 2019, dari 106 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 57 orang peserta laki- laki dan 49 Orang peserta perempuan</li> <li>➢ Tahun 2020, dari 86 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 47 orang peserta laki- laki dan 39 Orang peserta perempuan</li> <li>➢ Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 80 orang yang hadir 47 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 15 orang (15 %), peserta perempuan yang diundang sebanyak 50 orang yang hadir 39 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 8 orang (8%)</li> </ul> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p><b>a. Faktor Kesenjangan</b></p> <p><b><u>Partisipasi</u></b> : Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang</p> <p><b><u>Manfaat</u></b> : Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang</p> <p><b><u>Kontrol</u></b>. Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya</p> <p><b>b. Penyebab Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki- laki pada musrenbang</li> <li>➢ Sedikitnya jumlah kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan</li> <li>➢ Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang</li> <li>➢ Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan</li> </ul> <p><b>c. Penyebab Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang</li> <li>➢ Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang</li> <li>➢ Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta</li> </ul>
-------------------------	---

<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Komponen/ Aktifitas 1</b>	Mengumpulkan DURKP Nagari	
		<b>Tujuan</b>	Mengetahui Jumlah usulan Nagari
		<b>Alokasi Anggaran</b>	
	<b>Komponen/ aktifitas 2</b>	Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan	
		<b>Tujuan</b>	Memilah usulan nagari menjadikan usulan prioritas kecamatan
		<b>Alokasi Anggaran</b>	
	<b>Komponen/ aktifitas 3</b>	Distribusi undangan ke nagari	
		<b>Tujuan</b>	Memberitahu waktu pelaksanaan musrenbang
		<b>Alokasi Anggaran</b>	
	<b>Komponen/ aktifitas 4</b>	Menjalin koordinasi dan Sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	
		<b>Tujuan</b>	Mendapatkan kepastian kehadiran pihak-pihak terkait
		<b>Alokasi Anggaran</b>	

	<b>Komponen/aktifitas 5</b>	Mekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang
	<b>Tujuan</b>	Supaya perempuan bisa banyak ikut serta dalam kegiatan Musrenbang
	<b>Alokasi Anggaran</b>	
	<b>Komponen/aktifitas 6</b>	Melakukan sosialisasi internal tentang penting keterwakilan perempuan di musrenbang
	<b>Tujuan</b>	Perempuan lebih paham tentang kedudukannya dan perannya dalam musrenbang
	<b>Alokasi Anggaran</b>	
	<b>Total anggaran</b>	Rp. 20.000.000,-
<b>CAPAIAN PROGRAM</b> (di level kegiatan)	<b>Output :</b> Meningkatnya peran usulan laki-laki dari 15 % menjadi 65 %, peran usulan perempuan dari 8 % menjadi 35 %  <b>Outcome :</b> Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKPD Yang Responsif Gender	

Sitiung, 20 Maret 2020

**Pihak Pertama**  
CAMAT SITIUNG

*H. HAMIDI*  
H.HAMIDI, S.Sos  
NIP. 196204051985031011

**Tim Verifikasi**

Inspektur  Kandam, S.Sos NIP 19670607 199103 1 004	Kepala BKD  Paryanto, S.Sos, M.T. NIP 19690609 198902 1 001	Kepala Bappeda  Drs. Andy Sumanto, CFA NIP 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas Sosial, P3A PPKB DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUKUR DAN KEKAWAHLAN BERENCANA Bobby P. Riza, S.STP., M.Si NIP 19820521 200012 1 002
---	--	---	--

FORMAT GBS

<b>PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)</b>		
<b>SKPD</b> <b>TAHUN ANGGARAN</b>	<b>: KECAMATAN SUNGAI RUMBAI</b> <b>: 2021</b>	
<b>PROGRAM</b>	KOORDINASI KECAMATAN	
<b>KODE PROGRAM</b>	4.01.4.01.08.86	
<b>KEGIATAN</b>	PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN	
<b>HASIL/OUTPUT</b>	Terumuskan-nya usulan program Perioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2021 yang responsif gender	
<b>ANALISIS SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya</li> <li>➢ Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang</li> <li>➢ Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang (Tahun 2019 100 orang, tahun 2020 100 orang)</li> <li>➢ Tahun 2019, dari 100 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 71 orang peserta laki-laki dan 29 Orang peserta perempuan</li> <li>➢ Tahun 2020, dari 135 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 85 orang peserta laki-laki dan 50 Orang peserta perempuan</li> <li>➢ Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 65 orang yang hadir 46 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 10 orang (10 %), peserta perempuan yang diundang sebanyak 35 orang yang hadir 54 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 6 orang (6%)</li> </ul> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p><b>a. Faktor Kesenjangan</b></p> <p><b><u>Partisipasi</u></b> : Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang</p> <p><b><u>Manfaat</u></b> : Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang</p> <p><b><u>Kontrol.</u></b> Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya</p> <p><b>b. Penyebab Interna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang</li> <li>➢ Sedikitnya jumlah kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan</li> <li>➢ Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang</li> <li>➢ Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan</li> </ul> <p><b>c. Penyebab Eksterna</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang</li> <li>➢ Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang</li> <li>➢ Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang</li> <li>➢ Sosial Budaya Minang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat</li> </ul>	
<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Komponen/ Aktifitas 1</b>	Mengumpulkan DURKP Nagari
		<b>Tujuan</b> Mengetahui Jumlah usulan Nagari
		<b>Alokasi Anggaran</b>
		Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan

	<b>Komponen/aktifitas 5</b>	Mekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang
	<b>Tujuan</b>	Supaya perempuan bisa banyak ikut serta dalam kegiatan Musrenbang
	<b>Alokasi Anggaran</b>	
	<b>Komponen/aktifitas 6</b>	Melakukan sosialisasi internal tentang penting keterwakilan perempuan di musrenbang
	<b>Tujuan</b>	Perempuan lebih paham tentang kedudukannya dan perannya dalam musrenbang
	<b>Alokasi Anggaran</b>	
	<b>Total anggaran</b>	Rp. 14.500.000,-
<b>CAPAIAN PROGRAM</b> (di level kegiatan)	<b>Output :</b> Meningkatnya peran usulan laki-laki dari 10 % menjadi 60 %, peran usulan perempuan dari 6 % menjadi 40 %  <b>Outcome :</b> Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKPD Yang Responsif Gender	

Sungai Rumbai, 20 Maret 2020  
Camat Sungai Rumbai,

MASNAL, SE  
NIP. 19640101 198602 1 004

Tim Verifikasi

Inspektur  Kandam., S.Sos. NIP 19670607 199103 1 004	Kepala BKD  Panyanto, S.Sos., M.T. NIP 19690609 198902 1 001	Kepala Bappeda  Drs. Andy Sumanto, C.Fr.A. NIP 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDIDUK DAN KELUARGA BERENCANA Bobby P. Riza, S.STP., M.S. NIP 19820521 200012 1 002
---	---	---	--

## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KECAMATAN SUNGAI RUMBAI

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9		
PROGRAM : Program Koordinasi Kecamatan	Data Pembuka Wawasan	Faktor Kesenjangan	Isu Gender	Sebab Kesenjangan Eksternal	Sebab Kesenjangan Internal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Monitoring	Indikator Gender
<b>KEGIATAN:</b> Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan  <b>TUJUAN:</b> Persentase Hasil Musrenbang Kecamatan yang tertampung dalam RKPD	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya  Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang  Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang <b>Tahun 2019 :</b> 100 org <b>Tahun 2020 :</b> 100 org	<b>Akses :</b>  <b>Partisipasi :</b> Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang  <b>Manfaat :</b> Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang	- belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang  - Sedikitnya jumlah/kuota peserta Musrenbang dari unsur keterampilan perempuan yang disediakan	Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang  Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang	Terumuskan-nya usulan program Peroritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPDP Tahun Anggaran 2021 yang responsif gender	Mengumpulkan DURKP Nagari  Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan  Distribusi undangan ke nagari  Menjalin koordinasi dan Sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	Meningkatkan kehadiran peserta Musrenbang dari berbagai unsur  Tersusunnya usulan prioritas kecamatan  Dari kehadiran tahun 2020 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingannya laki-laki 62% dan perempuan 38%  Meningkatnya usulan Peserta Laki-laki 17 % dan perempuan meningkat dari 0 % menjadi 3%	<b>Output :</b> Meningkatnya peran usulan laki-laki dari 1 % menjadi 60 %, perempuan dari 0 % menjadi 40 %  <b>Outcome :</b> Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKPDP Yang Responsif Gen		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 65 orang yang hadir 46 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 10 orang (10 %), peserta perempuan yang diundang sebanyak 35 orang yang hadir 54 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 6 orang (6%)	<b>Kontrol</b> Dalam Musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya	- Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang  - Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan	Sosial Budaya Minang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat		Mekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang	Melakukan sosialisasi internal tentang penting keterwakilan perempuan di musrenbang	Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 65 orang yang hadir 46 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 10 orang (10 %) peserta perempuan yang diundang sebanyak 35 orang yang hadir 54 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 6 orang (6%)	



Sungai Rumbai, 20 Maret 2020  
CAMAT SUNGAI RUMBAI,

MASNAL, SE  
NIP. 19640101 198602 1 004

**Tim Verifikasi**

<p>Inspektur</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>KANDAM, S.Sos NIP 19670607 199103 1 004</p>	<p>Kepala BKD</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>PARYANTO, S.Sos., M.T. NIP 19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Bappeda</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Drs. ANDY SUMANTO, CFTA NIP 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>BOBRI P. RIZA, S.STP, M.Si. NIP 19630521 200012 1 002</p>
---	---	--	--





1	2	3	4	5	6	7	8	
	Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 75 orang yang hadir 56 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 15 orang (15 %), peserta perempuan yang diundang sebanyak 45 orang yang hadir 64 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 5 orang (5%)	Kontrol Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya	Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan	Sosial Budaya Miliang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat		Mekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang	Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 75 orang yang hadir 56 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 10 orang (10 %)	Musrenbang 2020 Jumlah peserta perempuan yang diundang sebanyak 45 orang yang hadir 64 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 5 orang (5%)

Inspektor  
KANDAM, S.Sos  
NIP. 19670607 199103 1 004

Kepala BKO  
R. RYANTO, S.Sos., M.Pd  
NIP. 19690609 198902 1 001

Kepala Bappeda  
Drs. ANDY SUMANTO, CFA  
NIP. 19681220 199009 1 001

Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKA  
BOBBY RIZA, S.STP., M.Si.  
NIP. 19820521 200012 1 002

Tim Verifikasi

Tabek, 20 Maret 2020  
Camel Timon  
ZULKIFLI, S.Pd.MM  
NIP. 19621119 198203 1 003

FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : KECAMATAN TIMPEH  
TAHUN ANGGARAN : 2021

PROGRAM : KOORDINASI KECAMATAN

KODE PROGRAM : 4.01.4.01.10.86.04

KEGIATAN : PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN

HASIL/OUTPUT : Terumuskan-nya usulan program Prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2021 yang responsif gender

ANALISIS SITUAS

1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).

- Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya
- Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang
- Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang (Tahun 2019 120 orang, tahun 2020 120 orang)
- Tahun 2019, dari 120 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 84 orang peserta laki-laki dan 36 Orang peserta perempuan
- Tahun 2020, dari 145 Orang ada, diikuti oleh sebanyak 85 orang peserta laki-laki dan 60 Orang peserta perempuan
- Dari Notulen Usulan Musrenbang 2020 Jumlah peserta laki-laki yang diundang 70 orang yang hadir 65 orang, yang menyampaikan usulan sebanyak 15 orang (15 %), peserta perempuan yang diundang sebanyak 50 orang yang hadir 55 orang, dan yang menyampaikan usulan sebanyak 8 orang (8%)

2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a.

**Faktor Kesenjangan**

Partisipasi : Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang

Manfaat : Belum semua masyarakat (perempuan) mengetahui manfaat dari kegiatan Musrenbang

Kontrol . Dalam musrenbang Peserta perempuan masih sedikit yang berani menyampaikan usulannya

b. Penyebab Internal

- Belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang
- Sedikitnya jumlah/kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan perempuan yang disediakan
- Masih rendahnya SDM dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang
- Adanya Mutasi Pejabat Pengelola Musrenbang Kecamatan

c. Penyebab Eksternal

- Kurangnya keinginan / minat masyarakat untuk menghadiri Musrenbang
- Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang
- Adanya kesibukan / kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang
- Sosial Budaya Minang kabau, dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat

RENCANA AKSI	Komponen/ Aktifitas 1	Mengumpulkan DURKP Nagari	
		Tujuan	Mengetahui Jumlah usulan Nagari
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ aktifitas 2	Merekap data untuk usulan prioritas kecamatan	
		Tujuan	Memilah usulan nagari menjadikan usulan prioritas kecamatan
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ aktifitas 3	Distribusi undangan ke nagari	
		Tujuan	Memberitahu waktu pelaksanaan musrenbang
		Alokasi Anggaran	
	Komponen/ aktifitas 4	Menjalin koordinasi dan Sosialisasi secara internal dengan pihak terkait sehingga kegiatan Musrenbang berjalan lancar	
		Tujuan	Mendapatkan kepastian kehadiran pihak-pihak terkait
		Alokasi Anggaran	

	<b>Komponen/ aktifitas 5</b>	Mekomendasikan ke Bappeda untuk membuat regulasi/kebijakan tentang keikutsertaan perempuan dalam kegiatan Musrenbang
	Tujuan	Supaya perempuan bisa banyak ikut serta dalam kegiatan Musrenbang
	Alokasi Anggaran	
	<b>Komponen/ aktifitas 6</b>	Melakukan sosialisasi internal tentang penting keterwakilan perempuan di musrenbang
	Tujuan	Perempuan lebih paham tentang kedudukannya dan perannya dalam musrenbang
	Alokasi Anggaran	
	<b>Total anggaran</b>	Rp. 25.000.000,-
<b>CAPAIAN PROGRAM</b> (di level kegiatan)	<b>Output :</b> Meningkatnya peran usulan laki-laki dari 15 % menjadi 65 %, peran usulan perempuan dari 8 % menjadi 35 %  <b>Outcome :</b> Usulan Musrenbang tertampung di Musrenbang RKPD Yang Responsif Gender	

Tabek, 20 Maret 2020  
Camet Timpeh

ZULKIFLI, S.S.Pd.MM  
NIP. 19621119 198302 1 003

Tim Verifikasi

Inspektur  Kandam, S.Sos NIP 19670607 199103 1 004	Kepala BKD  Paryanto, S.Sos., M.T. NIP 19690609 198902 1 001	Kepala Bappeda  Drs. Andy Sumanto, CFA NIP 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas Sosial (P3A) PPKB  DINAS SOSIAL, PEMBUDAYAAN, PEREKONOMIAN PERUMAHAN DAN KELUARGA BERENCANA Bobby F. Riza, S.STP., M.Si NIP 19620521 200012 1 002
---	---	---	---

## GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KECAMATAN TIUMANG

Program : Program Koordinasi Kecamatan

Program	Angket	Formasi	Angket	Angket	Angket	Angket	Angket	
PROGRAM : Program Koordinasi Kecamatan	Data Pembukaan Wawasan	ISU GENDER			KEBLAKUKAN DAN RENCANA AKSI KE DEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
<b>KEGIATAN:</b> Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Kegiatan Musrenbang dilaksanakan akan setiap Tahunnya	<b>Akses:</b> Masih banyak kaum perempuan yang kurang memberikan usulan dalam kegiatan musrenbang	belum adanya regulasi yang mengatur representasi perempuan dan laki-laki pada musrenbang. Sedangkan jumlahnya gender tidak	Kurangnya informasi/ minat masyarakat untuk mengikuti musrenbang. Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang Adanya keabakur/keabakan kegiatan lain dan calon peserta Musrenbang. Sosial budaya Minang-abau dimana perempuan tidak banyak memberikan pendapat	Terumuskannya usulan program prioritas dan kegiatan untuk Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2021 yang responsive gender	Mengumpulkan DURKPD ngan Merkap data untuk usulan prioritas kecamatan	Meningkatkan kehadiran peserta Musrenbang dan berbagai unsur terurusnya usulan prioritas kecamatan	Output : Meningkatkan peran usulan laki-laki dari 17 % menjadi 60 % peran usulan perempuan dari 4 % menjadi 40%
<b>TUJUAN:</b> Peningkatan Musrenbang Kecamatan yang amatan Yang Tertampung RKPD	Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang Tahun 2018 : 60 Orang Tahun 2019 : 60 Orang Tahun 2020 : 60 Orang	<b>Manfaat:</b> Belum semua masyarakat (perempuan) mengikuti musrenbang	Musrenbang dari unsur pemerintahan disediakan. Masih rendahnya SDM dan pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang. Adanya mutasi pejabat pengkaha musrenbang kecamatan	Dari kehadiran tahun 2020 lebih dominan laki-laki dari pada perempuan, perbandingannya laki-laki 60 % dan perempuan 40 %	Outcome : Usulan musrenbang tertampung di musrenbang RKPD Tahun 2021 yang responsif gender	Tahun 2018, dari 60 orang ada diikuti sebanyak 50 orang peserta laki-laki dan 10 orang peserta	kontrol dalam musrenbang	

<p>perempuan</p> <p>Tahun 2019, dari 60 orang ada, diikuti sebanyak 45 orang peserta laki-laki dan 15 orang peserta perempuan</p> <p>Tahun 2020, dari 60 orang ada, diikuti sebanyak 40 orang peserta laki-laki dan 20 orang peserta perempuan</p> <p>Dari notulen usulan musrembang 2020 peserta laki-laki sebanyak 15 usulan (17%) dan peserta perempuan sebanyak 2 usulan (4%)</p>	<p>peserta perempuan masih sedikit yang berani menampilkan usulannya</p>														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Inspektur  
 KANDAM, S.Sos  
 NIP. 19680607 199103 1 004

Koordinator  
 Tim Verifikasi  
 PARYANTO, S.Sos, M.Ts  
 NIP. 19690609 198502 1 001

Kepala Bappeda  
 Drs. ANDY SUMANTO, CTA  
 NIP. 19581220 199009 1 001

Kepala Dinas Sosial, P3K, PPKS  
 ARWINTA  
 NIP. 19670819 198803 1004

Kepala Dinas Sosial, P3K, PPKS  
 BOHAR  
 NIP. 19880521 200012 1 002



**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER  
(GENDER BUDGET STATEMENT)**

OPD : KECAMATAN TIUMANG  
TAHUN ANGGARAN : 2020

PROGRAM	Program Koordinasi Kecamatan
KODE PROGRAM	4.01.4.01.15.01.57
KEGIATAN	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa
HASIL/OUTPUT	Kesesuaian Dokumen Perencanaandan Aturan Perencanaan
TUJUAN	Memperoleh usulan pembangunan dari seluruh nagari

**ANALISIS SITUASI**

**1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender).**  
 Kegiatan Musrenbang dilaksanakan setiap tahunnya Masing-masing nagari mengutus peserta untuk mengikuti musrenbang  
 Jumlah Peserta yang mengikuti Musrenbang  
 Tahun 2018 : 60 Orang  
 Tahun 2019 : 60 Orang  
 Tahun 2020, dan 60 Peserta ada sebanyak 40 peserta laki-laki dan 20 peserta perempuan

**2. Isudan Faktor Kesenjangan Gender**

**a. Faktor Kesenjangan**

- 1) Jumlah peserta laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, dengan perbandingan laki-laki 60% dan perempuan 40%;
- 2) Peserta Musrenbang diserahkan kepada pemerintah Nagari;
- 3) Kecenderungan peserta usulan laki-laki lebih diakomodasi daripada usulan perempuan;

**b. Penyebab Internal**

- 1) Belum adanya regulasi yang mengatur representasi keterwakilan gender ;
- 2) Sedikitnya jumlah kuota peserta Musrenbang dari unsur keterwakilan gender yang disediakan;
- 3) Masih rendahnya pemahaman dan komitmen dari pihak terkait tentang kegiatan Musrenbang

**c. Penyebab Eksternal**

- 1) Terbatasnya keinginan masyarakat dalam Musrenbang;
- 2) Kurangnya informasi tentang kegiatan Musrenbang;
- 3) Adanya kesibukan/ kegiatan lain dari calon peserta Musrenbang

<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Komponen 1</b>	Memberikan advokasi
		<b>Tujuan :</b> Meningkatkan pemahaman bahwa keterwakilan gender merupakan bagian penting dari proses perencanaan pembangunan.
	<b>Komponen 2</b>	Melaksanakan sosialisasi
		<b>Tujuan :</b> Memberikan informasi awal tentang Musrenbang tingkat Kecamatan dan Nagari
<b>Total Anggaran</b>		Rp. 4.000.000 (empat Juta Rupiah)

**Indikator Output**

Tersusunnya Dokumen Rancangan RKPD Tahun Anggaran 2021 yang responsif gender

**Indikator Outcome**

Jumlah RKPD Tahun 2021 yang responsif gender

Tumang, 20 Maret 2020



**Tim Verifikasi**

Inspektur

Kandam, S.Sos

NIP 19670607 199103 1 004

Kepala BKD

Paryanto, S.Sos., M.T

NIP 19690609 198902 1 001

Kepala Bappeda

Drs. Andy Sumarno, CPM

NIP 19681220 199008 1 001

Kepala Dinas Sosial, PPKA

Rahy P. Riza, S.STP, M.Si

NIP 19620321 200012





Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan</b>	<b>Data Pembuka Wawasan</b>	<b>ISU GENDER</b>						
		<b>Faktor Kesenjangan</b>	<b>Sebab Kesenjangan Internal</b>	<b>Sebab Kesenjangan Eksternal</b>	<b>Reformulasi Tujuan</b>	<b>Rencana Aksi</b>	<b>Basis Data (Base-Line)</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>Program :</b> Perkara ditingkatkan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung	<b>Kondisi Geografis Kabupaten Dharmasraya yang luas sehingga sulit di akses terlebih oleh para pihak terutama perempuan.</b>  <b>Data Perkara Sidang Kelling Tahun 2019</b> 1. Cerai Talak : - 2. Cerai Gugat : -	<b>Akses:</b> Kondisi geografis Kabupaten Dharmasraya yang luas sehingga secara biaya transportasi dan ketidak mampuan para pencari keadilan terlebih bagi perempuan dalam mengakses pengadilan	- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Sidang Luar Gedung  - Proses perencanaan dan manajemen pelaksanaan harus di susun terlebih dahulu setiap tahunnya dalam Anggaran DIRA.	Kondisi geografis Kabupaten Dharmasraya yang luas sehingga biaya transportasi dan ketidak mampuan para pencari keadilan terlebih bagi perempuan dalam mengakses pengadilan	1. Mengadakan kegiatan dalam sidang kelling secara rutin tiap tahunnya  2. Menyajikan bentuk layanan terhadap masyarakat karang mampu dalam hal biaya transportasi untuk proses berperkara	- Sosialisasi kepada semua kecamatan di kabupaten dharmasraya terkait tentang Adanya pelaksanaan Sidang Kelling sehingga program ini di ketahui oleh masyarakat di daerah terpencil  - Perlu nya kerjasama dengan instansi lain khususnya pemerintah Kabupaten Dharmasraya melalui Kantor Camat dan Kantor wali nagari, Kantor Urusan Agama, dan Dinas pencatatan Sipil.	<b>Data Perkara Sidang Kelling Tahun 2020 :</b> 1. Cerai Talak : 2 2. Cerai Gugat : 7	<b>Output :</b> - Terbantu nya masyarakat pencari keadilan yang berdomisili di daerah terpencil dalam proses berperkara
<b>Tujuan :</b> Memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.		<b>Partisipasi Masyarakat</b> Masyarakat kurang mampu yang mengalami kendala biaya transportasi ketika ingin mengajukan gugatan perceraian di Kabupaten Dharmasraya						<b>Outcome :</b> - Meningkat nya kesadaran hukum bagi masyarakat pencari keadilan
		<b>Manfaat</b> Memberikan keringan biaya kepada Para Pencari Keadilan khususnya Perempuan kurang mampu dan terkendala jarak dan biaya transportasi						

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja

Pulau Punjung, Maret 2020  
Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung

Salman, SH., MA  
NIP. 19790407 200704 1 001

Tim Verifikasi

Inspektur Kandam, S.Sos NIP. 19670607 199203 1 004	Kepala BKD Paryanto, S.Sos, M.P. NIP. 10690609 198402 1 001	Kepala Bappeda Drs. Andy Salmanto, CFA NIP. 19681220 199009 1 001	Kepala Dinas SOSPA Rokhy P. Rizal, S.STP, M.Si NIP. 19820521 200012 1 002
--	---	---	---

**GENDER BUDGET STATEMENT  
(Pernyataan Anggaran Gender)**

SKPD : Pengadilan Agama Pulau Punjung  
TAHUN ANGGARAN : 2020

PROGRAM	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
KODE PROGRAM	
ANALISA SITUASI	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</b>  <i>Data Perkara pada tahun 2019:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cerai Gugat : 50</li> <li>2. Cerai Talak : 25</li> <li>3. Isbat Nikah : 15</li> <li>4. Dispensasi nikah : 2</li> </ol> <p>- Kabupaten Dharmasraya yang luas sehingga sulit di akses terlebih oleh para pihak terutama perempuan.          - Data Perkara Sidang Keliling Tahun 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cerai Talak : -</li> <li>2. Cerai Gugat : -</li> </ol> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p><b>a. Faktor Kesenjangan</b></p> <p><u>Akses:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masyarakat Pencari Keadilan Khususnya perempuan yang memiliki kondisi ekonomi yang kurang mampu di Kabupaten Dharmasraya.</li> <li>- Kondisi geografis Kabupaten Dharmasraya yang luas sehingga secara biaya transportasi dan ketidak mampuan para pencari keadilan terlebih bagi perempuan dalam mengakses Pengadilan</li> </ul> <p><u>Partisipasi</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan yang berprofesi sebagai Ibu rumah tangga yang ingin mengajukan gugatan perceraian di Kabupaten Dharmasraya</li> <li>- Masyarakat kurang mampu yang mengalami kendala biaya transportasi ketika ingin mengajukan gugatan perceraian di Kabupaten Dharmasraya.</li> </ul> <p><u>Manfaat</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan keringan biaya kepada Para Pencari Keadilan Khususnya Perempuan dengan profesi Ibu rumah tangga.</li> <li>- Memberikan keringan biaya kepada Para Pencari Keadilan Khususnya Perempuan kurang mampu dan terkendala jarak dan biaya transportasi</li> </ul> <p><b>b. Penyebab Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan</li> <li>- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Sidang Luar Gedung</li> <li>- Proses perencanaan dan manajemen pelaksanaan harus diusulkan terlebih dahulu setiap tahunnya dalam Anggaran DIPA</li> </ul>

	<p>-Belum tersedianya Ruang Bermain anak dan Ruang Laktasi bagi ibu menyusui.</p> <p><b>c. Penyebab Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketidak mampuan secara ekonomi bagi para pihak istri untuk biaya proses peradilan.</li> <li>- Faktor budaya dan kebiasaan suatu daerah bagi pihak perempuan tidak biasa untuk mengajukan gugatan perceraian kepada suami.</li> <li>- <i>Kondisi geografis Kabupaten Dharmasraya yang luas sehingga secara biaya transportasi dan ketidak mampuan para pencari keadilan terlebih bagi perempuan dalam mengakses Pengadilan</i></li> </ul>	
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<b>1. Tolak Ukur</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat pencari keadilan khususnya kaum perempuan</i></li> </ul>	
	<b>2. Indikator dan Target Kinerja</b>	
	<p><b>Output :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah banyaknya pihak pencari keadilan mendapat akses peradilan</li> <li>- <i>Terbantunya masyarakat pencari keadilan yang berdomisili di daerah terpencil dalam proses berperkara</i></li> </ul> <p><b>Outcome :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Meningkatnya kesadaran hukum bagi masyarakat pencari keadilan khususnya kaum perempuan</i></li> </ul>	
<b>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</b>	Rp 21.500.000,-	
<b>RENCANA AKSI</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang diluar gedung</b>
	<b>Masukan</b>	Rp. 21.500.000,-
	<b>Keluaran</b>	- <i>Terbantunya masyarakat pencari keadilan yang berdomisili di daerah terpencil dalam proses berperkara</i>
	<b>Hasil</b>	- <i>Meningkatnya kesadaran hukum bagi masyarakat pencari keadilan khususnya kaum perempuan</i>

Pulau Punjung, Maret 2020  
Wakil Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung



Salmari, SHI., MA  
NIP. 19790407 200704 1 001

Tim Verifikasi

Inspektur	Kepala BKD	Kepala Bappeda	Kepala Dinas SOSP3APPKB
 Kandam, S.Sos NIP. 19670607 199203 1 004	 Paryanto, S.Sos, M.T. NIP. 10690609 198902 1 001	 Drs. Andy Sumanto, CFrA NIP. 19681220 199009 1 001	 Bobby R. Riza, S.STP, M.Si NIP. 19820521 200012 1 002

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

SKPD : RSUD SUNGAI DAREH

PROGRAM : Peningkatan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p><b>Program :</b> Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata</p> <p><b>Kegiatan :</b> Pembangunan Gedung Baru Rumah Sakit</p> <p><b>Tujuan :</b> Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit</p>	<p>a. Pembangunan gedung baru rumah sakit merupakan pembangunan gedung untuk pelayanan spesialis dan rawatan pasien rawat inap dengan pemisahan pasien laki-laki dan perempuan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana</p> <p>b. Data kunjungan pasien rawat inap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tahun 2018 9620 orang (laki-laki 42,87% dan perempuan 57,13%)</li> <li>● Tahun 2019 9929 orang (laki-laki 41,76% dan perempuan 58,24%)</li> </ul>	<p>Dengan belum tersedianya sarana untuk pemisahan pasien laki-laki dan perempuan akan menimbulkan kesenjangan dilihat dari aspek berikut :</p> <p><b>Akses:</b> Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana</p> <p><b>Manfaat</b> Pemahaman dan kesadaran pengguna fasilitas di RS belum optimal</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya anggaran yang tersedia</li> <li>- Belum pahamnya konsep gender pada waktu perencanaan pembangunan gedung</li> <li>- Belum adanya survey yang memuat indikator sarana untuk pasien laki-laki dan perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsultan perencana belum memahami pembangunan gedung baru berbasis gender</li> <li>- Masyarakat belum memahami konsep gender</li> </ul>	<p>Peningkatan mutu pelayanan, dengan menyediakan sarana yang responsif gender</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan gedung baru rumah sakit</li> </ul>	<p>Data kunjungan pasien rawat inap</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Tahun 2018 9620 orang (laki-laki 42,87% dan perempuan 57,13%)</li> <li>● Tahun 2019 9929 orang (laki-laki 41,76% dan perempuan 58,24%)</li> </ul>	<p>Output : Terbangunnya gedung baru rumah sakit</p> <p>Outcome : Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat yang ditandai dengan survey tingkat kepuasan masyarakat</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja

Pulau-Pinjung, Maret 2020  
Direktur RSUD Sungai Dareh

Dr. Chusnul Chotimah Subekti, MPH  
NIP. 19730412 200312 2 005

 Inspektur Karam, S.Sos NIP. 19670601 199203 1 004	 Kepala BKE Paryanto, S.Sos, M.T NIP. 10690609 198902 1 001	 Kepala Bappeda Drs. Andy Sumanto, CFrA NIP. 19681220 199009 1 001	 Kepala Dinas Bobby P. Riza, S.STP, M.Si NIP. 19820521 200012 1 002
--	---	---	---

**GENDER BUDGET STATEMENT  
(Pernyataan Anggaran Gender)**

SKPD : RSUD Sungai Dareh  
TAHUN ANGGARAN : 2020

<b>PROGRAM</b>	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		
<b>KODE PROGRAM</b>	26.35		
<b>ANALISA SITUASI</b>	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</b>            Data kunjungan pasien rawat inap            Tahun 2018 9620 orang (laki-laki 42,87% dan perempuan 57,13%)            Tahun 2019 9929 orang (laki-laki 41,76% dan perempuan 58,24%)</p> <p>Dari data kunjungan terdapat peningkatan pasien dari tahun sebelumnya.</p> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b>  <b>a. Faktor Kesenjangan</b>  <u>Akses:</u>            Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana sehingga belum bisa dipisahkan pasien rawat inap antara laki-laki dan perempuan</p> <p><u>Manfaat</u>            Pemahaman dan kesadaran pengguna fasilitas di RS belum optimal</p> <p><b>b. Penyebab Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya anggaran yang tersedia</li> <li>- Belum pahamnya konsep gender pada waktu perencanaan pembangunan gedung</li> <li>- Belum adanya survey yang memuat indikator sarana untuk pasien laki-laki dan perempuan</li> </ul> <p><b>c. Penyebab Eksternal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsultan perencana belum memahami pembangunan gedung berbasis gender</li> <li>- Masyarakat belum memahami konsep gender</li> </ul>		
<b>CAPAIAN PROGRAM</b>	<p><b>1. Tolak Ukur</b>            Terlaksananya pembangunan gedung baru rumah sakit</p> <p><b>2. Indikator dan Target Kinerja</b></p> <p><b>Output :</b> Terbangunnya gedung baru rumah sakit dengan adanya pemisahan rawat inap pasien laki-laki dan perempuan</p> <p><b>Outcome :</b>            Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang ditandai dengan survey tingkat kepuasan masyarakat</p>		
<b>JUMLAH ANGGARAN PROGRAM</b>	Rp 17.800.000.000,-		
<b>RENCANA AKSI RENCANA AKSI</b>	<b>Kegiatan</b>	Pembangunan gedung baru rumah sakit	
	Masukan	Rp. 17.800.000.000,-	
	Keluaran	Terlaksananya pembangunan gedung baru rumah sakit	
	Hasil	Tercapainya sarana dan prasarana yang responsif gender	

Pulau Punjung, Maret 2020

Direktur RSUD Sungai Dareh

Drg. Chusnul Chotimah Subekti, MPH  
NIP. 19730412 200312 2 005



Tim Verifikasi

<p>Inspektur</p>  <p>Kandam, S.Sos NIP. 19670607 199203 1 004</p>	<p>Kepala BKD</p>  <p>Paryanto, S.Sos, M.T</p> <p>NIP. 10690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Bappeda</p>  <p>Drs. Andy Sumanto, CFA</p> <p>NIP. 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala Dinas SOSPPRKB</p>  <p>Bobay Riza, S.STP, M.Si</p> <p>NIP. 19820621 200012 1 002</p>
--	---	--	---

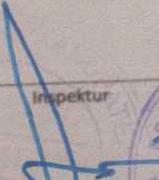
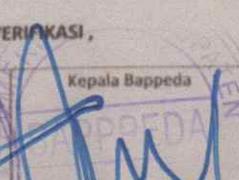
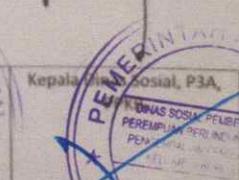


## FORMAT GBS

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER (GENDER BUDGET STATEMENT)																						
SKPD	: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran																					
TAHUN ANGGARAN	: 2021																					
PROGRAM	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan																					
KODE PROGRAM	1.05 1.05.01 01 15																					
KEGIATAN	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat																					
HASIL/OUTPUT	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Lingkungan																					
ANALISIS SITUASI	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan(Data Pilah Gender).</b> Dalam Operasi penertiban Pelajar, yang terjaring kebanyakan siswa laki-laki dibanding perempuan.</p> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan Patroli Rutin Satpol PP lebih banyak bermanfaat bagi perempuan dibandingkan dengan laki-laki.</li> <li>b. Jumlah Patroli rutin Satpol PP yang masih belum mencapai target SPM.</li> <li>c. Masih kurangnya Pengawasan bersama baik pihak keluarga maupun sekolah</li> </ul>																					
RENCANA AKSI	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Komponen/ Aktifitas 1</b></td> <td style="width: 35%;">Meningkatkan persentase Sosialisasi dan penyuluhan terhadap siswa laki-laki</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Tujuan</b></td> <td>Sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya penyakit masyarakat</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Alokasi Anggaran</b></td> <td>Rp. 12.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Meningkatkan Patroli rutin Satpol pp</td> </tr> <tr> <td><b>Komponen/ aktifitas 2</b></td> <td><b>Tujuan</b></td> <td>Patroli rutin</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Alokasi Anggaran</b></td> <td>Rp. 18.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Total anggaran</b></td> <td>Rp. 30.000.000</td> </tr> </table>	<b>Komponen/ Aktifitas 1</b>	Meningkatkan persentase Sosialisasi dan penyuluhan terhadap siswa laki-laki			<b>Tujuan</b>	Sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya penyakit masyarakat		<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 12.000.000,-		Meningkatkan Patroli rutin Satpol pp		<b>Komponen/ aktifitas 2</b>	<b>Tujuan</b>	Patroli rutin		<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 18.000.000,-		<b>Total anggaran</b>	Rp. 30.000.000
<b>Komponen/ Aktifitas 1</b>	Meningkatkan persentase Sosialisasi dan penyuluhan terhadap siswa laki-laki																					
	<b>Tujuan</b>	Sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya penyakit masyarakat																				
	<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 12.000.000,-																				
	Meningkatkan Patroli rutin Satpol pp																					
<b>Komponen/ aktifitas 2</b>	<b>Tujuan</b>	Patroli rutin																				
	<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 18.000.000,-																				
	<b>Total anggaran</b>	Rp. 30.000.000																				
CAPAIAN PROGRAM (di level kegiatan)	Meningkana keamanan dan Kenyamanan Lingkungan																					

Pulau Pinjung, Juni 2019  
Kepala Satpol PP dan Damkar,  
  
**AKRIAL S. Pd. MH**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19600402 198011 1 002

**TIM VERIFIKASI,**

Inspektur  <b>KANDAM, S. Sos</b> NIP. 196706071991031004	KEPALA-BPD  <b>PARYANTO, S. Sos, M. T.</b> NIP. 19690609 989021001	Kepala Bappeda  <b>Drs. ANDY SUMANTO, CDA</b> NIP. 196812201990091001	Kepala Dinas Sosial, P3A, DINAS SOSIAL, PEMBUDAYAAN PEREMPUAN, PERINDUSTRIAN, PENYAIRAN, PERINDUSTRIAN, PERUMAHAN DAN KEMASRAK  <b>BOBBY PRIMA S. STP, M. SI</b> NIP. 198205222000121002
--	--	--	--

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan Masyarakat</b>  <b>Tujuan : Terlaksananya Patroli rutin</b>	<b>Data Pembukaan Wawasan</b>  <i>Dalam Operasi penerbitan Pelajar, yang terjaring kebanyakan siswa laki-laki dibanding perempuan.</i>  <i>Siswa yang terjaring kedatangan merokok</i>  <i>Adanya laporan masyarakat tentang siswa yang berkeluaran</i>	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Aksi ke Depan		Monitoring	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Baseline)	Indikator Gender
		<b>Akses :</b> Kegiatan Patroli Rutin Satpol PP lebih banyak bermanfaat bagi perempuan dibandingkan dengan laki-laki.  <b>Partisipasi:</b> Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang penyakit masyarakat.  <b>Control:</b> Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya laki-laki yang seharusnya lebih banyak diberi penyuluhan tentang	<b>Jumlah Patroli rutin Saatpol PP yang masih belum mencapai target SPM.</b>  <b>Pemahaman SDM yang kurang tentang Pengurusutamaan Gender</b>	<b>Masih kurangnya Pengawasan bersama baik pihak keluarga maupun sekolah</b>  <b>Peraturan sekolah tentang kedisiplinan siswa</b>  <b>Kurangnya peran masyarakat tentang pengawasan</b>	<b>Meningkatnya keamanan dan kenamanan Lingkungan</b>	<b>Meningkatkan persentase Sosialisasi dan penyuluhan terhadap siswa laki-laki</b>  <b>Meningkatkan Patroli rutin Satpol pp</b>	<b>Jumlah kasus</b>	<b>Output :</b> Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Penyakit Masyarakat di lingkungan sekolah terutama ditingkat SLTP dan SLTA.  <b>Outcome :</b> - Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan

Satpol PP	pada jam pelajaran diindikasikan menggunakan / menghisap lem	dampak dan bahaya Penyakit Masyarakat. <b>Manfaat :</b> Kurangnya Sosialisasi penyuluhan dan pembinaan dari pihak-pihak terkait tentang bahaya penyakit masyarakat	bersama terhadap anak sekolah					
-----------	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--


 Pajau Pujung, Juni 2019  
 Kepala Satpol PP dan BPPK,  
 ANRIAI, S.Pd, MEd  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP.196004021980111002

DIN KRIFIKASI

Inspektur  KANDAM S.Sos NIP.196706071991031004	KEPALA BKD  PARYANTO S.Sos, M.T NIP.196906091989021001	Kepala Bappeda  Dis. ANDY SUMANTO, Ctra NIP.196812201990091001	Kepala Dinas Sosial, P3A, P3AB  BOBRY P. RIZA S.STP, M.Si NIP.198205112000121002
---	---	--	---

### Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

OPD : Sekretariat DPRD

PROGRAM : Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

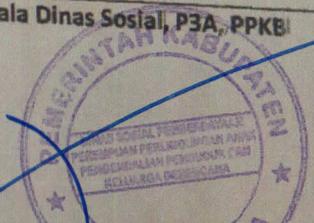
Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p><b>Program :</b> Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah</p> <p><b>Kegiatan:</b> Kunjungan kerja dan anggota DPRD</p> <p><b>Tujuan :</b> Untuk menentukan arah kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok sekretariat DPRD</p>	<p>Jika dilihat dari sudut pandang sebelumnya bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi kinerja sekretariat DPRD belum optimal, sebab memiliki tantangan- tantangan yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi, situasi, peristiwa dan pengaruh lainnya, sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam hal ini para kaum laki-laki lebih dominan, maka dengan adanya kunjungan kerja tidak tertutup kemungkinan perempuan juga memiliki peran yang baik dan belajar untuk memiliki tekad agar tidak terjadi ketimbangan atau kesenjangan gender. Dalam kegiatan ini terbentuk 30 orang anggota DPRD dari sekian praksi dan 18 orang</p>	<p><b>Akses:</b> - Pada umumnya di dominasi oleh kaum laki-laki</p> <p><b>Partisipasi:</b> - Perempuan kurang merasa percaya diri karena banyak tantangan yang tentunya dipengaruhi oleh situasi, kondisi, peristiwa dan pengaruh lainnya</p> <p><b>Control:</b> - Kurangnya sebuah tujuan dalam menerapkan etika birokrasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan</p>	<p>- Kurangnya sebuah tujuan dalam menerapkan etika pelaksanaan tugas kedinasan sehingga bisa menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang andal dan maju dan bisa menghambat pada proses visi, misi program kepala daerah sehingga tidak mampu membangun berbagai potensi daerah.</p>	<p>-Anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan tidak usah terlalu aktif dalam kegiatan kunjungan kerja apalagi keluar daerah, sebaliknya ini hanya didominasi oleh kaum laki-laki.</p>	<p>Terwujudnya dharmasraya yang berilmu pengetahuan dan paham teknologi dan Terangkatnya Perekonomian masyarakat dan terciptanya arah kebijakan yang ingin dicapai serta secara merata sumber kemajuan ekonomi yang beragam (laki-laki dan perempuan)</p>	<p>-Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 11.223.800.000,00,- untuk kegiatan tersebut</p> <p>- Memberikan penjelasan terhadap visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menuju dharmasraya mandiri dan berbudaya</p>	<p>- Dalam kegiatan ini direncanakan akan diikuti oleh 48 orang dari jumlah keseluruhan dengan satu kali tahapan berjumlah 30 orang per kegiatan dengan satu kali tahapan kunjungan kerja berjumlah 5 /8 orang.</p> <p>- Sementara itu diperkirakan yang akan melakukan kunjungan hanya sekitar 40 Orang dari jumlah keseluruhan kegiatan</p>	<p><b>Input :</b> <b>Output:</b> - Hasilnya terciptanya identitas budaya dharmasraya yang multikultural yang berkarya, berinovasi dan mencipta untuk kesejahteraan sehingga meningkatnya kecakapan dan keahlian masyarakat</p> <p><b>Outcome :</b> - Kesejahteraan masyarakat jauh lebih maju dan meningkat, sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahtera lagi.</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/ Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		MONITORING	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	pegawai ASN dengan satu kali tahapan kunjungan kerja berjumlah 5/8 orang.	<b>Manfaat :</b> -Anggapan bahwa kunjungan kerja ini hanya bermanfaat bagi kaum laki-laki						

Pulau Punjung, Maret 2020  
Kepala  
Sekretaris DPRD Kabupaten Dharmasraya

**SETWAN**  
NUSUTION, S.Pd, MM  
Nip. 19640101 198603 1 040

TIM VERIFIKASI,

<p>Inspektur</p>  <p><b>KANDAM, S.Sos</b> NIP.19670607 199103 1 004</p>	<p>KEPALA BKD</p>  <p><b>PARYANTO, S.Sos, M.T</b> NIP.19690609 198902 1 001</p>	<p>Kepala Bappeda</p>  <p><b>Drs. ANDY SUMANTO, CfrA</b> NIP. 19681220 199009 1 001</p>	<p>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB</p>  <p><b>BOBBY R RIZA, S.STP, M.SI</b> NIP.19870521 200012 1002</p>
---	--	---	--

## GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

SKPD : Sekretariat DPRD  
TAHUN ANGGARAN : 2021

PROGRAM	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah							
KEGIATAN	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD							
KODE KEGIATAN	15.06							
ANALISA SITUASI	<p><b>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</b> Jika dilihat dari sudut pandang sebelumnya bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi kinerja sekretariat DPRD belum optimal, sebab memiliki tantangan- tantangan yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi, situasi, peristiwa dan pengaruh lainnya, sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam hal ini para kaum laki-laki lebih dominan, maka dengan adanya kunjungan kerja tidak tertutup kemungkinan perempuan juga memiliki peran yang baik dan belajar untuk memiliki tekad agar tidak terjadi ketimbangan atau kesenjangan gender. Dalam kegiatan ini terbentuk 30 orang anggota DPRD dari sekian praktisi dan 18 orang pegawai ASN dengan satu kali tahapan kunjungan kerja berjumlah 5/8 orang.</p> <p><b>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</b></p> <p><b>a. Faktor Kesenjangan</b></p> <p><b>Akses:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada umumnya di dominasi oleh kaum laki-laki</li> </ul> <p><b>Partisipasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perempuan kurang merasa percaya diri karena banyak tantangan –tantangan yang tentunya dipengaruhi oleh situasi, kondisi, peristiwa dan pengaruh lainnya</li> </ul> <p><b>Control:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya sebuah tujuan dalam menerapkan etika birokrasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan</li> </ul> <p><b>Manfaat :</b></p> <p style="padding-left: 20px;">Anggapan bahwa kunjungan kerja ini hanya bermanfaat bagi kaum laki-laki</p> <p><b>b. Penyebab Internal</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya sebuah tujuan dalam menerapkan etika birokrasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan sehingga bisa menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang andal dan maju dan bisa menghambat pada proses visi, misi program kepala daerah sehingga tidak mampu membangun berbagai potensi daerah.</li> </ul> <p><b>c. Penyebab Eksternal</b></p> <p>Anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan tidak usah terlalu aktif dalam kegiatan kunjungan kerja apalagi keluar daerah, sebaliknya ini hanya didominasi oleh kaum laki-laki.</p>							
CAPAIAN PROGRAM	<p><b>1. Tolak Ukur</b> Jumlah Dana sebesar Rp. 11.223.800.000,00,-</p> <p><b>2. Indikator dan Target Kinerja</b></p> <p><b>Input :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengusulan dana untuk mengangkat kegiatan tersebut sebesar Rp. 11.223.800.000,00,-</li> </ul> <p><b>Output:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasilnya terciptanya identitas budaya dharmasraya yang multikultural yang berkarya, berinovasi dan mencipta untuk kesejahteraan sehingga meningkatnya kecakapan dan keahlian masyarakat</li> </ul> <p><b>Outcome :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesejahteraan masyarakat jauh lebih maju dan meningkat, sehingga kehidupan masyarakat lebih sejahtera lagi.</li> </ul>							
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 11.223.800.000,00,- ( <b>Sebelas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu rupiah</b> )							
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	<p>Mengajukan pengusulan anggaran sebesar Rp. 11.223.800.000,00,- untuk Kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Masukan</td> <td>Rp. 11.223.800.000,00,-</td> </tr> <tr> <td>Keluaran</td> <td>Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD</td> </tr> <tr> <td>Hasil</td> <td>Terciptanya dharmasraya mandiri dan berbudaya dengan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara baik dan berkualitas.</td> </tr> </table>	Masukan	Rp. 11.223.800.000,00,-	Keluaran	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Hasil	Terciptanya dharmasraya mandiri dan berbudaya dengan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara baik dan berkualitas.
Masukan	Rp. 11.223.800.000,00,-							
Keluaran	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD							
Hasil	Terciptanya dharmasraya mandiri dan berbudaya dengan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara baik dan berkualitas.							

Pulau Punjung, Maret 2020  
Kepala  
Sekretaris DPRD Kabupaten  
Dharmasraya

**SETWAN**  
★ **NASUTION S.Pd, MM**  
★ NIP. 196403011986031040

VERIFIKASI KEGIATAN

<p><b>Inspektur</b></p> <p><b>KANDAM, S.Sos</b> NIP. 196706071991031004</p>	<p><b>KEPALA BKD</b></p> <p><b>PARYANTO, S.Sos, M.T</b> NIP. 196906091989021001</p>	<p><b>Kepala Bappeda</b></p> <p><b>Drs. ANDY SUMANTO, Cfr.A</b> NIP. 196812201990091001</p>	<p><b>Kepala Dinas Sosial, P3A, PPKB</b></p> <p><b>BOBBY P RIZA, S.STP, M.Si</b> NIP. 198205212000121002</p>
---	---	---	--